



PEMERINTAH
KONSTITUSIONAL VIII

RENCANA PEMULIHAN EKONOMI

Agustus 2020



P E M E R I N T A H
K O N S T I T U S I O N A L V I I I

RENCANA PEMULIHAN EKONOMI

Agustus 2020



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	6
Ringkasan Eksekutif	8
Bab I: Konteks Ekonomi-Sosial	21
1.1 Situasi Internasional pasca-COVID-19: 2020-2021	21
1.2 Diagnosis Situasi Ekonomi dan Sosial di Timor-Leste dan dampak dari COVID-19	28
1.2.1 Konteks Ekonomi dan Sosial pra-COVID-19	28
1.2.2 Dampak dari COVID-19	41
Bab II: Bidang-bidang yang menjadi Prioritas untuk Intervensi dan Langkah-langkah yang Diusulkan	47
2.1 Tujuan Intervensi: Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang	47
2.2 Mitigasi Dampak Ekonomi dan Sosial dari Krisis COVID-19: Jangka Pendek (2020)	48
2.2.1 Dukungan untuk Keluarga dan Produsen Lokal: "Paket Sembako"	49
2.2.2 Bantuan untuk Perusahaan dan Entitas Pemberi Kerja lainnya – Sektor Swasta	51
2.2.2.1 Tunjangan untuk Membantu Pemulihan Ekonomi	51
2.2.2.2 Pembebasan dari Kontribusi untuk Bagian yang Menjadi Tanggungan Entitas Pemberi-Kerja	53
2.2.2.3 Bantuan Khusus untuk Pekerja Sektor Informal	54
2.3 Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19: Jangka Menengah dan Panjang (2021-2022) dan Tahun-Tahun Berikutnya	54
2.3.1 Sektor-Sektor Ekonomi	59
2.3.1.1 Pertanian dan tanaman pangan dan tanaman untuk penghasilan	61
2.3.1.2 Pariwisata	72

2.3.2 Perumahan	77
2.3.3 Modal Manusia: Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial	79
2.3.3.1 Pendidikan	81
2.3.3.2 Kesehatan	83
2.3.3.3 Perlindungan sosial	84
2.3.4 Reformasi kelembagaan	86
BAB III: Pendanaan	98
Bab IV: Pemantauan dan Analisis Dampak	103
Koordinasi	104

KATA PENGANTAR

Penyakit COVID-19 berdampak sangat negatif pada perekonomian dunia. Timor-Leste secara alami tidak kebal terhadap penghentian paksa yang harus dilakukan negara-negara dalam perekonomian mereka untuk memerangi penyakit baru ini. Kelemahan ekonomi dunia dan model pembangunan masing-masing negara telah terlalu beresiko, dan menguji kemampuan mereka sendiri untuk menghadapi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat ini.

Pada awal pandemi, Pemerintah Konstitusional VIII menetapkan sembilan belas langkah untuk mengurangi dampak negatif dari kenyataan baru ini, pada keluarga dan perusahaan. Namun, dengan berlanjutnya pandemi, dampak sosial dan krisis ekonomi yang terjadi di seluruh dunia menuntut Pemerintah menempuh langkah-langkah jangka menengah / panjang yang lebih kuat, agar pulih dari krisis ini secepat mungkin dan secara berkelanjutan. Untuk tujuan ini, telah dibentuk Komisi Persiapan Rencana Pemulihan Ekonomi yang bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi Timor-Leste melalui pembuatan rencana yang jelas, obyektif dan realistis.

Terlepas dari semua ketidakpastian yang kita hadapi saat ini, COVID-19 memberi Timor-Leste peluang untuk mengembangkan perekonomiannya, menjadikannya lebih produktif dan efisien. Memang benar bahwa selama 20 tahun terakhir, dengan restorasi kemerdekaan, telah tercatat beberapa perkembangan di Timor-Leste di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, komunikasi, sanitasi dasar, perlindungan sosial, namun demikian, masih banyak yang harus diperbaiki sehingga akan ada pertumbuhan yang lebih inklusif, apresiasi yang lebih besar terhadap orang-orang Timor dan penciptaan ekonomi yang lebih tangguh. Untuk alasan ini, fokus utama dari Rencana ini adalah manusia.

Sebelum Keadaan Darurat pertama, yang disebabkan oleh pandemi, Timor-Leste sudah mengalami masa yang sulit, oleh karena itu, tantangan struktural semakin nyata sejak saat itu. Kita hidup dengan ekonomi subsisten, di mana mayoritas penduduknya hidup dari sumber daya pertanian mereka sendiri dan dengan banyak kesulitan. Kita tetap sangat bergantung pada pendapatan dari minyak dan sebagian besar pekerjaan dan pendapatan berasal dari ekonomi informal. Tingkat pelatihan dan kualifikasi SDM kita sangat rendah, dan tercermin pada produktivitas yang rendah, baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Kemampuan kita untuk menarik dan menyerap investasi asing sangat kecil dan kita tetap sangat bergantung pada impor. Perlindungan sosial tidak menjangkau semua orang Timor-Leste, juga tidak dengan cara yang sama. Ini hanyalah beberapa contoh yang membuat ekonomi kita rentan dan pandemi telah memperparah kesenjangan yang ada antara Timor-Leste dan negara-negara di kawasan. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan semua mekanisme sosial dan ekonomi sehingga memungkinkan untuk membangun bangsa yang sejahtera, berinvestasi lebih banyak lagi dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih bermartabat dan peluang yang sama untuk semua, dan tidak melupakan pilar utama pembangunan masyarakat mana pun: pendidikan dan kesehatan.

COVID-19 telah memperburuk kinerja Timor-Leste sebagai sebuah negara, diperkirakan bahwa tahun ini ada penurunan di produk domestik bruto yang disebabkan oleh penurunan kinerja para pelaku ekonomi dan kontraksi penawaran dan permintaan, dampak dari penerapan jarak sosial, penutupan perbatasan, penutupan beberapa perusahaan dan kurangnya investasi. Meskipun Rencana ini bermaksud untuk menanggapi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pandemi, tindakan yang didefinisikan di sini tidak terbatas pada itu

dan terutama bertujuan untuk mengembangkan berbagai sektor kegiatan ekonomi, sebab keadaan saat ini dipandang sebagai kesempatan untuk merancang sejumlah langkah untuk menanggapi masalah struktural yang sudah ada dalam ekonomi dan masyarakat kita. Untuk alasan ini, telah dirancang langkah-langkah yang berbeda sesuai dengan jangka waktu pelaksanaannya: jangka pendek (Melanjutkan dukungan kepada keluarga dan perusahaan sampai bulan Desember tahun 2020. Ini adalah langkah-langkah sementara yang memiliki tujuan utama untuk melindungi pekerjaan dan menjamin pendapatan bagi keluarga dan perusahaan yang mengalami kesulitan, berusaha meminimalkan stagnasi kegiatan dan layanan ekonomi yang tercatat sejak awal pandemi) dan jangka menengah / panjang, karena langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menjawab tantangan dari pandemi ini secara langsung dan meningkat. Merupakan langkah-langkah pemulihan dengan transformasi ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan pekerjaan yang lebih baik, mengkonsolidasikan program-program sosial untuk investasi publik dan mengubah struktur produktif yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Timor-Leste. Langkah-langkah yang diusulkan memiliki jangka waktu 2 sampai 3 tahun dan implementasi akan dimulai paling cepat pada tahun 2021). Ini adalah kesempatan bukan untuk kembali ke belakang, ke titik sebelum krisis, akan tetapi untuk memperbaiki jalan yang ditempuh negara. Oleh karena ide/gagasannya adalah transformasi.

Saat ini kita hidup dalam periode ketidakpastian, tantangan dan ketahanan yang besar bagi Timor-Leste, tetapi kita percaya bahwa langkah-langkah yang diusulkan di sini secara bertahap akan memungkinkan pemulihan ekonomi negara kita. Kita menginginkan masa depan yang lebih solid dan inklusif untuk negara kita, yang berbasis pada ekonomi yang lebih adil dan sejahtera, serta sumber daya manusia yang siap untuk bersaing di pasar kerja. Oleh karena itu, penting untuk menjamin kelangsungan hidup dan perluasan struktur bisnis, pemeliharaan dan penciptaan lapangan kerja baru, diversifikasi pasokan barang dan jasa untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan mendorong konsumsi, terutama melalui permintaan yang lebih besar akan produk nasional. Sangat penting untuk membangun masyarakat dan ekonomi yang berinvestasi di Timor-Leste dan pada orang-orang Timor-Leste.

O Primeiro-Ministro,

Taur Matan Ruak

RINGKASAN EKSEKUTIF

Orang-orang adalah fokus utama dari Rencana ini. Ini bukan ide baru, tetapi masih tetap penting hingga saat ini sama seperti pada tahun 1990an, ketika badan Program Pembangunan PBB (UNDP) meluncurkan Laporan Pembangunan Manusia yang pertama, untuk tujuan itu: untuk menempatkan orang-orang pada tujuan utama proses pembangunan. Laporan UNDP pertama ini dibuka dengan kalimat yang sama - "Rakyat adalah Kekayaan Sejati Suatu Bangsa" - yang telah menjadi ikon dan secara tegas menandai cara berpikir tentang Pembangunan Manusia dan, selanjutnya, kebijakan pemerintah.

Rencana Pemulihan Ekonomi ini muncul untuk memulihkan perekonomian nasional, yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Tetapi kita percaya bahwa ini juga merupakan kesempatan untuk merancang langkah-langkah kebijakan pemerintah yang membantu transformasi ekonomi dan sosial yang diperlukan negara kita, untuk menjadikannya tidak hanya negara dengan pendapatan lebih tinggi, tetapi juga negara yang lebih maju, dengan kesejahteraan manusia yang lebih besar.

SITUASI DUNIA SAAT INI: PANDEMI COVID-19

Pandemi yang disebabkan oleh COVID-19 berawal di China pada pertengahan bulan Januari tahun 2020.

Dari negara inilah pandemi itu menyebar ke negara lain pada bulan Februari/Maret tahun 2020, dan secara bertahap menjangkau seluruh dunia.

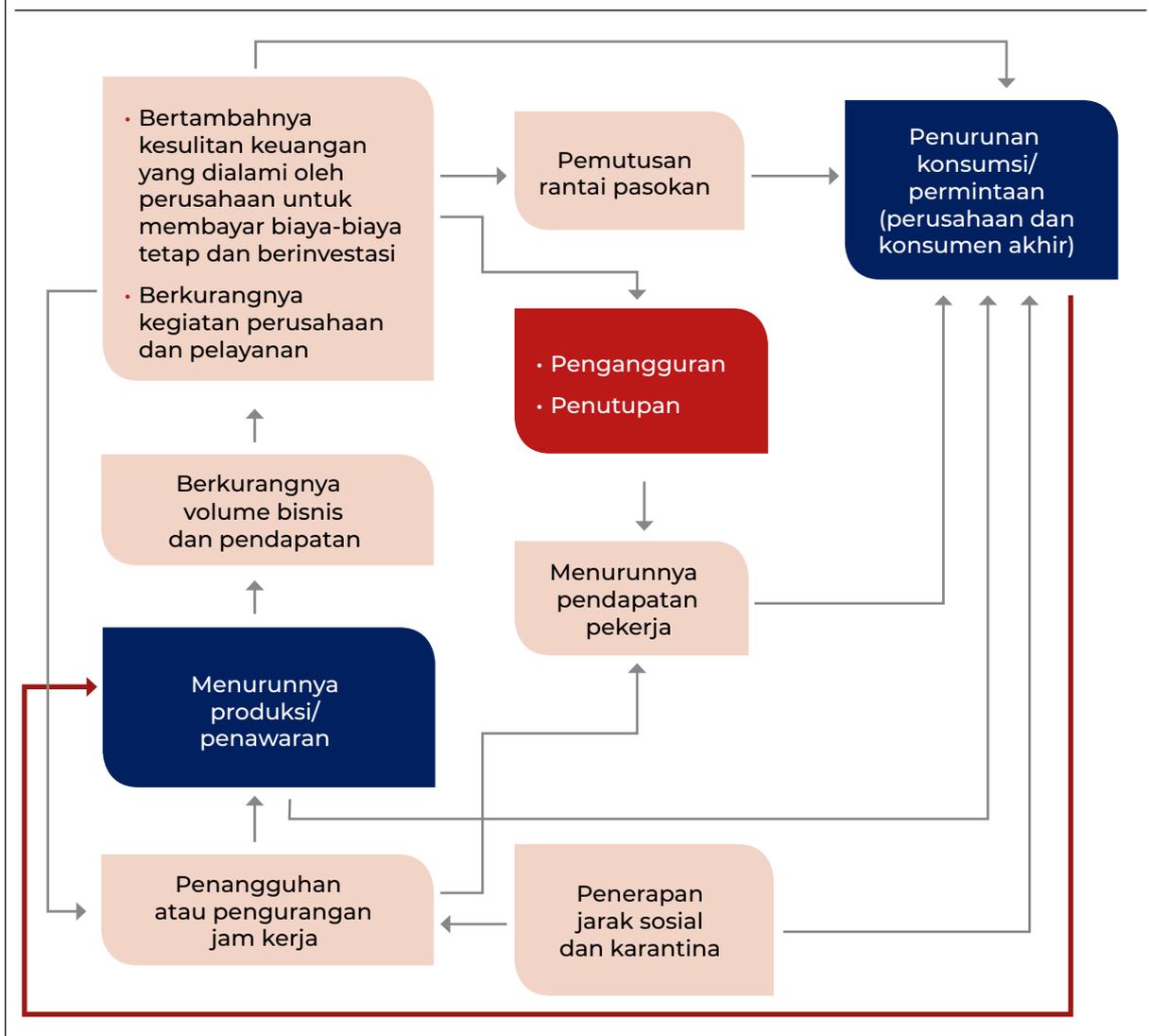
Dalam upaya untuk menghentikan penyebaran pandemi, dengan semua implikasinya terhadap kesehatan masyarakat, banyak negara telah mengambil langkah-langkah untuk membatasi pergerakan warganya, memaksa mereka untuk tinggal di rumah mereka. Hal ini pasti berdampak pada produksi barang dan jasa dan konsumsi (terutama oleh rumah tangga tetapi juga perusahaan), dengan kedua agregat ekonomi tersebut menurunkan nilainya, membawa ketidakstabilan di berbagai bursa saham dunia dan bursa pasar-pasar lain (misalnya, bahan bakar).

Pandemi ini, yang pada awalnya merupakan masalah kesehatan masyarakat, telah sangat mempengaruhi perekonomian dunia, baik dari sisi penawaran - pengurangan / pembekuan kegiatan usaha, dengan jatuhnya produksi dan pasokan barang dan jasa, dan berdampak pada lapangan kerja dan dalam jam kerja - maupun dari sisi permintaan - berkurangnya pendapatan keluarga (karena pengangguran atau pengurangan jam kerja atau sebagai akibat dari tindakan penerapan oleh jarak sosial dan karantina wajib untuk menahan penyebaran penyakit), dan berakibat pada penurunan konsumsi. Kontraksi penawaran dan permintaan agregat memiliki hubungan sebab dan akibat satu sama lain.

Selain penurunan konsumsi, pengangguran - akibat berkurangnya permintaan, tetapi terutama karena kontraksi pasokan - telah menjadi konsekuensi serius dari krisis ini. Pengangguran berdampak pada pendapatan masyarakat dan, dengan demikian, berdampak juga pada tingkat kemiskinan dan kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Di seluruh dunia, COVID-19 bahkan telah mempengaruhi semua indikator Pembangunan Manusia, termasuk pendapatan, kesehatan dan pendidikan.

Evolusi PDB, pada masa-masa seperti ini, biasanya dibandingkan dengan huruf "V" (penurunan tetapi pemulihan cepat), "U" (penurunan dan pemulihan dalam waktu sekitar 2-3 tahun) dan "L" (penurunan dan pemulihan sekitar 3-4 tahun).

Dampak dari krisis COVID-19



Perkiraan yang ada menunjukkan kontraksi ekonomi global yang parah (pada tingkat pertumbuhan PDB -4,9%) yang diperkirakan berjangka pendek kurva “V” – jika situasi kesehatan masyarakat dikendalikan dan negara-negara berhasil mengekang efek negatif dari pandemi dan mengambil langkah-langkah pemulihan ekonomi yang cepat.

DIAGNOSTIK SITUASI EKONOMI DAN SOSIAL DI TIMOR-LESTE DAN DAMPAK DARI COVID-19

Kebijakan ekonomi yang akan ditempuh di Timor-Leste untuk menghadapi krisis, harus dimulai, terutama, dari “diagnosis” yang benar tentang situasi di negara kita dan identifikasi masalah utama yang terdeteksi.

Sejak restorasi kemerdekaan, banyak kemajuan besar telah dicapai di berbagai tingkat Pembangunan Manusia, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, pertumbuhan tersebut tidak benar-benar inklusif, juga tidak benar-benar tercermin dalam penanggulangan kemiskinan

dan pembangunan manusia yang berkelanjutan, dengan indikator-indikator yang masih menunjukkan banyak masalah dalam perekonomian nasional.

Timor-Leste, pada tahap evolusi ini, memiliki permasalahan-permasalahan berikut ini:

- Perekonomian (yang sebagian besarnya) bersifat subsisten dalam transisi lambat menuju beberapa jenis modernitas tetapi masih dengan ditingkat kemiskinan yang sangat tinggi;
- Perekonomian yang sangat tergantung pada aktivitas ekonomi Negara, yang pada gilirannya sangat bergantung pada pendapatan dari minyak negara;
- Permasalahan ekonomi utama bagi kita adalah kurangnya lapangan kerja bagi warganya, terutama pekerjaan yang menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan yang dapat diidentifikasi dalam konteks “pembangunan manusia”.

“Pembangunan manusia adalah proses memperluas pilihan masyarakat (...) agar mereka menjalani hidup yang panjang dan sehat, memperoleh pengetahuan dan memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk standar hidup yang layak. Jika pilihan penting ini tidak tersedia, banyak peluang lain akan tetap tidak dapat diakses.” (dalam UNDP Human Development Report 1990)

- Tingkat pembangunan modal manusia (pendidikan, kesehatan) yang sangat rendah, secara absolut dan dalam perbandingann dengan sebagian besar negara tetangga, di mana mereka untuk berinvestasi secara signifikan dalam modal fisik (infrastruktur) – dan membiarkan investasi pada orang ke urutan yang kedua;
- Kekurangan gizi pada anak-anak;
- Rendahnya tingkat investasi produktif (publik dan swasta), yang mencerminkan rendahnya produktivitas struktur produktif dan tenaga kerja;
- Angka yang sangat tinggi dari sektor informal dan pekerjaan yang rentan;
- Kesenjangan dalam distribusi pendapatan;
- Ketergantungan besar pada produksi luar negeri (impor);
- Kapasitas yang sangat minim untuk menarik investasi asing;
- Masyarakat tanpa perlindungan sosial dengan angka yang masih tinggi.

Unsur-unsur karakteristik ekonomi nasional ini pada dasarnya bersifat struktural dan sudah ada sebelum krisis yang disebabkan oleh COVID-19, yang diperburuk oleh ketidakstabilan politik dalam 2-3 tahun terakhir dan dengan tidak disetujuinya, Januari lalu, Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk tahun 2020.

COVID-19 semakin memperburuk situasi, baik karena efek ekonomi pada sisi permintaan dan penawaran - mirip dengan yang telah terjadi di seluruh dunia (lihat gambar di atas) - atau karena kekhawatiran yang terus berlanjut, terutama kurangnya kepercayaan pelaku ekonomi, termasuk pekerja, perusahaan / penyedia jasa / produsen dan konsumen.

Meskipun dampak dalam kesehatan masyarakat telah berkurang, perkiraan Bank Sentral Timor-Leste (BCTL) menunjukkan penurunan PDB riil sebesar -6% pada tahun 2020, efek yang disebabkan oleh kontraksi pasokan / produksi dan permintaan / konsumsi.

Dampak pada pekerjaan mungkin dirasakan kemudian, dikarenakan bantuan yang telah disetujui oleh Pemerintah selama periode darurat, tetapi pendapatan telah berkurang, dimana banyak pekerja yang menderita pengurangan jam kerja atau diberhentikan sementara waktu dari kontrak kerja. Perusahaan, banyak di antaranya yang sebelumnya sudah kehilangan modal, kehilangan pendapatan, mengurangi aktivitas dan investasi - dan banyak yang mulai menutup usaha, setelah dukungan dari Pemerintah berakhir.

Penurunan pendapatan dan kontraksi penawaran dan juga langkah-langkah karantina dan penerapan jarak sosial yang diambil, menyebabkan penurunan permintaan / konsumsi dan investasi swasta oleh keluarga. Perkiraan BCTL menunjukkan kontraksi dalam permintaan domestik sebesar -10%, dengan -6% dalam permintaan swasta. Faktor lain yang juga berkontribusi pada penurunan permintaan adalah pulangnya banyak tenaga kerja asing ke negara mereka.

Meskipun dampaknya secara umum dirasakan pada perekonomian secara keseluruhan, beberapa kegiatan dan sektor, secara khusus, paling terdampak:

- Kegiatan ekonomi yang terkait dengan sektor pariwisata, termasuk perhotelan dan usaha restoran
- Sektor informal yang kebanyakannya tanpa perlindungan sosial
- Perusahaan dan LSM-LSM yang sangat tergantung pada pekerja asing yang pulang ke negara asal mereka.

RENCANA PEMULIHAN EKONOMI: TAHAPAN DAN TUJUAN

Rencana Pemulihan Ekonomi ini, sejak awal, bertujuan untuk memulihkan aktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang terkena dampak krisis saat ini akibat COVID-19. Meskipun kita merasa sulit bahwa kurva pertumbuhan PDB berbentuk "V", kita tidak ingin kurvanya menjadi "L". Oleh karena itu, kita harus melakukan semua yang mungkin agar kurvanya menjadi "U" - seketat mungkin, yaitu bisa kembali ke level produk 2019, dalam skenario kasus terburuk, dalam kurun waktu 2 tahun.

Kita bisa melakukan ini sebagian, jika kita mengambil langkah-langkah kebijakan ekonomi yang tepat. Mendefinisikan langkah-langkah itu adalah tujuan utama dari dokumen ini, yang meliputi berbagai sektor ekonomi dan juga kegiatan sosial.

Namun, jangan berpikir bahwa itu hanya dimaksudkan untuk kembali ke titik awal, ke titik di mana krisis ini muncul. Semua negara - termasuk Timor-Leste - menyadari bahwa kedalaman krisis ini sebagian besar disebabkan oleh lemahnya "fondasi" ekonomi dan masyarakat. Dengan kata lain, krisis ini harus dipahami sebagai peluang untuk merancang kebijakan pemerintah yang mampu merespon masalah struktural ekonomi dan masyarakat kita yang sudah ada sebelumnya.

Oleh karena itu kebijakan yang akan diambil harus mempunyai **tujuan ganda**:

- 1) **menopang** perekonomian agar tidak membiarkan krisis semakin dalam dan mempertahankan kesejahteraan rakyat, di satu sisi, dan
- 2) **mengubah** fondasi ekonomi dan masyarakat Timor-Leste agar lebih tahan terhadap guncangan di masa depan sambil mengoreksi jalan yang telah diambil dan, kita yakin, tidak secara signifikan meningkatkan kesejahteraan rakyat Timor-Leste.

Oleh karena itu, Rencana Pemulihan Ekonomi saat ini akan dilakukan pada dua tahap yang berbeda:

- **Tahap pertama**, respons untuk jangka waktu (sangat) pendek, sudah di paruh kedua tahun 2020 (antara bulan juli dan desember), untuk mengurangi dampak krisis yang disebabkan oleh COVID-19; dan
- **Tahap kedua**, dengan langkah-langkah jangka menengah - banyak diantaranya memiliki efek jangka panjang – yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi, dalam jangka waktu 2-3 tahun, berupaya untuk menanggapi tidak hanya peningkatan kesulitan yang disebabkan oleh pandemi, tetapi juga secara fundamental untuk

memberi jawaban pada masalah-masalah (konjungtural dan struktural) ekonomi nasional yang sudah ada sebelumnya (yaitu kurangnya lapangan kerja), dan resiko bahwa, tanpa mengubah apapun secara substansial terkait dengan masa lalu, kita akan terus beresiko mengalami setiap krisis baru yang mungkin muncul di masa depan – selain terus berada pada tingkat atau “pembangunan” yang rendah.

Pada **tahap pertama**, dengan jangka waktu yang sangat pendek, segera setelah pandemi, langkah-langkah sementara dianjurkan untuk **mengurangi dampak dari krisis**, tetapi sudah harus mulai mengarahkan intervensi ke arah pemulihan perekonomian nasional untuk jangka waktu yang panjang.

Pada tahap ini, **tujuan** dasarnya adalah untuk **mempertahankan sebanyak mungkin pekerjaan yang sudah ada sebelum krisis dan untuk memulihkan pendapatan rumah-tangga**, melalui pemeliharaan pekerjaan dan bantuan langsung kepada warga, dan **untuk mendukung perusahaan tetap bertahan di pasar dan dimulainya kembali aktivitas mereka**. Dengan cara ini, diharapkan bisa memastikan tingkat konsumsi yang setara (atau, setidaknya, tidak jauh lebih rendah) dari apa yang sudah ada pada periode sebelum COVID-19 – faktor penting agar tidak mengurangi standar hidup penduduk dan mengurangi dampaknya pada resesi ekonomi. Mengenai hilangnya pekerjaan dan pendapatan, serta kendala di sisi permintaan dan penawaran, tujuannya adalah untuk mendukung masyarakat dan perusahaan secara langsung, untuk pulih dari krisis, dan bukan untuk menambah beban biaya yang harus mereka tanggung.

Pada **tahap kedua**, dengan mempertimbangkan bantuan langsung yang diberikan pada tahap sebelumnya, diusulkan langkah-langkah struktural, yaitu “**pemulihan dengan transformasi**” ekonomi, yang akan dilaksanakan mulai tahun 2021, diperpanjang hingga tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya, dengan dampak jangka menengah dan jangka panjang.

Pada tahap ini, ada tiga **tujuan** utama dari kebijakan pemerintah yang diusulkan: **penciptaan lapangan kerja baru yang produktif dan layak; realisasi dan pemantapan program sosial investasi negara (pendidikan, kesehatan, perumahan, perlindungan sosial); dan perubahan dalam struktur produktif dan faktor-faktor yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi**.

Namun demikian, intervensi-intervensi ini harus dilihat dalam konteks diagnosis ekonomi nasional sebelum COVID-19. Dengan kata lain, - bahkan untuk jangka waktu terbatas yang dimaksud (2 sampai 2,5 tahun) - perlu juga dipikirkan solusi jangka menengah dan jangka panjang, yang berdampak pada keberlanjutan dan yang bertujuan untuk merespon permasalahan struktural yang teridentifikasi, yaitu dalam hal tatanan produktif nasional dan kesulitan besar dalam menciptakan lapangan kerja yang produktif minimal, di satu sisi, dan rendahnya tingkat pendapatan sebagian besar warga negara – yang sebenarnya merupakan wajah lain dari masalah yang berkaitan dengan pekerjaan, di sisi lain. Secara khusus, perlu dipikirkan langkah-langkah/program yang menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah yang cukup besar, yang dihasilkan oleh investasi yang lebih padat karya daripada padat modal tetapi, tentu saja, tidak mengabaikan semua jenis investasi.

TAHAP I: MITIGASI DAMPAK EKONOMI DAN SOSIAL DARI KRISIS COVID-19: JANGKA PENDEK (2020)

Dalam tahapan I, ada 4 langkah yang diusulkan yang berfokus pada pemulihan permintaan/konsumsi (dan pemenuhan kebutuhan dasar) dan penawaran/produksi (dengan mendukung perusahaan-perusahaan untuk kembali beraktivitas dan membantu secara khusus sektor-sektor yang paling terdampak – termasuk sektor pariwisata dan sektor informal).

Langkah	Tujuan	Penerima	Syarat kelayakan	Spesifikasi	Biaya
Paket sembako (November-Desember)	<ul style="list-style-type: none"> membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar Melawan kelaparan dan kerentanan-kerentanan terbesar Membantu petani, produsen, dan pedagang lokal 	Keluarga	Universal	<ul style="list-style-type: none"> Diberikan dalam bentuk voucher atau keranjang Komposisi: bahan makanan dan produk-produk untuk kebersihan Basis per kapita; tergantung jumlah anggota keluarga Preferensi untuk produk nasional atau dibeli di pasar lokal 	71,5 juta USD (jumlah ini bisa direvisi)
Tunjangan pemulihan (Agustus-Desember)	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung pengusaha dan pengusaha individu untuk melanjutkan kegiatan ekonomi Secara khusus mendukung sektor Pariwisata, yang sangat terdampak oleh krisis Meningkatkan likuiditas langsung dari entitas penerima 	Entitas Pemberi Kerja dan Pengusaha Perorangan	<ul style="list-style-type: none"> Melanjutkan aktivitas (kecuali sektor pariwisata) Pendaftaran di Jaminan Sosial dan sistem perpajakan Keharusan untuk tidak memecat pekerja 	<ul style="list-style-type: none"> Tunjangan dihitung berdasarkan pembobotan dua faktor: kehilangan volume bisnis dan jumlah pekerja Kehilangan volume bisnis: perbandingan volume di bulan Juni /209 dengan volume pada periode yang sama Penerima bantuan dapat menggunakan hibah untuk memenuhi kebutuhan 	USD 35 juta (jumlah ini bisa direvisi)
Pembebasan dari kontribusi (Juli-Desember)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan likuiditas langsung dari entitas penerima 	Entitas Pemberi Kerja dan Pengusaha Perorangan	<ul style="list-style-type: none"> Melanjutkan aktivitas (kecuali sektor pariwisata) Pendaftaran di Jaminan Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> Pembebasan dari kontribusi yang dibayarkan oleh pemberi kerja (6%) Dalam kasus pekerja yang terdaftar secara opsional dengan Jaminan Sosial: pembebasan iuran sebesar, 6% 	3,6 juta
Bantuan khusus bagi para pekerja informal (Oktober-Desember)	<ul style="list-style-type: none"> Membantu para pekerja yang berada dalam situasi berna-benar tanpa perlindungan sosial Mendorong formalisasi 	Pekerja mandiri dan pekerja dari sektor informal	<ul style="list-style-type: none"> Pendaftaran di Jaminan Sosial pada bulan agustus/ september Kewajiban untuk tetap memberikan iuran selama 6 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> Subsidi bersifat tetap, sebesar 60% dari nilai insiden tahap pertama keanggotaan opsional: 36 USD = 60%x60 USD Pajak iuran: 4% pada bulan-bulan saat tindakan tersebut diberlakukan; 10% dalam 3 bulan berikutnya 	3,3 juta USD (jumlah ini bisa direvisi)

TAHAP II: PEMULIHAN EKONOMI PASCA-COVID-19: JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANG (2021-2022 DAN SELANJUTNYA)

Krisis ekonomi dan sosial saat ini yang disebabkan oleh COVID-19 bukannya tidak pernah terjadi sebelumnya, ada krisis lain yang telah mengganggu perekonomian selama bertahun-tahun. Tetapi, dilihat dari dampak yang ditimbulkan secara bersamaan terhadap penawaran dan permintaan, dan menyebar ke seluruh dunia, krisis ini hanya bisa disejajarkan dengan Perang Dunia II.

Pada tahun 1942, selama Perang Dunia II, terinspirasi oleh Keynes, WH Beveridge mengusulkan sebuah rencana intervensi negara yang ambisius, untuk memastikan rekonstruksi ekonomi dan sosial, redistribusi pendapatan dan universalitas bantuan sosial, untuk memeringi apa yang disebutnya “lima setan raksasa masyarakat” [Five giant Evils of society]: kekurangan (yang harus dilawan dengan pendapatan yang memadai untuk semua), penyakit (yang harus dilawan dengan pembentukan Sistem Kesehatan Nasional), kebodohan/buta huruf (yang harus dilawan dengan pendidikan gratis dan universal), kemelaratan (yang harus dilawan dengan menjamin perumahan untuk semua orang) dan pengangguran (yang harus dilawan melalui kebijakan ketenagakerjaan).

Untungnya, hari ini, dunia tidak terlibat dalam perang dalam skala global, tapi waktunya berbeda dan jawabannya secara alami membutuhkan adaptasi ke zaman baru. Namun, seperti pada momen-momen lain dalam sejarah, sejak dimulainya Perang Dunia II, krisis yang terjadi saat ini akibat COVID-19 telah menunjukkan pentingnya memiliki layanan publik - khususnya Sistem Kesehatan Nasional, sistem pendidikan negara, dan sistem perlindungan sosial – yang berkualitas dan komprehensif dan, secara umum, peranan Negara dalam ekonomi dan masyarakat, sehingga penduduk lebih terlindungi (termasuk secara klinis) dan lebih tahan terhadap “guncangan-guncangan” seperti ini. Karena itu, penting untuk meningkatkan layanan publik, tidak harus dengan membuat negara menjadi lebih besar, tetapi negara yang lebih baik - yang juga mendukung dan mendorong sektor ekonomi swasta yang penting dalam perekonomian.

Langkah-langkah kebijakan pemerintah yang diusulkan di Tahap I – untuk paruh kedua tahun 2020 - dengan tujuan untuk mengurangi dampak krisis dalam jangka yang sangat pendek, hanya berarti jika itu merupakan langkah pertama bagi masa depan kita sebagai sebuah negara, dengan ekonomi yang lebih inklusif dan tangguh dari yang kita miliki hingga munculnya COVID-19.

Oleh karena itu, Rencana Pemulihan Ekonomi ini mengusulkan, pada Tahap II, sejumlah langkah kebijakan ekonomi yang ambisius yang berfokus pada manusia dan pembangunan manusia, untuk menanggapi masalah struktural yang sudah diidentifikasi dan untuk lebih mempersiapkan ekonomi dan masyarakat untuk masa yang akan datang.

“Pembangunan manusia” harus menjadi pusat kebijakan ekonomi Pemerintah VIII.

Ini bukan hanya tentang memiliki pendapatan, tetapi juga tentang mendapat akses ke barang dan jasa yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, makanan / nutrisi, partisipasi sosial dan budaya. Baik pendidikan maupun kesehatan merupakan dua pilar utama pembangunan sumber daya manusia, penting untuk berfungsinya masyarakat modern dan pembangunan ekonomi bangsa dalam jangka panjang.

Masa depan Timor-Leste sebagai negara yang merdeka dan berdaulat adalah negara di mana penduduknya memiliki akses ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, pelayanan kesehatan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, dengan kesejahteraan yang lebih besar secara materil. Semua ini membutuhkan pekerjaan yang lebih produktif, dengan perlindungan sosial, dan upah yang lebih baik.

Tapi, membicarakan prinsip saja tidak cukup. Penting sekali menerapkan prinsip-prinsip itu secara nyata, melalui alokasi sumber daya yang dibuat setiap tahun di Anggaran Negara. Di sinilah letak kesulitan terbesar: beralih dari membicarakan prinsip ke alokasi nyata sumber daya publik yang yang mewujudkan prinsip-prinsip itu dalam kehidupan warga negara kita.

Secara konkret, Anggaran Negara tahunan harus menyediakan alokasi sumber daya secara efektif yang mencakup lebih banyak sumber daya untuk pendidikan, kesehatan dan makanan / nutrisi.

“Rule of thumb” akan ditetapkan sebagai tujuan alokasi sumber daya baru penggandaan pengeluaran di bidang ini selama periode 5 tahun, untuk dimulai pada awal tahun 2021

Tabel berikut merangkum langkah-langkah yang diusulkan.

Sektor/ Bidang	Tindakan/ Langkah yang Diusulkan
<p>Pertanian</p> <p>(dan industri kecil pengolahan makanan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat kebijakan untuk memperbaharui perkebunan kopi Timor-Leste dengan subsidi bagi petani yang mengganti tanaman lama dengan yang baru dan lebih produktif; • Mengembangkan pemamfaatan kehutanan, yaitu cendana dan kayu jati, berdasarkan undang-undang yang disetujui pada tahun 2017; • Mendorong penanaman pohon untuk kayu bakar untuk menghindari penebangan pohon secara sembarangan; meningkatkan kualitas penyuluhan pedesaan; pengenalan pendidikan peternakan; • Implementasi kebijakan penggantian impor (Sebagian), sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, khususnya impor beras: : <ul style="list-style-type: none"> ○ omeningkatkan kontrol impor (menaikkan tarif); ○ mendorong produksi nasional, melalui penyediaan bibit dan jaminan pemasaran / bantuan untuk penjualan produksi (Program pembelian dan distribusi produksi oleh Negara); ○ Mengintensifkan penggunaan mesin penanam (tetapi bukan traktor) dalam penanaman padi; ○ Mendirikan “bank benih” yang produktif dan menyediakannya bagi para petani. • Mendukung sektor swasta dalam meningkatkan produksi daging dengan sistem kurungan hewan dan pengawasan kesehatan: <ul style="list-style-type: none"> ○ Melakukan kampanye vaksinasi hewan secara masal; ○ Memberikan bibit tanaman untuk pakan hewan kepada para peternak; ○ Membangun sarana penampungan air untuk ternak di desa-desa, menggunakan program pekerjaan umum pedesaan padat karya. • Mempromosikan dan mendukung asosiasi pertanian, khususnya melalui dukungan langsung kepada lembaga yang mempromosikan kredit mikro di masyarakat pedesaan; • Menyediakan, di Perguruan Tinggi atau Lembaga lainnya, pelatihan kursus (pada tingkat yang lebih tinggi, untuk jangka waktu yang lebih lama, tetapi juga teknis-intensif jangka pendek) di bidang tertentu seperti pertanian tropis dan peternakan; • Meningkatkan dukungan untuk proyek-proyek seperti “Quinta Portugal” atau proyek serupa lainnya, untuk meningkatkan bantuan teknis untuk kopi dan produsen pertanian lainnya.

Sektor/ Bidang	Tindakan/ Langkah yang Diusulkan
Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Mendirikan perusahaan milik negara untuk mendorong sektor ini; • Meningkatkan pendidikan/ pelatihan profesional dibidang ini dengan “mengupgrade” sebuah sekolah pariwisata ke tingkat yang lebih tinggi, internasional; • Melakukan pemugaran terhadap bekas kediaman bupati dan “benteng” untuk melestarikan warisan kita dan mendukung pariwisata, kemungkinan dengan dukungan dari Mitra Pembangunan dan UNESCO; • Merehabilitasi jalanan pedesaan yang memiliki daya tarik wisata khusus, menggunakan program pekerjaan umum pedesaan padat karya. • Mengendalikan (memusnahkan) buaya di pantai utara untuk membuat pantainya menjadi lebih aman; • Membangun / menciptakan (di Metinaro?) Sebuah taman tematik yang didedikasikan untuk penyebaran dan pelestarian budaya dan kerajinan tangan Timor-Leste; • Mempromosikan Ekowisata, misalnya dengan mengkombinasikan tempat penginapan dengan perkebunan kopi atau persawahan; • Berpegang pada Strategi Nasional yang telah disetujui untuk sektor tersebut sebagai referensi, membuat rencana konkret untuk mengembangkan pariwisata, secara bertahap. Berdasarkan karakteristiknya, akan dimulai sekarang dengan "ujung timur", kabupaten Baukau, Vikeke dan Lautein, sebagai daerah untuk prioritas awal untuk pengembangan pariwisata (yang akan diikuti dengan daerah lain); dalam jangka waktu 5 sampai 6 tahun, merehabilitasi bandara Baukau untuk menerima penerbangan “charter”; • Membangun Museum-Perpustakaan Nasional, yang telah direncanakan, di Dili; • Mengembangkan iklan dan kampanye pemasaran tentang Timor-Leste, untuk dipromosikan di luar negeri, yang menyoroti kekayaan alam laut dan pegunungan negara ini.
Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun perkampungan lengkap dengan infrastruktur di beberapa kota (misalnya: Dili, Baukau, Pante Makasar) untuk membangun perumahan yang ditujukan untuk keluarga berpenghasilan rendah untuk perumahan sosial, yang akan diserahkan kepada penghuninya setelah 25 tahun pembayaran sewa - dinamisasi, kepemilikan dan pengelolaan program ini harus menjadi tanggung-jawab Jaminan Sosial atau lembaga baru yang didirikan (National Housing Institute?), yang terkait dengan Jaminan Sosial; • Menjamin kebersihan umum, pasokan air di rumah dan pasokan listrik di seluruh negeri, secara bertahap; • Membangun sebuah pusat pengolahan sampah dan air limbah moderen (Dili); • Membangun pusat mata air untuk umum.

Sektor/ Bidang	Tindakan/ Langkah yang Diusulkan
<p>Pendidikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan persentase pengeluaran untuk pendidikan dalam konteks APBN tahunan hingga, setidaknya, akhir periode legislatif, dan menetapkan sebagai tujuan selama 5 tahun penggandaan beban biaya-biaya ini di APBN; • Menambah jumlah CAFE – (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah), menjadi 2 sampai 3 per kabupaten, pada tahap pertama (5 sampai 6 tahun); • Memperluas jaringan pusat pendidikan menengah, Taman kanak-kanak dan pusat pelatihan ketenaga-kerjaan; • Membuat proyek pemeliharaan / rehabilitasi gedung sekolah (semakin banyak sekolah yang lebih baik dengan pengurangan jumlah siswa per guru), dapat dilakukan dalam kerangka program pekerjaan umum pedesaan padat karya; • Membuat kesepakatan dengan Portugal dan Brazil untuk memungkinkan dukungan untuk CAFE-CAFE baru yang akan dibangun; menggunakan pembiayaan dari mitra pembangunan untuk pendirian CAFE dan rehabilitasi gedung sekolah dan gedung pelatihan ketenaga-kerjaan; • Meningkatkan program pelatihan guru untuk berbagai tingkat pendidikan; • Mencetak dan membagikan buku pelajaran kepada siswa dan guru; • Memulihkan 13 Surat Pendidikan yang telah dibuat, mengupdate dan menggunakan surat-suat itu sebagai instrumen perencanaan dan strategi pendidikan yang penting; • Memperbaiki program makanan tambahan anak sekolah (yang berkaitan dengan menu dan proses pelaksanaan); • Membuat layanan kredit, dengan persyaratan konsesi, untuk memberikan dukungan finansial kepada Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Terakreditasi, menggantikan subsidi pemerintah saat ini; • Menetapkan program untuk mengikat lulusan muda, agar mereka tidak "merantau" ke luar negeri untuk mencari peluang kerja.
<p>Kesehatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menambah pengeluaran di bidang kesehatan saat ini untuk meningkatkan secara signifikan kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien, peralatan, materi, pelatihan sumber daya; • Menambah bantuan keuangan dan teknis untuk Program-program seperti Kesehatan di Keluarga, Kesehatan di Sekolah dan Kesehatan di tempat-Kerja; • Melaksanakan pekerjaan pemeliharaan rumah sakit dan pusat kesehatan, jika hanya memerlukan rehabilitasi kecil-kecilan, dapat dilakukan dalam rangka program pemerintah untuk pekerjaan padat karya; • Meningkatkan investasi publik dalam memperluas infrastruktur rumah sakit dan pusat perawatan kesehatan di seluruh negeri, berdasarkan rencana yang tepat;

Sektor/ Bidang	Tindakan/ Langkah yang Diusulkan
<p>Kesehatan (kelanjutan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan investasi negara dalam pelatihan dan akreditasi sumber daya manusia di bidang kesehatan; • Mengembangkan kesepakatan dengan entitas swasta (termasuk sektor ketiga) untuk konsesi pengelolaan (mungkin sebagian) rumah sakit, klinik dan pusat kesehatan, dengan subsidi Negara, untuk meningkatkan penawaran dan kualitasnya, tanpa menciptakan hambatan untuk mengaksesnya; • Mempromosikan peningkatan berkelanjutan pelatihan petugas kesehatan (kesepakatan dengan WHO dan mitra-mitra pembangunan), baik di tingkat ilmiah maupun teknis (misalnya untuk mengoperasikan peralatan) maupun di tingkat pedagogis; • Melakukan kampanye - baik secara langsung atau melalui bantuan kepada lembaga solidaritas sosial yang bergerak di bidang ini - di lapangan, tentang praktik kebersihan yang baik (seperti mencuci tangan), penggunaan obat-obatan, dan penggunaan layanan kesehatan, dan menghindari penggunaan praktik tradisional yang tidak terbukti secara ilmiah.
<p>Perlindungan Sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyetujui Strategi Perlindungan Sosial Nasional yang sudah disiapkan dan merancang rencana implementasi tahunan, yang harus diperhitungkan dalam persiapan rencana dan anggaran tahunan Negara; • Menciptakan mekanisme / instrumen alternatif untuk pembayaran tunjangan sosial, dan menghindari pembayaran tunai dan resiko yang terkait, dan membantu ekonomi menggunakan sistem "bank", dan mengurangi biaya untuk implementasi langkah-langkah tunjangan sosial; • Mengoperasikan Layanan Verifikasi Orang-orang penyandang disabilitas; • Menyetujui bentuk dan model pengelolaan Dana Cadangan Jaminan Sosial; • Meningkatkan cakupan Program "Bolsa da Mãe/ Beasiswa untuk siswa tidak mampu"; • Menciptakan perlindungan terhadap kematian, dalam skema non-kontributif; • Menciptakan perlindungan terhadap penyakit dan pengangguran, dalam skema iuran; • Menerapkan program ketenaga-kerjaan aktif - program pemerintah untuk ketenaga-kerjaan pedesaan, di bidang padat karya, seperti konstruksi sipil (jalan pedesaan, kran air umum, pasar, pekerjaan kecil perbaikan fasilitas umum) atau pariwisata; • Melakukan kampanye informasi besar-besaran untuk pekerja pedesaan dan pekerja dari sektor informal, untuk mendorong kepatuhan mereka pada skema jaminan sosial - mendukung keterikatan ini, melalui partisipasi bersama Negara dalam pajak iuran; • Mempelajari kemungkinan, untuk membuat tindakan perlindungan sosial baru untuk jangka panjang, yang bertujuan untuk menjamin pendapatan minimum bagi semua warga negara yang tidak memiliki pendapatan.

Sektor/ Bidang	Tindakan/ Langkah yang Diusulkan
<p>Aspek-aspek Kelembagaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyetujui dan mempublikasikan “Hukum Pertanahan” dan semua peraturan terkait lainnya; • Menyusun dan menyetujui kerangka peraturan yang diperlukan untuk operasionalisasi perusahaan (peraturan tentang kebangkrutan, perpaduan perusahaan, akses ke kredit, dll); • Meningkatkan fungsi Pengadilan dengan memberi mereka kemampuan untuk memutuskan kasus perdata, bukan hanya kasus pidana; • Menyusun dan menyetujui Undang-undang Kerangka Kerja APBN yang baru, termasuk seluruh Sektor Administrasi Negara; • Mempersiapkan dan menyetujui Bagan Akun, untuk sektor swasta dan pemerintah; • Melakukan reformasi dalam Administrasi Publik: membuat sistem yang adil untuk mengevaluasi kinerja para pegawai; memberikan kursus pelatihan singkat yang ditujukan pada bidang-bidang tertentu; meningkatkan kapasitas dan keterampilan layanan sumber daya manusia dari berbagai badan publik, untuk mengurangi birokrasi di beberapa prosedur; merestrukturisasi tenaga kerja, dengan mewajibkan proses pensiun sejak usia 60 tahun; Menerapkan efektifitas penerbitan “kartu identitas” (dengan nomor identitas satu-satunya dan untuk seumur hidup) untuk semua; • menjadikan Direktorat Jenderal Statistik saat ini menjadi Lembaga Publik otonom - di bawah pengawasan politik Perdana Menteri atau Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perencanaan dan Perencanaan; • Merumuskan kembali komposisi Dewan Ketenagakerjaan Nasional, agar Jaminan Sosial menjadi bagian dari dewan itu, untuk mempromosikan dialog sosial yang efektif dan terkoordinasi, di bidang ketenagakerjaan dan jaminan sosial; • Membuat sistem pendaftaran wajib bagi orang-orang yang menganggur / yang mencari pekerjaan; • Meningkatkan layanan Pengawasan Ketenagakerjaan, terutama dengan menyediakan lebih banyak sumber daya bagi layanan-layanan ini; • Menciptakan sebuah mekanisme komunikasi, tepat waktu, antara layanan registrasi bisnis (SERVE), layanan perpajakan (Kementerian Keuangan) dan Perlindungan Sosial - membuat registrasi bisnis lebih efisien, lebih cepat dan tidak birokratis; • Reformasi pajak: membuat kode pajak yang redistributif dan adil, yang memperhitungkan juga pengecualian / manfaat pajak dalam situasi tertentu (kebijakan ekonomi untuk mendorong sektor swasta); • Pembentukan kemitraan dengan sektor perbankan, bertujuan untuk menciptakan kondisi pembiayaan bagi perusahaan dan usaha kecil: negosiasi tentang persyaratan pinjaman (volume, suku bunga, masa tenggang). Bank-bank, kemungkinan harus diberi kompensasi, dengan memberikan manfaat pajak yang sesuai;

Sektor/ Bidang	Tindakan/ Langkah yang Diusulkan
<p>Aspek-aspek Kelembagaan (kelanjutan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Antar Kementerian: harus ada koordinasi antar berbagai Kementerian yang menjadi bagian dari Pemerintahan VIII untuk menghindari tumpang-tindih tugas/ tanggung jawab, serta untuk mengarahkan sumber daya yang ada dengan baik, sesuai ruang lingkup masing-masing Kementerian; • Memulai proses desentralisasi administratif secara efektif, melalui, pada tahap pertama - dan dengan mempertimbangkan peningkatan skala yang diperlukan - pembentukan kawasan (4/5), yang otonom; • Mengembangkan suatu proyek percontohan - di 2 atau 3 Kota— “carrinhas móveis de cidadania” [Mobil Kewarganegaraan], untuk meningkatkan beberapa layanan publik yang penting (catatan sipil dan aktualisasi data, bantuan medis / konsultasi umum dan pengobatan, pembayaran tunjangan sosial, pengiriman barang dan bantuan makanan) kepada masyarakat yang paling terisolir untuk menbongkar hambatan akses.
<p>Instalasi serat Optik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mempercepat seluruh proses pemasangan serat optik melalui kabel bawah laut yang menghubungkan Timor-Leste dengan bagian lain dunia.
<p>Energi Terbarukan, Berkelanjutan, dan Alternatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan sumber daya alam yang Timor-Leste miliki - matahari, laut dan angin - sebagai cara untuk mengurangi biaya untuk bahan bakar, selain sebagai sumber energi yang ramah lingkungan.

BAB I: KONTEKS EKONOMI-SOSIAL

1.1 SITUASI INTERNASIONAL PASCA-COVID-19: 2020-2021

Pandemi yang disebabkan oleh COVID-19 bermula di Cina pada paruh kedua bulan Januari 2020.

Dari negara ini, pandemi itu menyebar ke negara lain pada bulan Februari /Maret 2020, terutama di Uni Eropa (Italia and Spanyol, misalnya) diikuti dengan penyebaran ke benua Amerika (USA, Brasil dan lain-lain). Di kelompok negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), COVID-19 telah menjangkiti, pada awal April 2020, lebih dari 15 ribu orang, menyebabkan kematian lebih dari 500 (ASEAN. 2020. *Dampak Ekonomi Dari Pandemi COVID-19 Di ASEAN*, Ringkasan Kebijakan ASEAN. https://asean.org/storage/2020/04/ASEAN-Policy-Brief-April-2020_FINAL.pdf).

Dalam upaya untuk menghentikan penyebaran pandemi, dengan semua implikasinya terhadap kesehatan masyarakat, banyak negara telah mengadopsi langkah-langkah untuk membatasi pergerakan warganya, memaksa mereka untuk tinggal di rumah mereka. Hal ini pasti berdampak pada produksi barang dan jasa dan konsumsi (terutama dari rumah-tangga tetapi juga dari perusahaan), dengan kedua agregat ekonomi tersebut menurunkan nilainya, membawa ketidakstabilan di bursa saham dunia dan bursa saham pasar lain (contohnya, bahan-bakar).

COVID-19 bisa berdampak pada ekonomi dunia terutama dalam tiga cara:

- Berdampak secara langsung pada produksi, khususnya (tetapi tidak secara eksklusif) karena, penerapan karantina warga untuk menghentikan penyebaran penyakit;
- Melalui putusannya rantai pasokan dan pasar (terutama perdagangan dunia dengan penurunan tajam dalam ekspor dan produksi yang dapat diekspor); dan
- Melalui dampak langsung pada perusahaan dan pasar keuangan. Intensitas dampak juga sangat tergantung pada tindakan yang diambil oleh negara, serta reaksi penduduk terhadap keberadaan pandemi dan konsekuensinya.

Faktanya, pandemi ini, yang pada awalnya merupakan masalah kesehatan masyarakat, sudah berdampak besar pada perekonomian dunia, baik dari sisi penawaran – pengurangan / penghentian kegiatan perusahaan, dengan jatuhnya produksi dan persediaan barang dan jasa, serta berdampak pada pekerjaan dan pada jam kerja – maupun dari sisi permintaan – pendapatan keluarga yang menurun (karena pengangguran atau pengurangan jam kerja atau sebagai akibat dari langkah-langkah penerapan jarak sosial dan karantina wajib untuk menahan penyebaran penyakit), dan akibat penurunan konsumsi. Kontraksi penawaran dan permintaan secara agregat mempunyai hubungan sebab dan akibat satu sama lain.

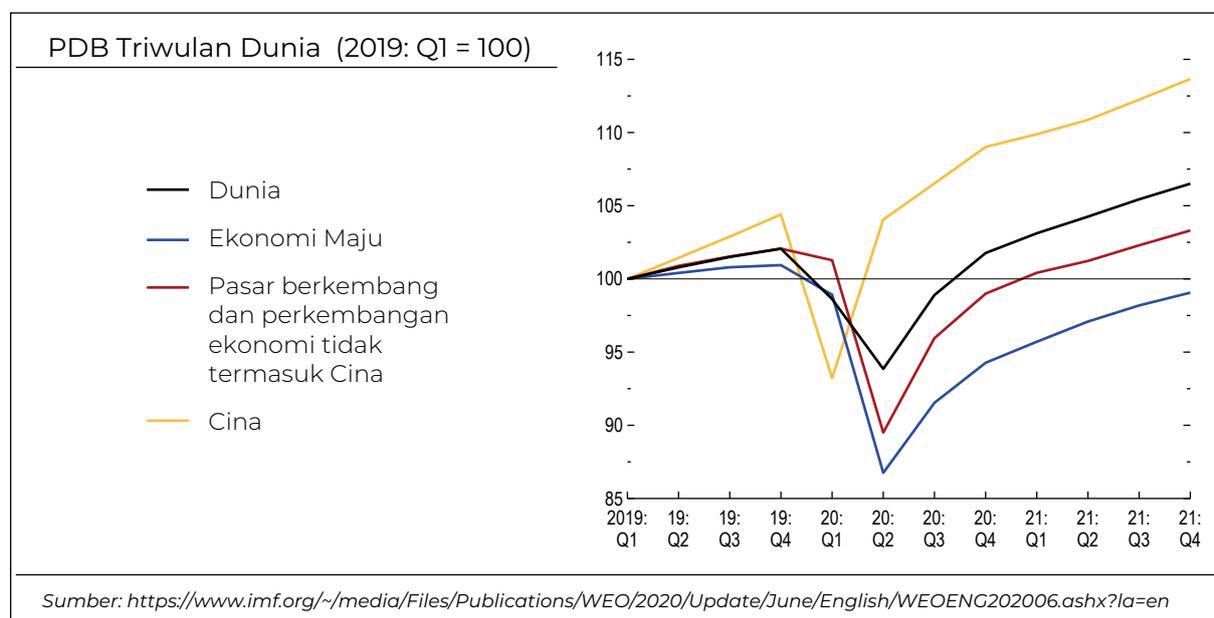
Dalam praktiknya, langkah-langkah yang diambil untuk karantina wajib dan penerapan jarak sosial, yang diperlukan untuk menahan penyebaran COVID-19, mengakibatkan kontraksi dalam pasokan barang dan jasa, dengan penurunan produksi, yang menyebabkan pengurangan jam kerja dan pengangguran bagi ribuan orang di seluruh dunia, yang berdampak pada berkurangnya pendapatan keluarga. Hal ini, pada gilirannya, juga

menyebabkan kontraksi dalam permintaan, konsumsi, karena orang memiliki pendapatan yang lebih sedikit yang dapat dibelanjakan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh penurunan konsumsi dan produksi secara bersamaan.

Perkiraan terbaru tentang dampak produksi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Perkiraan evolusi PDB pada tahun 2020 (%):	
Ekonomi Maju	-8
Kawasan-Euro	-10,2
ASEAN-5	-2
Negara ekonomi baru dan berkembang di Asia	-0,8
Dunia	-4,9

Sumber: FMI World Economic Report Update, June 2020.
<https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2020/Update/June/English/WEOENG202006.ashx?la=en>



Perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk negara-negara ekonomi baru dan negara-negara berkembang di Asia saat ini -0,8% dan mencerminkan perlambatan ekonomi yang sangat signifikan, diikuti dengan pemulihan sebesar + 7,4% pada tahun 2021 - terutama berkat + 8,2% dari Cina dan 6,2% dari ASEAN5, sebagaimana ditunjukkan juga pada tabel di bawah ini yang diambil dari World Economic Outlook Update edisi Juni / 20 dari DMI.

Konfigurasi kurva evolusi PDB yang diperkirakan seperti pada grafik di atas mengingatkan pada huruf V. Ini adalah salah satu konfigurasi yang mungkin dari kurva ini yang berarti pemulihan, pada tahun berikutnya setelah krisis, sebagian besar (jika bukan keseluruhan) jeda produksi. Faktanya, + 5,4% setelah -4,9% dari perkiraan dunia berarti bahwa nilai PDB pada tahun 2021 akan sedikit lebih tinggi dari pada tahun 2019, nilai sebelum krisis.

Para ahli ekonomi, saat menganalisa pengalaman masa lalu lainnya, mampu mengidentifikasi profil lain, yaitu sebuah kurva berbentuk U - krisis dengan durasi yang lebih lama (2-3 tahun) dibandingkan dengan krisis berbentuk V dan berbentuk L - dengan penurunan tajam dalam PDB dan pemulihan yang lebih lama dalam hal waktu (3-5 tahun). Versi lain untuk krisis COVID-19 ini adalah kurva berbentuk W - mungkin dengan penurunan kedua lebih kecil dari yang pertama - dalam hal ini, munculnya "gelombang" kedua virus ini selama musim dingin antara 2020 dan 2021, seperti kemungkinan yang kebanyakan orang percaya.

Gambaran dari Proyeksi Prospek Ekonomi Dunia
(Percent change, unless noted otherwise)

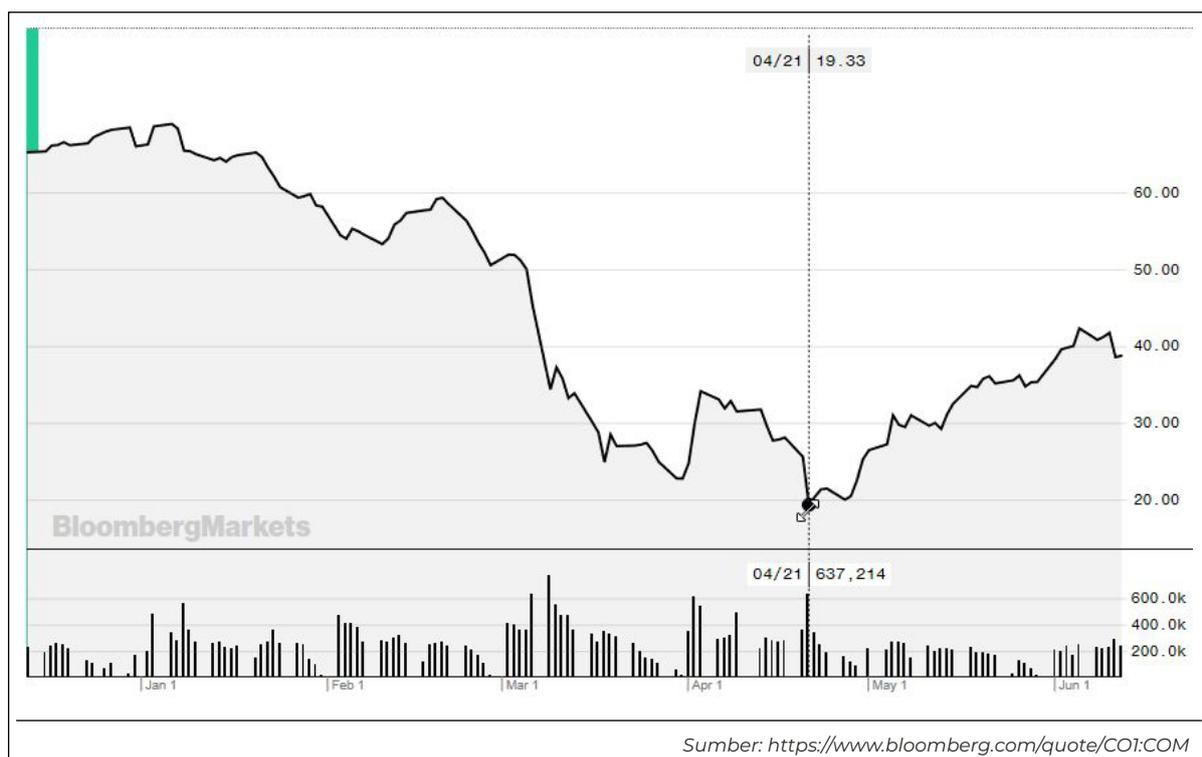
	Dari tahun ke tahun						Q4 selama Q4		
			Proyeksi		Perbedaan dari bulan april 2020		Proyeksi		
	2019	2020	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2022
Amerika Serikat	2.9	2.3	-8.0	4.5	-2.1	-0.2	2.3	-8.2	5.4
Kawasan Euro	1.9	1.3	-10.2	6.0	-2.7	1.3	1.0	-8.6	5.8
Jerman	1.5	0.6	-7.8	5.4	-0.8	0.2	0.4	-6.7	5.5
Perancis	1.8	1.5	-12.5	7.3	-5.3	2.8	0.9	-8.9	4.2
Italia	0.8	0.3	-12.8	6.3	-3.7	1.5	0.1	-10.9	5.5
Spanyol	2.4	2.0	-12.8	6.3	-4.8	2.0	1.8	-11.4	6.3
Jepang	0.3	0.7	-5.8	2.4	-0.6	-0.6	-0.7	-1.8	0.0
Britania Raya	1.3	1.4	-10.2	6.3	-3.7	2.3	1.1	-9.0	6.9
Kanada	2.0	1.7	-8.4	4.9	-2.2	0.7	1.5	-7.5	4.6
Perkembangan ekonomi lainnya	2.7	1.7	-4.8	4.2	-0.2	-0.3	1.9	-5.1	5.5
Negara-negara emerging dan berkembang di Asia	6.3	5.5	-0.8	7.4	-1.8	-1.1	5.0	2.4	3.9
Cina	6.7	6.1	1.0	8.2	-0.2	-1.0	6.0	4.4	4.3
India	6.1	4.2	-4.5	6.0	-6.4	-1.4	3.1	0.2	1.2
ASEAN-5	5.3	4.9	-2.0	6.2	-1.4	-1.6	4.6	-1.4	6.1

Sumber: <https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2020/Update/June/English/WEOENG202006.ashx?la=en>

Bentuk akhir kurva, setelah damati, akan tergantung pada banyak faktor, yaitu kebijakan ekonomi yang diterapkan untuk menghadapi krisis.

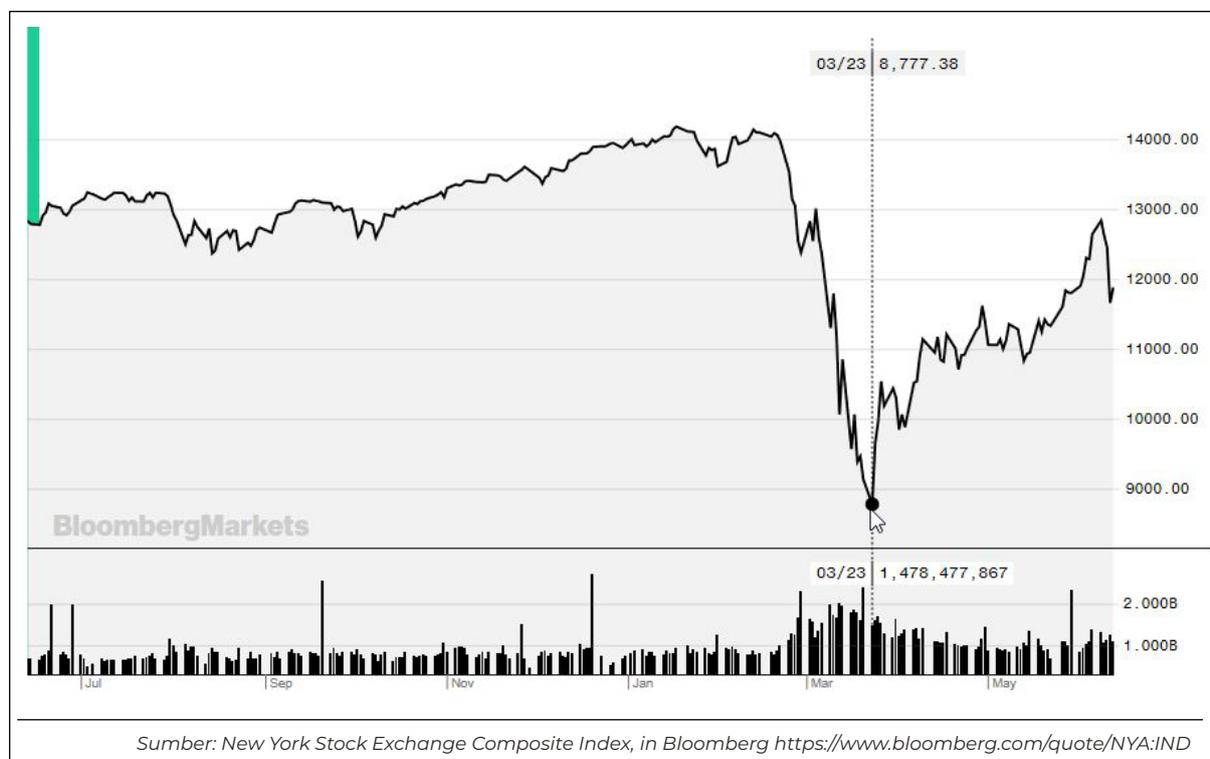
Untuk Timor-Leste, kebijakan ekonomi dan sosial yang disarankan dalam dokumen ini bertujuan untuk melakukan apa yang ditakuti sebagai putar balik U dalam belokan V - atau U sesingkat mungkin.

Turunnya produksi tercermin dalam evolusi harga bahan baku internasional, yaitu minyak, seperti yang ditunjukkan pada grafik di bawah untuk semester pertama tahun 2020.



Sumber: <https://www.bloomberg.com/quote/CO1:COM>

Tetapi dampak terbesar tampaknya berada di pasar keuangan internasional. Grafik di bawah ini menggambarkan perilaku indeks komposit Bursa Efek New York pada waktu lalu (sejak Juli /19). Hal ini terbukti dengan penurunan tajam harga selama bulan Maret / 2020 dengan minimum “bersejarah” dalam 23 bulan. Sejak tanggal tersebut, meski dalam bentuk yang tidak stabil, telah terjadi pemulihan nilai indeks pasar saham.



Perlu dicatat bahwa, untuk Timor-Leste, evolusi bursa saham internasional ini (dalam hal ini Bursa Efek New York) diterjemahkan ke dalam penurunan yang signifikan dalam nilai modal dari Dana Minyak Timor-Leste selama kuartal pertama tahun 2020 seperti yang dilaporkan dalam laporan dari kuartal pertama tahun ini yang diterbitkan oleh Bank Sentral Timor-Leste.

Akun modal	\$'000
Nilai pembukaan buku (01 januari 2020)	17,691,816
Penerimaan selama periode tersebut	181,111
Transfer ke Anggaran Negara	0
Pengembalian investasi	-843,994
Nilai penutupan buku (31 maret 2020)	17,028,934

Sumber: https://www.bancocentral.tl/uploads/documentos/documento_1588566307_9544.pdf

Namun demikian, sebagian besar kerugian yang dilaporkan selama triwulan ini, pada akhir April lalu (https://www.bancocentral.tl/uploads/documentos/document_1591146449_2479.pdf), telah dipulihkan (peningkatan modal Dana Minyak selama bulan tersebut April / 20 dari hampir 600 juta USD, yang telah meningkat pesat sejak saat itu).

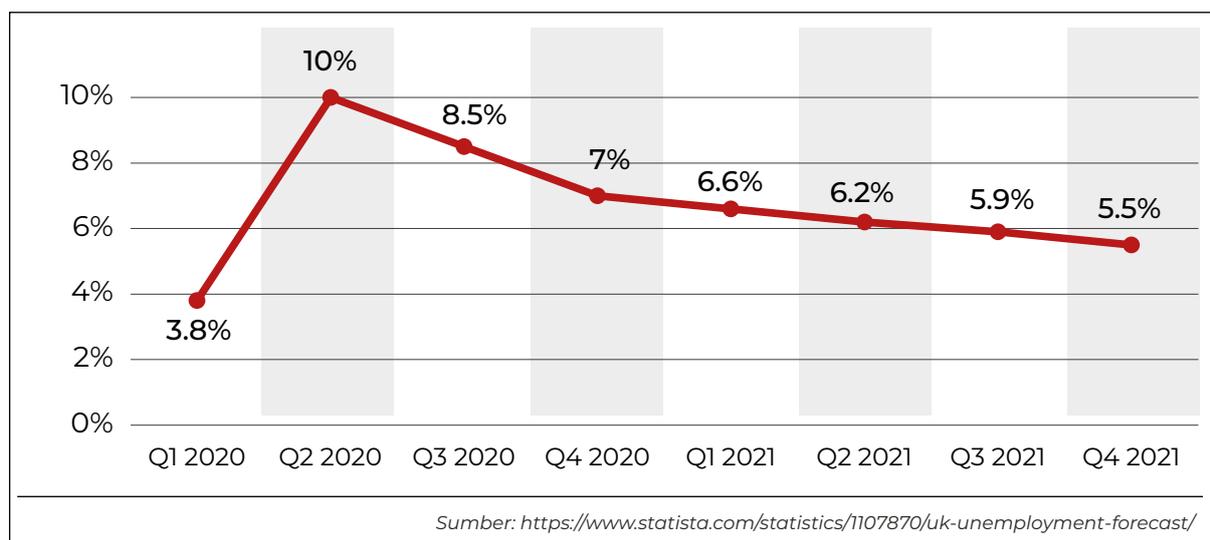
Selain produksi, pandemi ini terutama berdampak pada **pekerjaan** - peningkatan tajam dalam tingkat pengangguran di negara-negara paling maju - dan dalam pendapatan masyarakat.

MODAL

Saldo awal di bulan sebelumnya	17 028 934
Pergerakan modal selama bulan tersebut	-126 192
Hasil bersih untuk bulan ini	697 834
TOTAL MODAL NET	17 600 576

Source: https://www.bancocentral.tl/uploads/documentos/documento_1591146449_2479.pdf

Tingkat pengangguran di Inggris, negara yang menerima paling banyak imigran dari Timor-Leste dan kemungkinan akan merasakan efek dari evolusi ini, akan menyebabkan sebagian dari imigran ini kembali ke negara kita dan memberi tekanan yang meningkat pada pasar tenaga kerja kita, telah berkembang seperti yang terlihat di grafik berikut - yang juga menggambarkan ekspektasi saat ini tentang evolusi tingkat tersebut hingga akhir tahun 2021, yang akan tetap di atas tingkat sebelum krisis (kuartal pertama tahun 2020): Tingkat pengangguran di Inggris: Q1 2020 = 3,8%; Q2 2020 = 10%; Q3 2020 = 8,5%; Q4 2020 = 7%; Q1 2021 = 6,6%; Q2 2021 = 6,2%; Q3 2021 = 5,9%; Q4 2021 = 5,5%.



Kemungkinan kepulangan warga negara yang bermigrasi di Inggris ke Timor-Leste juga akan memiliki dampak ekonomi lain yang relevan: hilangnya pengiriman uang yang, setiap tahun, masuk ke Timor-Leste dan membantu perekonomian keluarga mereka.

Evolusi ekonomi internasional pada tahun 2019, 2020 dan 2021 (data dari Dana Moneter Internasional, DMI adalah sebagai berikut:

Evolusi PDB dunia: 2019 = + 2,9%; 2020 = -4,9%; 2021 = +5,4%

Harga minyak Brent per barel: 2019 = 64 USD / barel; 2020 = USD 36,9 / barel; 2021 = 39,5 USD / barel

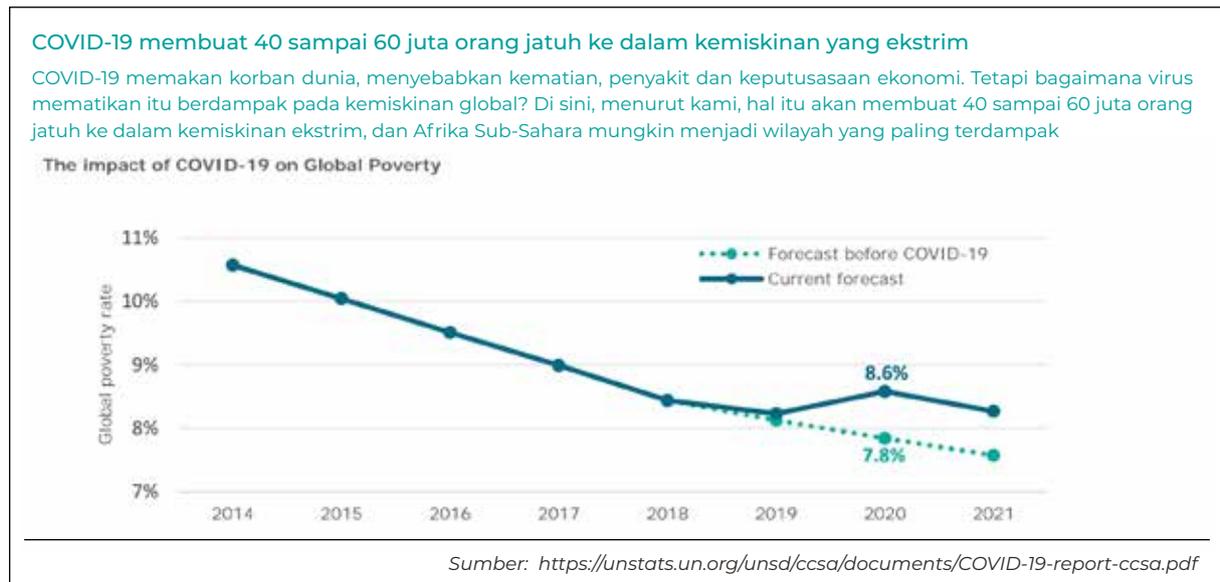
Tingkat pengangguran zona Euro: 2019 = 7,6%; 2020 = 10,4%; 2021 = 8,9%

Tingkat pengangguran di Inggris (Britania Raya): Q1 2020 = 3,8%; Q2 2020 = 10%; Q1 2021 = 6,6%; Q4 2021 = 5,5%

Sumber: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020> dan https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD

Sebagaimana yang dapat dilihat, dampak dari COVID-19 pada perekonomian dunia cukup besar (perkiraan tingkat pertumbuhan untuk tahun 2020 sebesar -4,9%), dengan fokus utama pada kuartal pertama dan kedua tahun 2020. Dampak terbesar adalah pada produksi dan (tidak ada) pekerjaan, dengan pemulihan perlahan-lahan baik di Uni Eropa dan Inggris (Inggris Raya).

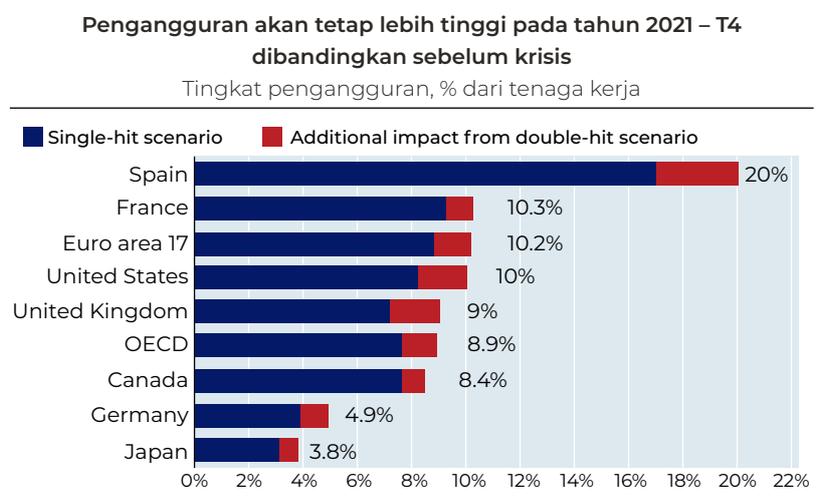
Perkiraanannya adalah bahwa efek ini terhadap lapangan kerja berdampak pada pendapatan dan, akibatnya, pada tingkat kemiskinan dan kesenjangan dalam distribusi pendapatan, yang diperburuk dengan peningkatan jumlah individu dalam kemiskinan absolut.



IMF memperkirakan bahwa, jika dampak krisis besar dan cepat, pemulihannya juga akan seperti itu, dengan asumsi bahwa “dasar-dasar” ekonomi internasional secara relatif masih utuh, sehingga memudahkan pemulihan.

Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OCDE), organisasi internasional yang menghimpun sebagian besar negara yang lebih maju, memiliki perkiraan yang lebih pesimis untuk waktu dekat, dengan pengangguran tetap tinggi hingga 2022, setidaknya, dan produksi mulai pulih dengan lambat – yaitu karena kesulitan dalam pemulihan perdagangan internasional (yang akan membatasi produksi untuk ekspor) dan pemulihan sektor pariwisata dan penerbangan internasional. Kesulitan dalam pemulihan ekonomi mungkin lebih besar jika, seperti yang dikhawatirkan banyak orang, gelombang kedua pandemi dikonfirmasi akan berlangsung selama musim Gugur/musim Dingin tahun 2020.

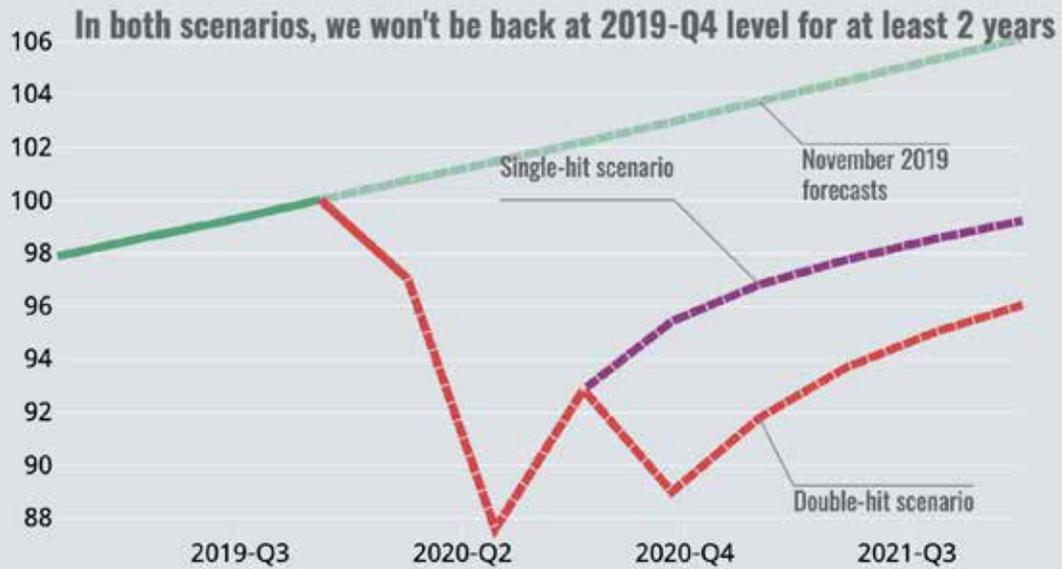
Fenomena ini bisa tercermin negatif pada penerbangan internasional ke negara kita dan sebaliknya.



Sumber: <http://www.oecd.org/economic-outlook/june-2020/>

A collapse in output followed by a slow recovery

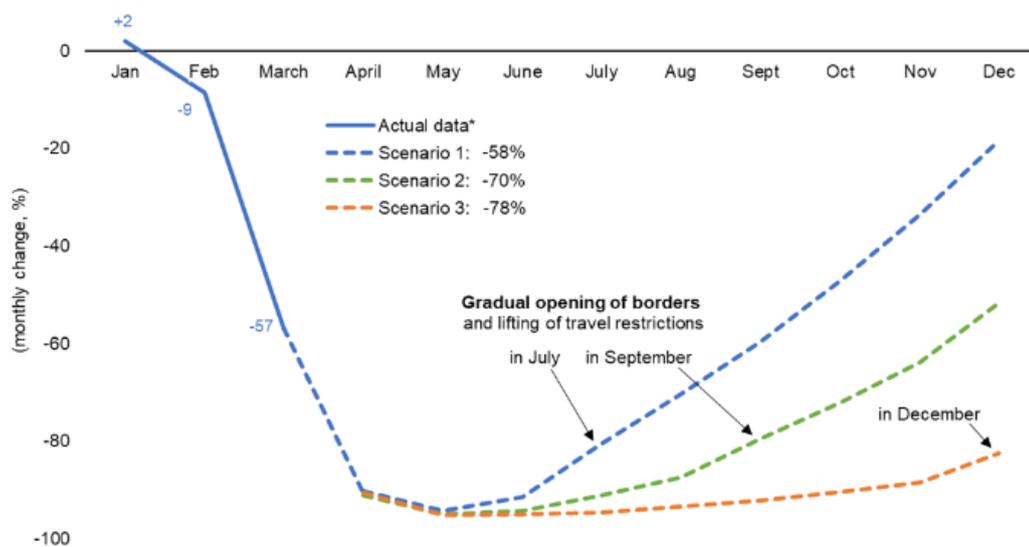
World GDP, index 2019-Q4=100



Source: OECD (2020), "OECD Economic Outlook No. 107 (Edition 2020/1)", OECD Economic Outlook: Statistics and Projections (database).

Sumber: <http://www.oecd.org/economic-outlook/june-2020/>

International tourist arrivals in 2020: three scenarios (YoY monthly change, %)



Sumber: <https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19>

Karena merupakan masalah kesehatan masyarakat, dan karena pengaruhnya terhadap ekonomi dan masyarakat, pandemi yang disebabkan oleh COVID-19 memicu “krisis pembangunan manusia”, seperti yang dijelaskan oleh United Nation Development Program (UNDP):

“krisis inia sangat mempengaruhi semua elemen yang membentuk Pembangunan Manusia: pendapatan (dengan kontraksi terbesar dari aktivitas ekonomi sejak Depresi besar [1929]), kesehatan (secara langsung menyebabkan lebih dari 300.000 kematian dan secara tidak langsung berpotensi menyebabkan lebih dari 6.000 kematian pada anak-anak, setiap hari, untuk penyebab yang dapat dicegah, selama 6 bulan kedepan) dan pendidikan (diharapkan bahwa tingkat partisipasi yang efektif di sekolah, yaitu, menghitung anak-anak dengan ketidaktunggalan untuk mengakses internet – di pendidikan dasar turun menjadi tingkat sebenarnya dari pertengahan tahun 80-an)”. (UNDP. 2020. Human Development Perspectives – COVID-19 and Human Development: Assessing the Crisis, Envisioning the Recovery. New York.)

Timor-Leste, khususnya karena dimensi ekonominya, relatif terisolasi dari kontak dengan ekonomi internasional dan evolusinya. Oleh sebab itu, dampaknya terhadap perekonomian negara memiliki sedikit saluran transmisi – yang tidak berarti bahwa dampaknya kecil.

Saluran-saluran utamanya adalah seperti berikut ini, secara umum dan tahun 2020 khususnya (urutan di bawah ini bersifat acak, oleh karena itu bukan merupakan tanda pengaruh relatifnya):

- Pengaruh (negatif) dari evolusi indeks Bursa Efek terhadap pendapatan Dana Perminyakan;
- Pengaruh (negatif) dari evolusi harga minyak mentah (dan gas) (*Brent*) di pasar internasional – pengaruh pada nilai pendapatan dari eksplorasi Laut Timor dan pada potensi profitabilitas proyek yang direncanakan untuk proyek Tasi Mane (setidaknya pada tahun-tahun mendatang);
- Pengaruh (negatif) penurunan pekerjaan di negara-negara ekonomi utama (khususnya Inggris) terhadap emigrasi orang timor;
- Pengaruh (negatif) dari Brexit pada emigrasi orang timor ke Inggris;
- Pengaruh (negatif) terhadap penurunan arus penumpang internasional, yaitu arus wisatawan ke Timor-Leste.

Sayangnya, tidak satupun dari pengaruh ini dapat dihitung karena tingkat ketidakpastian yang tinggi yang masih membayangi evolusi ekonomi internasional, atau karena ketidakcukupan sistem statistik nasional – yang karenanya harus diperbaiki, terutama dalam kaitannya dengan produksi (indikator triwulan yang dapat diandalkan) dan pada pekerjaan (dimana investasi diperlukan, yaitu dalam mendorong pendaftaran pengangguran yang mencari pekerjaan).

1.2 DIAGNOSIS SITUASI EKONOMI DAN SOSIAL DI TIMOR-LESTE DAN DAMPAK DARI COVID-19

1.2.1 KONTEKS EKONOMI DAN SOSIAL PRA-COVID-19

Kebijakan ekonomi (dan sosial) yang digariskan untuk Rencana Pemulihan Ekonomi pasca COVID-19 ini didasarkan pada “diagnosis situasi”, yang dilakukan dengan menggunakan informasi kuantitatif (statistik) dan kualitatif tentang negara ini. Tidaklah mudah untuk membuat diagnosis yang tepat karena kelemahan sistem statistik nasional, walaupun harus diakui bahwa pelayanan statistik membuat banyak kemajuan, misalnya, di bidang Neraca Nasional (produksi, perdagangan internasional, dsb).

Ketidakcukupan statistik sangat besar dalam kaitannya dengan data “jangka pendek” yang memungkinkan, jika terjadi krisis siklus seperti COVID-19, memperbaharui informasi dengan cepat untuk mengidentifikasi dan mengukur masalah utama dan, untuk membantu dalam mendefinisikan tindakan untuk mengatasinya. Ini adalah bidang yang perlu (lebih) ditingkatkan dalam jangka pendek hingga menengah. Tanpa “diagnosis” yang baik tentang situasi tersebut, menjadi sulit untuk menentukan kebijakan ekonomi yang sesuai. Hal ini terbukti dengan sangat jelas dalam situasi saat ini, yang mempertanyakan hampir semua yang diketahui tentang situasi ekonomi dan sosial negara hingga paruh kedua tahun ini.

Yang bermasalah adalah data tentang produksi (dan variasi jangka pendeknya), lapangan kerja dan pasar tenaga kerja, serta pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Ini adalah bidang-bidang yang perlu ditingkatkan dalam jangka pendek atau, dalam kasus “terburuk”, dalam jangka menengah.

Dengan demikian, “diagnosis” tentang situasi tidak hanya menggunakan data statistik yang tersedia dan dapat diandalkan (sedikit), tetapi juga informasi kualitatif yang bersifat variabel yang, walau demikian, kedua-duanya, bisa menjadi dasar untuk mendefinisikan langkah-langkah untuk mengatasi situasi ekonomi dan sosial saat ini.

Apa yang dipaparkan berikut ini didasarkan pada informasi statistik (kuantitatif) dan kualitatif yang tersedia, baik sebelum maupun sesudah pandemi yang disebabkan oleh COVID-19 dan dampaknya terhadap Timor-Leste.

Ekonomi Subsisten dalam Transisi Lambat

Bisa kita katakan dengan yakin bahwa sampai akhir 2019, ekonomi Timor-Leste paling tepat digambarkan sebagai ekonomi yang berada dalam keadaan transisi yang lambat dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar. Walaupun telah terjadi pertumbuhan di sektor swasta, namun data terbaru (Sensus Pertanian 2019) menunjukkan bahwa 66% penduduknya masih berstatus sebagai petani subsisten, sehingga dapat dikatakan transisi ini masih dalam tahap awal. Dari data statistik dapat dipastikan bahwa terdapat tanda-tanda perlambatan transisi dari pertanian, dalam hal penurunan jumlah keluarga yang bergantung pada pertanian sebagai sumber pendapatan utama, dari 76% pada 2010 menjadi 66% pada 2019.

Dari Sensus 2015 tentang praktik yang digunakan oleh petani kita, tampaknya hanya sebagian kecil dari mereka yang menggunakan teknik “modern” untuk meningkatkan produktivitas; misalnya, 8% yang menggunakan penutup; 15% menggunakan varietas benih berkualitas baik; 10% menggunakan pupuk organik atau kimia; 20% menggunakan traktor manual atau traktor roda empat dan 8% menggunakan sistem irigasi. Dari segi luas lahan, 66% keluarga petani memiliki lahan kurang dari 1 hektar dan 98% memiliki lahan pertanian kurang dari 5 hektar. Faktanya, sektor pertanian masih tetap menjadi perekonomian subsisten dengan sarana sederhana dan berbasis keluarga. Situasi saat ini tampaknya tidak berubah secara substansial.

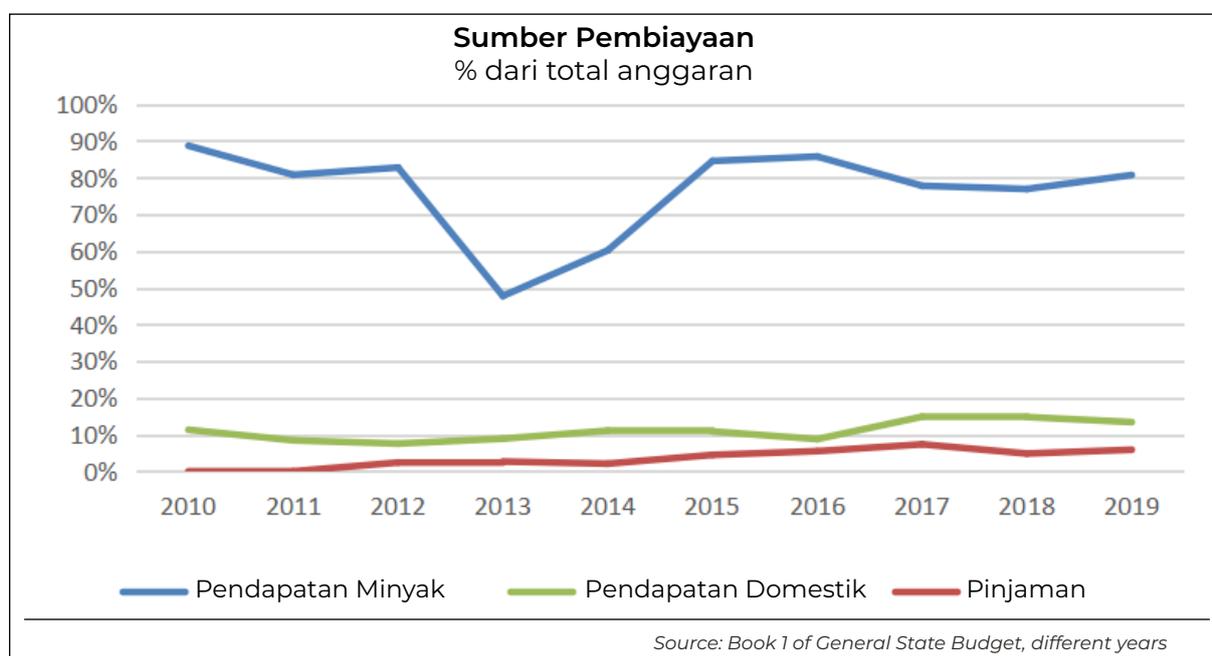
Keterlambatan transisi ini sendiri menciptakan lingkungan yang kompleks untuk pembuatan kebijakan, karena berbagai sektor ekonomi dalam transisi memiliki kebutuhan yang sangat berbeda. Misalnya, jenis bantuan dan prasarana dasar yang dibutuhkan keluarga petani subsisten sangat berbeda dengan jenis bantuan dan prasarana yang dibutuhkan untuk mengembangkan perusahaan minuman.

Bahkan, beberapa upaya telah dilakukan selama lebih dari satu dekade untuk (kembali) membangun sektor primer/dasar dan meningkatkan produktivitas, tetapi sampai saat ini, kemajuan sangat lambat. Timor-Leste memiliki sedikit penghasilan sedikit dari tanahnya dan dari tenaga kerja yang dimilikinya, tetapi mengkonsumsi banyak karena pilihan yang didapatkan dengan cara mudah, menggunakan dana dari Dana Migas untuk konsumsi keuangan. Perilaku ini bertentangan dengan prinsip makroekonomi yang paling dasar, yaitu,

negara yang alih-alih memperluas dan mengembangkan kapasitas produksinya, justru mengkonsumsi lebih dari apa yang dihasilkannya, yang mungkin terbukti tidak berkelanjutan dalam waktu dekat. Dengan perilaku ini, negara akan mengalami pertumbuhan sedikit saja dan tidak berkelanjutan, dan karenanya harus selalu bergantung pada sumber pembiayaan lain, baik untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahunan, maupun untuk produksi.

Ketergantungan pada Pendapatan dari Minyak

Dengan tidak adanya ekonomi yang terdiversifikasi dan kapasitas produksi yang terbatas, Dana Minyak telah menjadi sumber utama pembiayaan untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan produksi selama lebih dari satu dasawarsa, seperti yang ditunjukkan pada grafik di bawah ini. Timor-Leste sebenarnya adalah salah satu dari sedikit negara yang sangat bergantung pada cadangan minyak di Laut Timor.



Pengalaman internasional menunjukkan bahwa di banyak negara ekonomi baru biasanya sangat bergantung pada bantuan luar negeri atau pendapatan dari eksploitasi sumber daya alam mereka untuk beberapa waktu, terutama karena ekonomi mereka tidak terdiversifikasi dan tidak maju, produktivitas rendah dan basis pajaknya terbatas. Namun, perlu diingat bahwa tantangan besar ke depan adalah bahwa negara-negara tersebut melihat penawaran sumber daya alam semakin menurun dari tahun ke tahun, baik karena penurunan harga komoditas maupun karena penurunan volume produksi. Dalam kasus Timor-Leste, pendapatan produksi minyak telah menurun dalam beberapa tahun terakhir terutama karena volume produksi serta penurunan harga minyak.

Agar Timor-Leste dapat terus tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan, perlu ditemukan cara yang lebih banyak dan lebih baik untuk memperkuat kapasitas produksinya dan mendiversifikasi ekonomi selain sektor minyak. Pengalaman internasional juga menunjukkan bahwa negara-negara yang kaya akan sumber daya alam seharusnya sudah berkinerja lebih baik, dibandingkan dengan negara-negara yang tidak menikmati sumber daya yang sama, jika sebagian besar pendapatan dari eksploitasi sumber daya tersebut telah diinvestasikan dalam pembentukan modal manusia, dalam infrastruktur untuk dukungan sektor produktif dan penciptaan insentif bagi perusahaan nasional atau asing, menuju pembangunan ekonomi dan sosial serta modernisasi perekonomian.

Untuk Timor-Leste, pesannya sederhana: kita tidak boleh terlalu berharap pada sumber daya alam kita dan lebih percaya pada apa yang dapat kita hasilkan dengan keringat, kreativitas dan imajinasi kita sendiri, yang berarti lebih banyak sumber daya untuk pariwisata, pertanian dan manufaktur. Agar sektor-sektor ini menjadi cukup kuat dan menjadi sumber pendapatan alternatif di masa depan, Pemerintah perlu memiliki ambisi di bidang ekonomi, yang berdampak pada investasi yang memadai untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang, sehingga memungkinkan peningkatan pekerjaan dan upah yang layak dipertahankan.

Mendefinisikan Kebijakan dan Prioritas Ekonomi

Seperti pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, Program Pemerintahan Konstitusi VIII berfokus pada pembangunan empat sektor utama: pertanian, pariwisata, perminyakan, dan manufaktur. Pemerintah VIII memandang keberadaan infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia, struktur hukum dan kelembagaan yang efisien sebagai “prasyarat” utama untuk kemajuan di sektor-sektor tersebut.

Sejauh ini, telah ada investasi yang besar untuk mengembangkan sektor minyak dan infrastruktur dasar (jalan, listrik, bandara, dll) yang berpotensi berfungsi untuk mendukung pengembangan sektor-sektor lainnya. Tetapi pada saat yang sama, sektor pertanian, pariwisata dan manufaktur kurang mendapat perhatian dalam dekade terakhir.

APBN tahunan dengan jelas menunjukkan bahwa struktur pengeluaran di bidang-bidang utama seperti kesehatan dan pendidikan - yang begitu penting untuk mendukung masyarakat agar lebih terlibat dalam kegiatan ekonomi - juga telah menurun dalam tujuh tahun terakhir. Demikian juga, investasi di sektor-sektor penting seperti pertanian dan pariwisata, perdagangan dan industri juga tidak mendapat perhatian yang memadai.

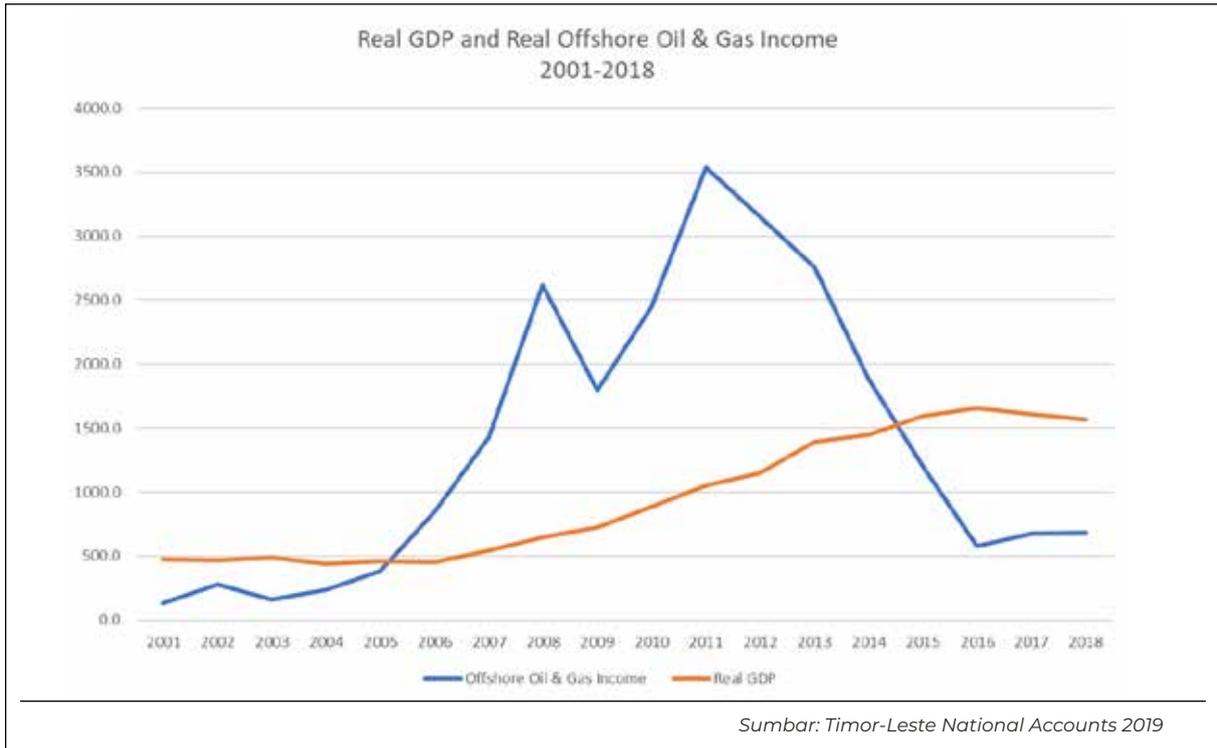
Pertumbuhan, Pembangunan Manusia dan Kemiskinan

Sementara Neraca Nasional menunjukkan pertumbuhan rata-rata di atas 5% antara tahun 2007 sampai dengan 2017, hanya ada sedikit bukti pertumbuhan kapasitas produktif dari ekonomi domestik. Seperti telah disebutkan, sektor pertanian tetap menjadi sumber pendapatan utama dari dua pertiga penduduk dan praktis tidak ada pertumbuhan yang signifikan di sektor tersebut.

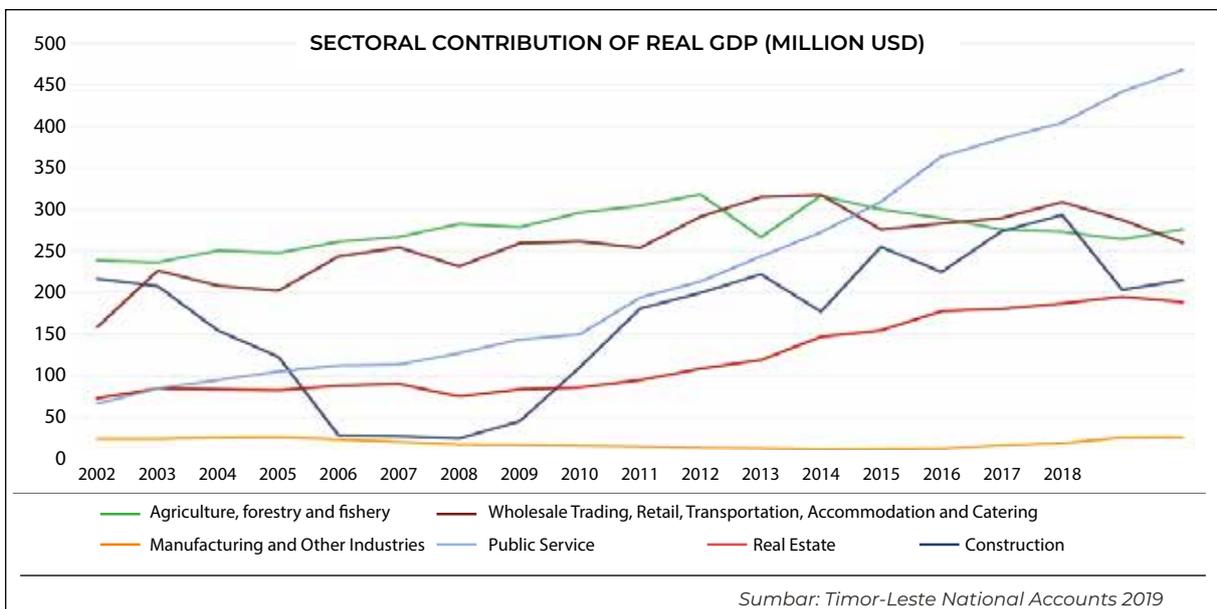
Migrasi penduduk dari daerah pedesaan ke kota terjadi secara terus menerus; meskipun demikian, urbanisasi tidak secepat bila dibandingkan dengan standar internasional. Tetapi, ada kecenderungan akan peningkatan pada penduduk usia kerja muda, namun tingkat dan sifat pertumbuhan ekonomi di sektor non-pertanian tidak memiliki kapasitas untuk menciptakan lapangan kerja yang cukup bagi pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja. Tingginya persentase pengangguran dan semi pengangguran di kalangan kaum muda dan dewasa muda merupakan gejala nyata dari realitas ekonomi ini.

Akan tetapi, walaupun sudah ada pertumbuhan, dampak pada pengurangan kemiskinan tergantung pada sifat dari pertumbuhan tersebut. Seandainya pertumbuhan terjadi pada sektor-sektor ekonomi yang orang-orangnya sangat miskin, misalnya dengan meningkatkan pendapatan untuk banyak petani kecil, sifat pertumbuhan itu bersifat “inklusif”, karena diarahkan pada pengurangan kemiskinan. Di sisi lain, jika pertumbuhan terjadi terutama melalui pembangunan pabrik yang menggunakan teknologi tinggi dan yang menyerap sedikit tenaga kerja, terutama pekerja yang berkualifikasi tinggi, kemungkinan besar jenis pertumbuhan ini hanya akan menguntungkan sebagian kecil penduduk, bagi mereka yang merasa paling berkualitas dan mereka yang memiliki standar hidupnya tinggi. Pertumbuhan ekonomi seperti ini tentunya tidak dianggap “inklusif”.

PDB riil tumbuh secara konstan selama 10 tahun sejak tahun 2007, yang menunjukkan peningkatan produksi nonminyak. Walau demikian, pertumbuhan tersebut tidak terjadi pada sektor produktif seperti di pertanian, manufaktur atau pariwisata. Sebaliknya, sebagian besar pertumbuhan PDB didorong oleh belanja negara yang pembiayaannya melalui transfer uang dari Dana Minyak. Meskipun pengeluaran negara telah memungkinkan uang beredar dalam perekonomian melalui infrastruktur dan penyediaan pekerjaan di Administrasi Negara, jenis penciptaan lapangan kerja ini mungkin tidak berkelanjutan, karena bergantung pada pendapatan minyak. Sifat pertumbuhan juga tidak lagi inklusif, karena hanya mempengaruhi sebagian kecil masyarakat dan, terutama, penduduk kelas menengah perkotaan.

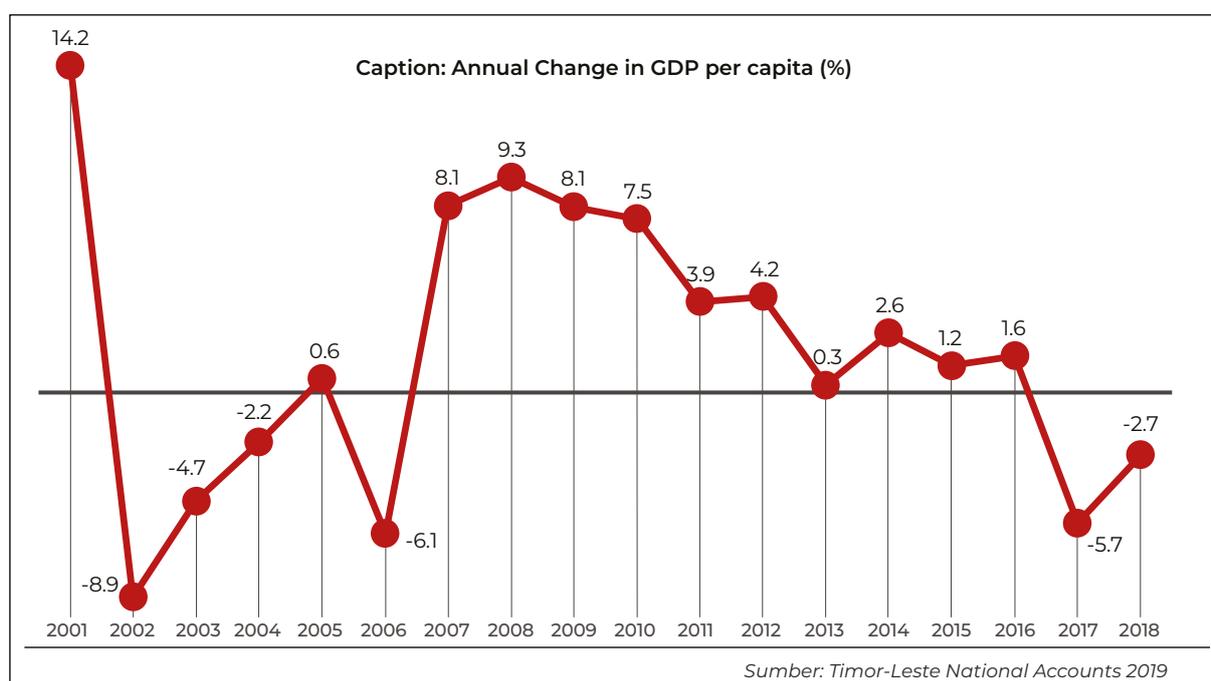


Grafik di bawah ini menunjukkan distribusi PDB berdasarkan sektor utama.



Terlihat bahwa ada stagnasi total manufaktur selama periode tersebut dan pertumbuhan pertanian yang sangat lambat hingga tahun 2010, dengan penurunan yang tetap sejak tahun 2012. Di sisi lain, sektor yang tumbuh pesat adalah yang terkait terutama dengan Administrasi Negara dengan peningkatan lebih dari 400 juta USD secara nyata. Pertumbuhan pesat dalam konstruksi sebagian besar didorong oleh kontrak negara dan kebanyakan dari pertumbuhan dalam perdagangan grosir dan eceran yang juga terkait dengan kegiatan Pemerintah.

Untuk PDB riil perkapita, "produksi per orang" dalam perekonomian, seperti yang ditunjukkan pada grafik berikut ini, sebenarnya lebih rendah dari pada tahun 2012 dan sekitar 8% lebih rendah dari puncaknya pada tahun 2016. Meskipun pertumbuhan cukup wajar pada periode 2007 hingga 2016, tingkat pertumbuhan tahunan PDB riil perkapita, rata-rata, kurang dari 1% per tahun sejak 2002.



Pertumbuhan yang hampir stagnan dari PDB riil per kapita memilikinya konsekuensinya. Pada tahun 2018, Timor-Leste berada di peringkat 131 (di antara 189 negara) dalam indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan rata-rata pembangunan manusia yang lebih tinggi pada laki-laki (IPM laki-laki lebih tinggi dari IPM perempuan), terutama dalam hal pendapatan nasional bruto per kapita. Meskipun (hampir) mempertahankan nilai IPM, dalam beberapa tahun terakhir (2016 hingga 2018) – di mana pendapatan nasional bruto, termasuk pendapatan minyak, diperhitungkan – Neraca Nasional menunjukkan penurunan PDB non-minyak, pada periode yang sama adalah: -3,8% pada tahun 2017 dan -0,8 pada 2018¹. Namun, menurut perkiraan Bank Sentral Timor-Leste (BCTL) baru-baru ini, pada tahun 2019, ekonomi akan pulih, dengan tingkat pertumbuhan PDB 4,6%², setelah dua tahun berturut-turut dalam resesi.

Konsumsi (negara dan swasta), sejauh ini merupakan faktor utama dalam PDB nasional. Pada tahun 2017 dan 2018, karena kendala yang berkaitan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), konsumsi swasta bahkan lebih tinggi daripada konsumsi negara, baik secara absolut maupun pertumbuhan: pada tahun 2018, konsumsi rumah-tangga tumbuh 2,2%, sedangkan konsumsi pemerintah menurun-1%³. Investasi (hampir semuanya

¹ 2015 Nilai pada harga konstan: tahun dasar = 2015

² 2015 Nilai pada harga konstan: tahun dasar = 2015

³ 2015 Nilai pada harga konstan: tahun dasar = 2015

oleh negara dan di bidang barang-barang modal – pembentukan modal tetap bruto) masih sangat terbatas, juga mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Investasi oleh perusahaan sangat rendah dan turun tajam pada tahun 2018 – yang tentunya tidak terlepas dari kenyataan bahwa banyak perusahaan yang bertahan karena tender publik dan sebagian besar tidak memiliki modal. Perkiraan BCTL menunjukkan sedikit peningkatan dalam investasi perusahaan di tahun 2019, namun hanya lebih dari setengah dari angka tahun 2017.

Di sisi lain, ekspor tetap sangat rendah dan jauh lebih rendah daripada impor, yang dengan jelas menunjukkan salah satu kendala terbesar perekonomian nasional: produksi dalam negeri yang sangat rendah, yang berakibat pada ketergantungan yang besar pada barang-barang yang di produksi di luar negeri, bahkan untuk konsumsi akhir dan pemenuhan Kebutuhan dasar. Hal tersebut membuat perekonomian nasional sangat rentan terhadap krisis seperti yang terjadi saat ini.

Dengan demikian, Neraca Nasional menunjukkan bahwa konsumsi telah menjadi faktor pertumbuhan ekonomi yang paling penting dalam beberapa tahun terakhir. Dalam konsumsi rumah-tangga, porsi terpenting berkaitan dengan konsumsi barang dan jasa yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar yaitu pangan dan perumahan.

Namun, pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan relatif rendah, dan jauh lebih rendah daripada pengeluaran untuk budaya (adat-istiadat) dan transportasi, oleh karena itu tidak mengherankan bahwa di antara kita pendidikan dan kesehatan “cenderung” gratis – tidak ada SPP di sekolah-sekolah milik pemerintah tetapi biaya yang terkait dengan kegiatan di sekolah (seragam siswa, pembelian bahan dan lain-lain) yang relatif tinggi jika dilihat dalam konteks nasional.

Selain itu, dari sisi konsumsi negara, porsi terbesar adalah konsumsi barang dan jasa saat ini, hampir dua kali lipat konsumsi barang investasi.

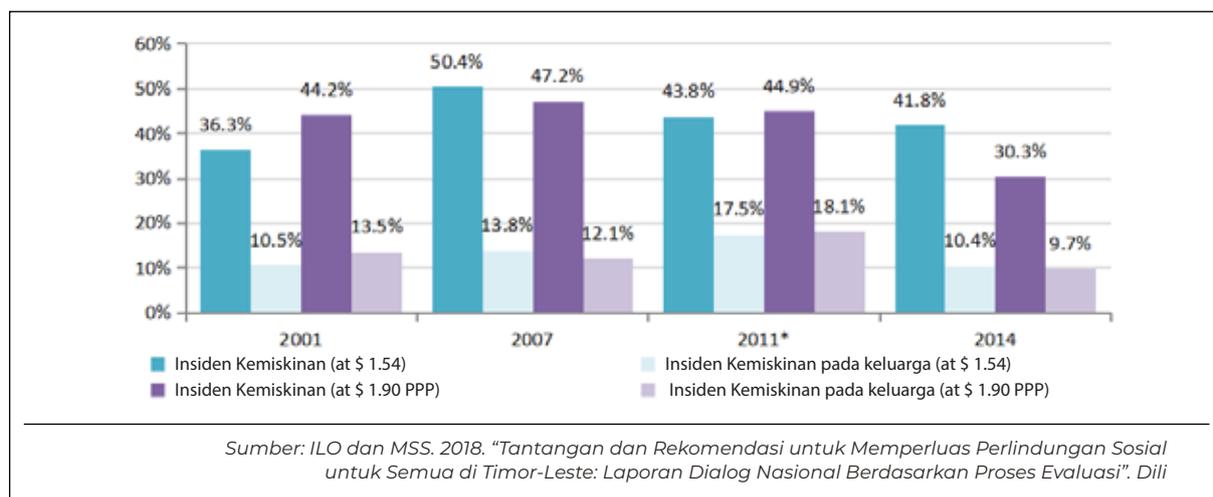
Karena industri, begitu tidak signifikan dalam konteks produksi nasional, sektor pertanian - di mana, pada kenyataannya, mata pencaharian sebagian besar keluarga bergantung - tetap penting tetapi telah mengurangi bobot relatifnya dalam PDB, tidak seperti jasa, khususnya “administrasi negara, pertahanan, pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial”, yang mewakili hampir 30% dari PDB pada 2018. Layanan swasta “modern”, atau, layanan-layanan yang diberikan kepada perusahaan, sangat terbatas; kebanyakan adalah layanan pribadi, dengan kualifikasi yang sangat rendah. Ini adalah salah satu fakta yang berkontribusi terhadap kualifikasi perekonomian kita sebagai perekonomian “dalam pembangunan”. Pembangunan akan beralih, khususnya, dari pembalikan jenis layanan utama.

Dalam hal investasi, pada tahun 2018 - seperti yang dikatakan, hampir semuanya masih dilakukan oleh pemerintah terlepas dari semua perubahan undang-undang yang telah dibuat “tentang” investasi swasta yang menunjukkan hasil yang tidak begitu relevan - ini pada dasarnya ditujukan pada infrastruktur “selain bangunan”— misalnya jalan, pelabuhan, bandara – oleh karena itu investasi di bidang perumahan umum dan bangunan lain (seperti sekolah dan infrastruktur kesehatan), atau dalam teknologi, mesin dan peralatan, hampir tidak relevan. Dengan kata lain, upaya investasi (negara) terbesar ditujukan pada jalan dan infrastruktur lain, selain bangunan, dengan beberapa analisis menganggap biaya yang ditanggung oleh Negara untuk pembangunannya terlalu tinggi, dan jelas-jelas menyebabkan inflasi – selain dimensinya sangat besar, menyebabkan pemborosan sumber daya yang obyektif yang dapat diinvestasikan dengan lebih baik dalam kegiatan Negara yang lain. Ini adalah bidang yang sangat relevan untuk ditinjau dalam waktu dekat, yaitu dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Pada kenyataannya, selain investasi yang sangat minim di sektor-sektor produktif (terutama pertanian, manufaktur dan pariwisata), investasi di sektor sosial, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan, sama minimnya juga, seperti telah disebutkan.

Dengan 41,8% dari penduduk hidup di bawah garis kemiskinan nasional (data resmi dari 2014) - dan 16,3% dalam kemiskinan multidimensi yang parah, menurut UNDP - situasi

Timor-Leste dalam hal kesehatan dan pendidikan, baik dari segi statistik (kuantitas) dan dari segi kualitatif, membantu mengklasifikasikan negara itu sebagai “negara berkembang”, terlepas dari pertumbuhan ekonominya. Artinya, bahkan dalam periode pertumbuhan ekonomi - diukur dengan GDP dan GDP per kapita - tingkat kemiskinan, berdasarkan garis kemiskinan nasional (USD 1,54 per kapita / hari), meningkat antara 2001 dan 2014, meskipun ada penurunan antara tahun 2007 dan 2014⁴.



		2007	2011	2014	Perbedaan tahun 2007-2014
Rata-rata Nasional pada \$ 1.54 per hari		50,4	43,8	41,8	-17,0%
Rata-rata Nasional pada tahun 2011 PPP \$1.90 per hari		47,2	77,8	30,3	-35,8%
Wilayah	Perkotaan	45,2	20,0	28,3	-37,3%
	Pedesaan	51,5	53,4	47,1	- 8,5%
Kepala Keluarga	Laki-Laki	50,6	44,0	43,4	-14,2%
	Perempuan	43,5	32,3	27,6	-36,5%
Umur	Anak-anak (0 sampai 15 tahun a/i)	56,1	50,3	49,0	-12,6%
	Dewasa (16 sampai 59 a/i)	45,9	39,0	38,6	-12,6%
	Tua/lansia (diatas 60 tahun a/i)	33,6	30,0	26,8	-20,2%
Situasi Pekerjaan (kepala keluarga)	Mandiri, pertanian	49,0	51,2	53,0	+8,1%
	Mandiri, non-pertanian	-	38,5	31,7	-
	Pegawai	28,0	12,6	27,5	-1,7%
Tingkat Pendidikan (Kepala keluarga)	Tersier/ Universitas	17,7	3,8	24,7	+39,5%
	SMA	34,3	21,6	34,3	0,0%
	SD /SMP	50,1	45,0	41,9	-16,3%
	TK	54,3	38,5	46,8	-13,8%
	Tidak sekolah di pendidikan formal	57,5	47,0	48,0	-16,5%

⁴ Data tentang kemiskinan di Timor-Leste yang diperkirakan (dalam “Survei Standar Kehidupan” / “Survei Standar Kehidupan Timor-Leste”) untuk tahun 2001, 2007, 2011 dan 2014. Namun, pada tahun 2011 metodologi ini didasarkan pada tingkatan pendapatan, sehingga data untuk tahun 2011 tidak sepenuhnya dan secara langsung dapat dibandingkan dengan data tahun 2001, 2007 dan 2014, di mana tingkat konsumsi digunakan sebagai dasar.

Data resmi terbaru tentang kemiskinan berasal dari tahun 2014 dan menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan lebih tinggi di daerah pedesaan (47,1%) daripada di daerah perkotaan (28,3%), dan di antara anak-anak hingga usia 15 tahun (49 %). Kemiskinan lebih rendah pada lansia (26,8%), yang dikarenakan pemberian tunjangan sosial “Subsidi Bantuan untuk Lansia dan Orang berkebutuhan khusus” (SAIL, singkatan dalam bahasa portugis), yang diberlakukan sejak tahun 2008. Pada kelompok orang dewasa yang berusia kerja, tingkat angka kemiskinan masih tinggi (38,6%), di mana bisa dilihat bahwa pada rumah tangga dimana “Kepala Rumah Tangga” bekerja di pasar formal (swasta atau negara)), angkanya turun menjadi 27,5%. Sebaliknya, bagi pekerja mandiri (banyak yang informal), angka kemiskinan lebih tinggi, mencapai 53% untuk pekerja pertanian.

Akan tetapi, statistik kemiskinan ini menyembunyikan masalah kerentanan yang sulit diukur. Selain kemiskinan dalam hal keuangan (pendapatan), penting juga untuk memahami sifat kemiskinan multidimensi dan kapasitas masyarakat untuk mengakses barang dan jasa penting. Bahkan keluarga yang hidup di atas garis kemiskinan nasional pun, terutama yang tinggal di daerah pedalaman, mengalami kesulitan dalam mengakses barang dan jasa yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu dalam hal pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial atau bahkan nutrisi berkualitas. Data tahun 2014 menunjukkan bahwa sekitar 25% keluarga (29% di pedesaan) menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan, 28% (30% di pedesaan) dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, 19% (23% di pedesaan) dalam memenuhi kebutuhan kesehatan, dan hampir 30% (33,5% di pedesaan) dalam memenuhi kebutuhan perumahan. Situasi ini tampaknya tidak berubah secara substansial sampai sekarang.

Di sisi lain, kebiasaan dan adat istiadat (“budaya” tradisional) terutama di beberapa daerah bagian negara, menjadifaktor yang menghambat, atau paling tidak menunda, pembangunan manusia itu sendiri, karena hal itu menyebabkan banyak keluarga menginvestasi pendapatan mereka (dan bahkan sering terlilit hutang) dalam perayaan dan upacara, daripada investasi di bidang lain.

Dalam hal kesehatan, diakui ada peningkatan umum dalam fungsi pelayanan publik sistem kesehatan nasional, yang gratis, dan kemajuan besar dicapai di berbagai tingkatan: dalam beberapa tahun terakhir, harapan hidup sejak lahir telah meningkat (60,2 tahun pada 2001; 68,6 tahun pada 2016), angka kematian menurun dan malaria dianggap telah diberantas secara resmi. Namun, meski ada kemajuan, indikatornya masih mengkhawatirkan. Timor-Leste memiliki angka kematian ibu dan bayi baru lahir untuk anak di bawah 5 tahun, masih tinggi, mendekati angka untuk Laos dan Papua Nugini, tetapi dengan kinerja yang jauh lebih buruk dibandingkan negara-negara lain di kawasan. Hal yang turut berkontribusi adalah fakta bahwa hanya lebih dari separuh persalinan ditolong oleh tenaga medis; dan juga fakta bahwa tingkat gizi relatif buruk. Timor-Leste bahkan merupakan salah satu negara di dunia di mana pertumbuhan lamban (nanismo) paling tinggi di antara anak-anak di bawah usia lima tahun - dengan hasil yang lebih buruk daripada Timor-Leste, hanya Burundi dan Eritrea.

Namun, jumlah dokter per 10.000 penduduk mengalami peningkatan: 7,2 - angka yang jauh lebih tinggi daripada yang ada di Indonesia atau Filipina, misalnya. Yang berkontribusi pada hal ini adalah komitmen yang telah dibuat Timor-Leste dalam mempersiapkan dokter di luar negeri, yaitu di Kuba, tetapi sekarang juga di dalam negeri.

Meskipun demikian, karena kurangnya infrastruktur, tenaga medis dan kesulitan dalam akses, banyak warga, terutama di daerah yang paling terpencil di negeri ini, belum menerima perawatan kesehatan yang diperlukan dan sering beralih ke metode pengobatan tradisional.

Agar hasil di tingkat kesehatan dan kualitas hidup meningkat, Pemerintah perlu mengalokasikan dana yang lebih besar dari APBN untuk kesehatan. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa persentase APBN untuk bidang kesehatan, di negara kita, jauh lebih rendah daripada di negara lain di kawasan ini, yaitu sekitar setengah dari rata-rata dunia.

Negara anggota	Total populasi (000s)			Harapan hidup saat lahir, (tahun)			Harapan hidup sehat saat lahir, (tahun)			Rasio kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
	Pria	Perempuan	Kedua	Pria	Perempuan	Kedua	Pria	Perempuan	Kedua	
	2018			2016			2016			2017
Brunei Darussalam	223	206	429	75.3	77.6	76.4	67.0	68.8	67.9	31
Kamboja	7 930	8 320	16 250	67.3	71.2	69.4	59.4	62.1	60.8	160
Indonesia	134 788	132 882	267 671	67.3	71.4	69.3	60.4	63.0	61.7	177
Republik Demokratik Rakyat Laos	3 546	3 516	7 061	64.2	67.4	65.8	56.9	58.8	57.9	185
Myanmar	25 883	27 825	53 708	64.6	68.9	66.8	56.9	59.9	58.4	250
Papua Nugini	4 392	4 214	8 606	63.6	68.3	65.9	56.7	59.5	58.0	145
Singapura	3 014	2 744	5 758	80.8	85.0	82.9	74.7	77.6	76.2	8
Thailand	33 833	35 595	69 428	71.8	79.3	75.5	64.0	69.8	66.8	37
Timor-Leste	641	627	1 268	66.8	70.4	68.6	57.7	60.7	59.2	142
Vietnam	47 681	47 865	95 546	71.7	80.9	76.3	64.2	70.7	67.5	43
Global	3829 425	3765 271	7594 696	69.8	74.2	72.0	62.0	64,8	63,3	211

Negara anggota	Proporsi kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan terampil (%)	Angka kematian balita (per 1000 kelahiran hidup)	Angka kematian neonatal (per 1000 kelahiran hidup)	Kejadian tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Insiden malaria (per 1000 penduduk beresiko)	Prevalensi antigen permukaan hepatitis B (HBsAg) pada anak di bawah 5 tahun (%)	Jumlah orang yang dilaporkan membutuhkan intervensi terhadap Penyakit tropis yang terabaikan
	2010–2019	2018	2018	2018	2018	2015	2018
Brunei Darussalam	100	12	5	68	-	0.34	1
Kamboja	89	28	14	302	23.7	0.56	4 182 394
Indonesia	95	25	13	316	3.9	1.07	100 847 287
Republik Demokratik Rakyat Laos	64	47	23	162	4.2	1.94	2 031 804
Myanmar	60	46	23	338	3.4	2.03	41 778 536
Papua Nugini	56	48	22	432	184.5	2.24	6 261 977
Singapura	100	3	1	47	-	0.47	6
Thailand	99	9	5	153	0.4	0.17	55 073
Timor-Leste	57	46	20	498	0.0	0.87	1 293 316
Vietnam	94	21	11	182	0.1	1.20	6 147 296
Global	81	39	18	132	57.4	0.80	1755 331 611

Sumber: https://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2020/EN_WHS_2020_Annex2.xlsx?ua=1

Menurut Laporan dari Human Development Report/ UNDP, pada tahun 2018, seorang anak usia sekolah diharapkan untuk menerima, berdasarkan sistem pendidikan umum, 12,4 tahun pendidikan - dan tanpa perbedaan yang signifikan dalam hal jender - yang tampaknya merupakan suatu hal yang relatif positif. Namun demikian, menurut Sensus 2015, sekitar 19,3% anak-anak dan remaja berusia antara 3 hingga 29 tahun tidak pernah bersekolah. Di antara mereka yang bersekolah, 71,6% mencapai tingkat yang lebih rendah dari sekolah menengah umum, dan hanya 8,1% yang sampai pada jenjang perguruan tinggi (politeknik atau universitas). Keberadaan warga buta huruf masih menjadi kenyataan, terutama di daerah pedesaan di mana lebih dari 10% penduduk berusia di atas 5 tahun tidak dapat berbicara, membaca atau menulis dalam bahasa Tetun.

Perlu dicatat bahwa 12,4 tahun bersekolah untuk “teori”, pada kenyataannya tidak terbukti, dengan rata-ratanya adalah 4,5 tahun, salah satu yang terendah di Asia Tenggara dan yang, tentu saja, berdampak pada rendahnya kualifikasi tenaga kerja kita - faktor penting yang turut berpengaruh pada minimnya minat calon-calon investor. Hal ini membuat kita berada dalam situasi yang tidak kompetitif dengan negara lain di kawasan dalam hal “daya tarik” negara kita sebagai penerima investasi.

Sekalipun masalah anak yang bersekolah dapat diatasi, penting untuk mengetahui secara lebih detail kualitas pengajaran – dan untuk hal ini kualifikasi guru adalah faktor utama – dan persiapan mereka untuk pasar kerja. Laporan UNDP yang sama mengungkapkan bahwa, pada tahun 2018, hanya 28,2% tenaga kerja yang dianggap sebagai tenaga kerja terampil. Akan tetapi, data tentang kerentanan ketenagakerjaan menunjukkan bahwa 71,2% dari total pekerja (total pekerjaan) adalah orang-orang yang dipekerjakan sebagai pekerja keluarga tanpa bayaran dan para pekerja mandiri.

Tenaga kerja dengan kualifikasi yang rendah berdampak besar pada pasar tenaga kerja, baik dalam hal produktivitas dan bahkan dalam hal lapangan kerja yang sebenarnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa ini merupakan faktor yang sangat berkontribusi pada berkurangnya daya tarik investasi swasta (terutama asing), dan tingginya pengangguran.

Menurut statistik resmi, penduduk aktif (usia 15 hingga 64 tahun) adalah 55,12% (*sensus tahun 2015*), tetapi tingkat partisipasi tenaga kerja pada tahun 2016 hanya 46,9% dari populasi aktif (data dari survey Tenaga Kerja tahun 2016). Walau demikian, jumlah ini menunjukkan pertumbuhan yang kuat dibandingkan dengan data tahun 2013 (30,6%). Data resmi dari tahun 2016 menunjukkan tingkat pengangguran sekitar 10,4% (11% pada tahun 2013) dan tingkat pengangguran di kalangan kaum muda (15 hingga 24 tahun) sebesar 32,9% (21,9% pada tahun 2013) – tetapi diyakini bahwa ini seharusnya lebih tinggi karena informasi statistik tentang pasar tenaga kerja dipertanyakan, karena tidak mencerminkan kenyataan.

Sektor yang mempekerjakan lebih banyak orang (2016) adalah sektor jasa dengan 50,2% (menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan 2013, di mana jumlahnya 45,1%), diikuti oleh sektor pertanian dengan 32,2% (menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2013, di mana mencapai 40,5%) dan industri hanya 17,5% dari angkatan kerja yang bekerja (yang meskipun demikian, telah menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2013). Namun, di antara tenaga kerja yang dipekerjakan, 71% berada di sektor informal ekonomi dan hanya 29% di sektor formal (2013). Pekerjaan yang dianggap rentan, yang memiliki kecenderungan lebih besar ke informalitas, telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir (54,5% pada 2013 dan 58% pada 2016), dengan penekanan pada wirausaha, yang sudah mewakili 42,9% pada 2016 % dari total pekerjaan.

Bagian yang signifikan dari populasi aktif (15,1% pada tahun 2016, namun menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan 25,7% pada tahun 2013) bekerja pada pertanian subsisten, tidak masuk dalam catatan resmi sebagai bagian dari “tenaga kerja”, yang membantu menjelaskan rendahnya partisipasi angkatan kerja.

Negara masih merupakan pemberi kerja terbesar, dimana menyerap lebih dari setengah (54,6%, pada 2013) pekerjaan yang dibayar. Situasi ini tidak berubah secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Tekanan pada pasar tenaga kerja bahkan lebih besar mengingat karakteristik demografis negara, dengan populasi yang sangat muda - menurut *Sensus* terakhir tahun 2015, sekitar 60% populasi berusia di bawah 25 tahun (39% di antaranya adalah kurang dari 15 tahun). Di antara populasi aktif, hampir 52% adalah kaum muda berusia antara 15 dan 29 tahun. Kaum muda usia kerja, dan terutama mereka yang mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi, berusaha untuk “menghindar” dari pertanian subsisten dan pindah ke daerah perkotaan, untuk mencari pekerjaan yang dibayar sesuai dengan harapan mereka. Hal ini memberikan tekanan yang lebih besar pada pasar tenaga kerja, jasa dan industri yang ada yang sangat

kecil, tanpa ada kapasitas untuk merespon dan menyerap. Akibatnya, yang sering terjadi, adalah emigrasi ke pasar (asing) lain, khususnya Inggris Raya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya.

Masih mengenai pekerjaan, perlu diperhatikan bahwa:

- Apa yang bisa disebut “**sektor modern**” ekonomi seharusnya tidak mempekerjakan lebih dari sekitar 80-100 ribu orang, termasuk pegawai negeri. Saat ini, menurut data yang ada, ada sekitar 80 ribu pekerjaan yang dibayar.
- Tingkat **semi pengangguran, pekerjaan informal dan pengangguran terselubung** (pekerja dengan produktivitas sangat rendah atau menduduki fungsi non-produktif hingga usia tua) ternyata sangat tinggi, termasuk banyak kaum muda yang sedang kuliah di sistem pendidikan tinggi nasional, yang memiliki kualitas yang lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ini dan, pada kenyataannya, tidak mempersiapkan mereka untuk kehidupan aktif.
- Pengangguran hanya tidak terlalu tinggi karena saat ini negara memiliki jumlah **emigran** yang relatif signifikan (lebih dari 20.000 hanya di Inggris saja) dan banyak kaum muda Timor mendapatkan beasiswa dan belajar di luar negeri.
- Pasar tenaga kerja masih bermasalah dalam hal **kualifikasi tenaga kerja** dan yang bisa kita sebut **etos kerja**. Kedua masalah hanya dapat diubah dalam jangka panjang, yaitu melalui adaptasi yang lebih baik dari sistem pendidikan (pelatihan formal dan kejuruan) dengan kebutuhan negara dan investasi - baik negara maupun swasta - karena hal ini membutuhkan tenaga kerja berkualitas yang saat ini tidak kita miliki. Hal ini membutuhkan peningkatan investasinegara di sektor pendidikan formal dan pelatihan kejuruan, dengan penambahan dana yang dialokasikan sektor ini dalam anggaran tahunan.
- Beberapa **statistik tentang pendidikan di Timor-Leste dan negara-negara tetangganya**: lamanya tahun bersekolah (dan tahun yang diharapkan dalam bersekolah):
 - Timor Leste :4,5 (12,4)
 - Laos :5,2 (11,1)
 - Vietnam 8,2 (12,7)
 - Indonesia : 8 (12,9)
 - Thailand: 7,7 (14,7)

(Sumber: UNDP Laporan Pembangunan Manusia 2019, Indeks Pembangunan Manusia dan komponennya, Halaman 300; <http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf>)

Terlepas dari potret situasi yang sulit dalam hal pembangunan manusia, harus diakui upaya besar yang telah dilakukan di Timor-Leste, sejak Restorasi Kemerdekaan, dalam hal menciptakan sistem perlindungan sosial - meskipun dengan tindakan sendiri-sendiri dan tidak selalu terkoordinasi - yang bertujuan melindungi orang, di semua tahap kehidupan manusia, yang berkontribusi untuk mengurangi dan mencegah kemiskinan, dan untuk menjamin pendapatan.

Tabel di bawah ini merangkum program dan langkah-langkah perlindungan sosial yang saat ini diimplemetasikan oleh Pemerintah, dalam empat jaminan / bidang yang direkomendasikan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (Rekomendasi ILO No. 202).

4 Jaminan – Tingkat Perlindungan Sosial (ILO)

Perawatan Kesehatan Dasar	Jaminan penghasilan dasar untuk anak-anak	Jaminan penghasilan dasar bagi orang dalam usia kerja	Jaminan penghasilan dasar bagi orang lanjut usia
<p>Sistem Kesehatan Nasional (universal dan gratis);</p> <p>Pelayanan kesehatan masyarakat terpadu (SISCA);</p> <p>Kesehatan dalam Keluarga;</p> <p>Dukungan sosial untuk pasien yang kurang mampu</p>	<p>Bolsa da Mãe (Hibah ibu);</p> <p>Program makanan tambahan anak sekolah; Program imunisasi/vaksinasi;</p> <p>Dukungan sosial untuk anak yang berkonflik dengan hukum;</p> <p>Dukungan jender kepada anak-anak dan wanita hamil (obat-obatan, vaksin dan makanan terapeutik)</p>	<p>Manfaat sosial dari skema iuran;</p> <p>Program kerja pedesaan (cash for work e roads for development);</p> <p>Dukungan sosial bagi korban kekerasan berdasarkan jender; Reintegrasi sosial narapidana;</p> <p>Dukungan sosial untuk keluarga dan masyarakat yang kurang mampu</p>	<p>Pembayaran Sosial bukan iuran;</p> <p>Pembayaran skema iuran;</p> <p>Layanan pemakaman</p>

Sumber: Disiapkan berdasarkan data ENPS (OIT dan MSS, 2018. "Tantangan dan Rekomendasi untuk Memperluas Perlindungan Sosial kepada Semua di Timor-Leste: Laporan Dialog Nasional Berdasarkan Proses Evaluasi". Dili)

Namun demikian, di tingkat dasar pun, sistem perlindungan sosial belum mencakup semua warga negara. Di satu sisi, cakupan program perlindungan anak masih cukup rendah; di sisi lain, jaminan penghasilan dasar belum terjamin bagi semua orang usia kerja yang tidak memperoleh penghasilan yang cukup, baik karena mereka menganggur atau bekerja di sektor perekonomian informal.

Pembentukan skema iuran jaminan sosial yang baru memberikan perlindungan, baik di usia aktif maupun di usia lanjut, kepada sejumlah besar pekerja – yang saat ini, menurut informasi INSS, lebih dari 82 ribu pekerja telah terdaftar, yang berarti hampir 100% pekerja di sektor formal, menurut data dari survei Tenaga Kerja terbaru, tahun 2016. Namun, sebagian besar pekerja (sekitar 70% berada di sektor informal.

Sistem jaminan sosial belum menawarkan perlindungan untuk pengangguran dan penyakit, membuat orang-orang lebih rentan dalam situasi ini – seperti kasus pandemi saat ini yang disebabkan oleh COVID -19

Namun, di usia lanjut dan dalam kesehatan, cakupannya praktis lengkap: semua warga negara dapat setidaknya secara teori, terlepas dari masalah aksesibilitas di beberapa wilayah negara – mendapatkan manfaat dari Sistem Kesehatan Nasional, dan semua orang lanjut usia memiliki akses ke pembayaran sosial, terlepas dari kontribusi sosial yang telah mereka berikan sepanjang hidup mereka.

Untuk menjamin pendapatan dasar dan perawatan medis untuk semua (dimensi horizontal), dan kemudian untuk menjamin tingkat perlindungan yang lebih tinggi (dimensi vertikal), perlu menginvestasikan anggaran negara yang lebih besar dan lebih solid di bidang sosial, termasuk perlindungan sosial dan langkah-langkah aktif untuk pekerjaan, pendidikan dan



kesehatan. Hanya dengan demikian pertumbuhan ekonomi akan mungkin dibarengi dengan pembangunan manusia; hanya dengan demikian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan akan bisa tercapai.

Dengan konteks ekonomi dan sosial Timor-Leste yang disajikan di atas, memungkinkan kita untuk, secara ringkas, mengidentifikasi **elemen-elemen karakteristik struktural** (jangka panjang):

- **Tingkat pendapatan yang rendah** – dalam banyak kasus hanya sedikit di atas untuk kelangsungan hidup sederhana – dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi, dengan kesenjangan regional yang signifikan.
- Masih adanya potret mengkhawatirkan dari segi pembangunan sumber daya manusia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dengan penekanan pada masalah **gizi buruk pada anak**.
- **Tingginya jumlah warga yang masih tanpa perlindungan sosial**.
- **Rendahnya tingkat investasi produktif (negara dan swasta)**, yang tercermin pada rendahnya produktivitas struktur produktif dan tenaga kerja.
- **Jumlah pekerjaan produktif yang sangat terbatas, khususnya** di sektor paling ‘modern’ dari setiap perekonomian dan **tingkat pengangguran dan semi pengangguran yang tinggi, yang semuanya berkaitan satu sama lain untuk memungkinkan pendapatan yang rendah**.
- **Kesenjangan dalam distribusi pendapatan**.
- **Sistem pendukung yang buruk untuk kesehatan, pendidikan dan pendapatan masyarakat**.
- **Ketergantungan yang besar pada produksi luar-negeri (impor)**.
- **ketergantungan yang besar pada pendapatan dari minyak untuk membiayai Negara** dan secara tidak langsung, karena aktivitasnya, produksi.

Dari semua elemen ini, **yang paling menentukan adalah kurangnya pekerjaan yang produktif dan layak** karena ini merupakan prasyarat bagi elemen-elemen lain yang diidentifikasi, dari produktivitas hingga investasi. Oleh karena itu, strategi yang disarankan di sini dan langkah-langkah kebijakan ekonomi untuk implementasinya berfokus terutama pada penciptaan jenis-jenis lapangan kerja seperti itu. **Langkah-langkah yang diusulkan di sini dapat (dan seharusnya), sebagian besar, sudah dilaksanakan dalam APBN tahun 2021, diperpanjang hingga tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya.**

Terkait unsur-unsur konjungtural (jangka pendek), yang menjadi sorotan adalah rendahnya atau stagnasi produksi nasional (diukur dengan Produk Domestik Bruto) yang berkaitan dengan ketidakstabilan politik dalam 2 sampai 3 tahun terakhir dan diperkirakan sekitar -3,8% pada tahun 2017 dan -0,8 pada tahun 2018. Meskipun terjadi pemulihan pada tahun 2019 (+4,6%), krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 saat ini akan tercermin dalam resesi ekonomi baru (-6% tahun ini) dengan durasi dan efek yang belum diketahui sepenuhnya.

1.2.2 DAMPAK DARI COVID-19

akhir 2019 semuanya tampak berjalan cukup baik, hingga pandemi COVID-19 muncul, yang secara radikal mengubah situasi pada Maret tahun ini, dengan pembatasan pada pergerakan orang. Namun, dengan tidak diloloskannya RUU APBN 2020 pada bulan Januari tahun ini, semakin kontribusi untuk percepatan resesi ekonomi pada tahun 2020. Kerapuhan ekonomi Timor-Leste terlihat dalam situasi krisis, seperti yang disebabkan oleh COVID-19.

Meskipun dalam hal jumlah pasien yang positif, pandemi COVID-19 hanya berpengaruh pada sejumlah kecil penduduk di negara ini (warga Timor-Leste atau bukan), pandemi ini memiliki dampak ekonomi dan sosial yang tidak proporsional terhadap jumlah ini, karena kepanikan di kalangan warga, yang membuat mereka, dalam jumlah yang signifikan, meninggalkan tempat kerja dan bahkan tempat tinggal mereka. Situasi ini mengakibatkan penutupan sejumlah besar unit produksi (barang atau jasa, seperti, dalam hal ini, usaha di bidang restoran) dan berakibat pada penutupan (sementara dalam banyak kasus) dari unit-unit ini dan mengakibatkan penurunan drastis dalam produksi dan, kemungkinan, lapangan kerja. Perlu dicatat bahwa di seluruh dunia, dampak yang terakhir ini akan menjadi yang terbesar tapi tidak pada semua sektor, dan terkonsentrasi, terutama, di beberapa sektor, yaitu yang paling padat karya, seperti pariwisata dan usaha restoran, selain pelayanan jasa lainnya.

Bank Sentral Timor-Leste (BCTL) baru-baru ini meramalkan evolusi produksi berikut di negara ini (PDB):

	Jutaan USD								% Pertumbuhan		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
PDB riil	1549	1597	1653	1591	1578	1651	1552	1602	4.6%	-6.0%	3.2%
PDB Nominal	1447	1597	1656	1610	1569	1665	1582	1648	6.2%	-5.0%	4.2%
Deflator PDB	93.4	100.0	100.2	101.2	99.4	100.9	101.9	102.9	1.5%	1.0%	1.0%

Tabel di atas menunjukkan bahwa BCTL memperkirakan penurunan PDB riil sebesar -6% pada tahun 2020, penurunan yang signifikan, penurunan yang hampir sama dengan yang terjadi saat krisis tahun 2006. Untuk tahun 2021, jika dibandingkan dengan perkiraan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk ekonomi dunia, BCTL memperkirakan pemulihan yang lemah dalam PDB riil sebesar + 3,2%. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa, terutama di Timor-Leste, membuat perkiraan variasi produksi tidaklah mudah dan, oleh karena itu, bisa terjadi kesalahan yang hanya bisa diperbaiki di kemudian hari, oleh karena itu, perkiraan ini harus dilihat dengan hati-hati sesuai situasinya, terutama jika ada gelombang kedua pandemi.

Yang jelas, penurunan produksi dan pekerjaan, atau setidaknya pengurangan jam kerja, berakibat juga pada penurunan pendapatan keluarga, hal yang sangat penting di Timor-Leste karena relevansi konsumsi swasta dalam total pengeluaran nasional, sehingga sebuah kebijakan keberlanjutan tentang pendapatan harus dilihat tidak hanya sebagai kebijakan "ekonomi mikro" yang ditujukan untuk keluarga, tetapi juga sebagai kebijakan makroekonomi untuk mendukung konsumsi dan, dan setidaknya, melalui kebijakan ini mendukung sebagian produksi nasional.

Persoalan turunnya tingkat pendapatan rumah tangga dapat dilihat, dalam konteks yang lebih struktural, dari tingkat pendapatan rata-rata yang relatif rendah dan distribusi pendapatan yang sangat tidak merata dan memburuk dalam konteks krisis saat ini. Perlu diingat, bahwa tingkat rata-rata pendapatan keuangan rumah tangga di pedesaan sangat rendah dan hal yang sama juga terjadi di perkotaan, namun pada tingkat yang lebih tinggi daripada di pedesaan, di mana banyak pekerjaan memberikan upah sekitar dari 130-150 USD / bulan.

Menurut catatan yang ada di Perlindungan Sosial, gaji rata-rata yang diumumkan adalah 250 USD / bulan, tetapi angka ini terutama meningkat oleh nilai tagihan gaji perusahaan internasional, dan lebih sedikit perusahaan nasional di sektor yang lebih modern. Semua ini berkontribusi pada tingginya tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, seperti yang telah disebutkan, membuat banyak warga kita dengan (sangat) sedikit ruang untuk bermanuver menghadapi krisis seperti yang sekarang ini.

Fakta bahwa sistem Perlindungan sosial tidak melindungi pengangguran, dan fakta bahwa sebagian besar pekerja di sektor informal tidak terlindungi, membuat situasi banyak warga

negara semakin sulit, dan meningkatkan kerentanan dan ketidakmampuan mereka untuk bereaksi terhadap krisis.

Walau bukan sebagai penyebab utama kemiskinan dan rendahnya pendapatan, pandemi COVID-19 telah memperburuk situasi di Timor-Leste, dalam hal pekerjaan dan pendapatan, di sektor formal dan informal, seperti di sebagian besar negara yang terkena dampak.

Faktanya, meskipun langkah-langkah yang disetujui oleh Pemerintah VIII pada masa Keadaan Darurat tidak terlalu membatasi (dengan pengecualian kepada pengemudi angkutan umum), kenyataannya adalah kepanikan di satu sisi, dan langkah-langkah yang diambil (dan perlu) di sisi lain, menyebabkan pengurangan jam kerja dan penangguhan banyak kontrak kerja. Kemudian, terjadilah penurunan produksi/ pasokan (pada dasarnya dalam penyediaan jasa dan perdagangan), yang menyebabkan hilangnya volume perdagangan dan pendapatan.

Tanpa pendapatan dan tanpa likuiditas, banyak perusahaan, yang sebelumnya sudah kehabisan modal, mengalami kesulitan yang semakin besar untuk membayar biaya/ harga tetap, dari pengeluaran untuk pegawai (termasuk gaji dan tanggung jawab sebagai pembayar pajak dalam sistem pajak - meskipun ada pengecualian untuk membayar kontribusi untuk jaminan sosial antara bulan Maret dan Juni), begitu juga dengan tagihan listrik, sewa, bahan mentah, dan barang-barang lain yang diperlukan untuk kegiatannya, yang sebagian besar diimpor. Rantai pasokan barang dan jasa telah terpengaruh dan, dalam beberapa kasus, terputus.

Akibatnya, terjadi penurunan drastis dalam pendapatan masyarakat dan perusahaan yang mempekerjakan mereka, termasuk di sektor informal.

Sektor-sektor yang paling terkena dampak, tentu saja, adalah sektor-sektor yang terkait dengan pariwisata, usaha restoran, dan transportasi umum, mengingat ditutupnya perbatasan dan penerapan jarak sosial.

Bahkan dalam Administrasi Negara sendiri, meskipun tidak ada penurunan pendapatan, tuntutan untuk menerapkan jarak sosial dan ketakutan akan penularan juga menyebabkan pengurangan jam kerja dan sistem kerja dari jarak jauh (kerja secara online atau dari rumah), seringkali dalam kondisi yang tidak ideal (misalnya, banyak pegawai tidak memiliki komputer atau akses ke internet di rumah). Hal ini, dalam beberapa kasus mempengaruhi produktivitas dan dalam kasus lain, berpengaruh juga pada pelayanan umum, kecepatan atau bahkan penangguhan penyediaan layanan (misalnya dalam kasus visa kerja).

Guncangan di sisi penawaran, dengan berkurangnya aktivitas perusahaan, layanan, dan Administrasi Negara, berdampak pada sisi permintaan, yang menyebabkan kontraksi ketika mempengaruhi konsumsi. Akibatnya, seperti disebutkan di atas, berkontribusi pada penurunan pendapatan, tetapi juga penerapan jarak sosial dan ketakutan masyarakat akan tertularnya penyakit tersebut. Di Timor-Leste, bahkan para pekerja yang pendapatannya tidak terkena dampak, termasuk pegawai negeri, telah mengurangi permintaan barang dan jasa, baik karena tuntutan untuk menjaga jarak sosial ataupun menghindari keluar rumah untuk hal-hal yang tidak perlu, atau juga karena kontraksi penawaran. Fakta ini, sekali lagi, membawa pada pengurangan yang berkelanjutan dalam penawaran: jika tidak ada konsumen, juga tidak ada dorongan untuk menyediakan jasa dan menawarkan / memproduksi barang, apalagi untuk melakukan investasi (seperti dalam penyediaan bahan baku dan barang untuk dijual kembali), terutama dalam konteks ketakutan akan tertular. Ini terjadi, misalnya, di usaha restoran, hotel, atau toko komersil.

Faktor lain yang turut berkontribusi pada menurunnya permintaan adalah penurunan besar jumlah orang asing, baik karena penurunan mendadak arus wisatawan yang memasuki negara ini, dengan refleksi yang berimbas pada berhentinya aktifitas perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata, atau karena fakta bahwa banyak pekerja asing telah kembali (meski sementara) ke negara asalnya.

Secara nominal, BCTL memperkirakan penurunan permintaan domestik sebesar -10%, dengan -6% permintaan swasta pada tahun 2020 dan -14% dari permintaan negara.

3.2 Nominal GDP - Demand Components - USD Millions									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	% Growth
HHs FCE	864	883	913	987	1 024	1 080	1 026	1 062	5%
HHs GFCF	22	26	25	23	21	22	21	22	8%
Companies GFCF	84	85	90	111	43	58	46	48	35%
Private Demand	970	994	1 028	1 121	1 088	1 161	1 093	1 132	7%
Public FCE	771	776	759	722	734	879	787	843	20%
Public GFCF	435	412	469	349	413	330	258	256	-20%
2. Public Demand	1 207	1 188	1 228	1 070	1 147	1 209	1 045	1 099	5%
NPISHs	83	53	70	37	43	57	51	54	31%
Aid Foreign	224	199	189	187	169	206	186	194	22%
Changes in inventories	30	21	26	26	23	26	23	24	12%
Acquisitions less disposals c	0	0	0	0	0	0	0	0	2%
3. Add-ons	336	273	285	251	236	289	261	272	22%
4. Domestic Demand	2 513	2 455	2 542	2 443	2 471	2 659	2 400	2 503	8%
Exports	66	49	52	38	43	47	25	36	10%
-Imports	-1 131	-907	-938	-871	-945	-1 040	-843	-891	10%
5. Net External Demand	-1 065	-858	-886	-833	-902	-993	-818	-855	10%
6. GDP	1 447	1 597	1 656	1 610	1 569	1 665	1 582	1 648	6%

Walaupun langkah-langkah pembatasan yang diambil memungkinkan berlanjutnya impor barang konsumsi penting, tingkatnya pastinya telah turun, menurut perkiraan BCTL, seperti yang terlihat pada tabel di atas, impor global akan turun, pada tingkat nominal, -19% pada tahun 2020, dan harga meningkat, yang berdampak pula pada penurunan konsumsi.

Dalam praktiknya, dan seperti yang umumnya terjadi di seluruh dunia, di Timor-Leste, pandemi yang disebabkan oleh COVID-19 memiliki dampak ekonomi ganda, mempengaruhi penawaran dan permintaan secara agregat, dengan penurunan produksi (terutama dalam penyediaan layanan) dan konsumsi. Di Timor-Leste, dan mengingat bobotnya dalam PDB, penurunan konsumsi swasta sangat mengkhawatirkan, baik secara langsung maupun dari sudut pandang makroekonomi.

Penurunan kegiatan ekonomi, dari sisi penawaran/produksi (mempertahankan jasa, perusahaan), bagaimanapun juga bermasalah, karena menciptakan ketimpangan di pasar, dapat menyebabkan pengangguran dan hilangnya pendapatan, yang menyebabkan masalah lebih besar dalam jangka waktu menengah, juga di sisi permintaan, dalam hal kemampuan konsumsi.

Untungnya dalam hal kesehatan masyarakat, dan tanpa kasus penularan lokal, COVID-19 dapat dikendalikan, karena pemerintah mengambil tindakan pencegahan yang sangat penting, mengingat sistem kesehatan nasional sangat lemah, di mana eksponen maksimum adalah jumlah ventilator mekanik yang sangat kecil di negara ini untuk melayani pasien paling serius.

Dengan demikian, dan tentu saja, selain penerapan jarak sosial dan penutupan perbatasan yang diberlakukan, kita percaya bahwa dampak ekonomi tersebut diperburuk oleh ketakutan yang ada, mengakibatkan kurangnya kepercayaan pelaku ekonomi, termasuk pekerja, perusahaan/penyedia jasa/produsen dan konsumen. Penurunan jumlah WNA dengan cepat dan signifikan di tanah air juga memberikan dampak yang sangat besar, baik dari sisi penurunan konsumsi maupun penurunan aktivitas terutama di beberapa sektor yang lebih banyak bergantung pada tenaga kerja asing (hotel, restoran).

Mengingat kenyataan ini, Pemerintah Konstitusi VIII mengadopsi sembilan-belas langkah dukungan sosial-ekonomi langsung, yang bertujuan untuk mengatasi penurunan lapangan

kerja dan pendapatan masyarakat (di sektor formal dan informal), tetapi juga untuk mengurangi kesulitan perusahaan untuk menanggung biaya-biaya tetap dan operasional (termasuk pengeluaran untuk gaji pegawai dan biaya keuangan). Langkah-langkah ini meliputi:

- 1) **“Tunjangan kerja luar biasa”** (untuk entitas pemberi kerja di sektor swasta dan para pekerjanya yang terdaftar di jaminan sosial).
- 2) **Bantuan keuangan untuk rumah tangga** (ditujukan untuk semua keluarga, asalkan tidak satu pun anggota keluarga tidak memiliki pendapatan bulanan di atas 500 USD).
- 3) **Moratorium dalam pemenuhan kewajiban yang timbul dari kontrak pemberian kredit.**

Berkaitan dengan tunjangan kerja luar biasa, efektivitasnya dalam mempertahankan lapangan kerja akan bergantung pada bagaimana perusahaan akan merespon dalam jangka pendek, yaitu menghormati komitmen mereka untuk mempertahankan pekerjaan untuk jangka waktu Tiga bulan setelah “Keadaan Darurat”, dimana Jaminan Sosial secara langsung mendukung biaya upah melalui tunjangan 60% dari gaji bulanan pekerja yang diumumkan. Komitmen perusahaan ini tampaknya terbukti sangat sulit untuk dipertahankan mengingat situasi ekonomi yang belum cukup membaik untuk membenarkan dipertahankannya banyak pekerjaan. Apa yang kita saksikan adalah bahwa lebih dari 100 perusahaan baru-baru ini telah menutup bisnis mereka terlepas dari keinginan perusahaan dan pekerja.

Langkah tersebut juga bertujuan untuk mendukung perusahaan untuk menanggung sebagian dari biaya tetap (upah) dan, dengan demikian, memungkinkan beberapa perusahaan untuk tetap beroperasi (walaupun dikurangi) untuk beberapa waktu, sampai situasi ekonomi secara umum membaik dan memungkinkan mereka mereka tetap berada di pasar. Selain subsidi itu sendiri, pemberi kerja mendapat manfaat dari pembebasan iuran yang harus dibayar (umumnya 6%), yang dalam beberapa kasus, dapat berarti dukungan penting dalam menanggung biaya tetap.

Menurut data yang diperoleh dari INSS, langkah tersebut dapat mencakup sekitar 10.000 pekerja, dari sektor formal dan informal, dan menelan biaya sekitar 7 juta USD. Dengan memastikan pendapatan pengganti untuk upah, jika terjadi kerugian, langkah ini juga memungkinkan untuk membawa lebih banyak orang ke dalam sistem jaminan sosial, termasuk pemberi kerja yang belum terdaftar (dan yang pendaftarannya wajib) dan pekerja mandiri atau pekerja informal. Faktanya, pada periode di mana “skema pendaftaran luar biasa” diberlakukan, tingkat pertumbuhan pendaftaran dalam skema jaminan sosial iuran sangat signifikan: 30,73% di pihak pemberi kerja; 8,15% pada pekerja; 1.437% pekerja di sektor informal (yang registrasinya merupakan pilihan). Skenario ini sangat positif, karena itu berarti semakin banyak orang yang sekarang terdaftar dalam sistem dan mungkin, pada saat krisis, memiliki ketahanan yang lebih besar.

Terkait dengan bantuan keuangan untuk mendukung keluarga, tujuannya adalah untuk membantu keluarga secara langsung, agar meningkatkan konsumsi dan mencegah agar masyarakat, terutama mereka yang kehilangan pendapatan atau yang sudah miskin, berada dalam situasi kerentanan dan kemiskinan yang lebih besar lagi. Langkah ini pada dasarnya ditujukan untuk menjangkau masyarakat yang tidak tercakup dalam skema iuran jaminan sosial, khususnya para penganggur dan pekerja di sektor informal. Menurut informasi dari Kementerian Solidaritas dan Inklusi Sosial (MSSI), subsidi tunai 100 USD / bulan akan mencakup 300 ribu keluarga, dan dibayarkan selama tiga bulan. Langkah ini menelan biaya yang cukup besar, baik untuk besaran subsidi itu sendiri, dengan perkiraan biaya sebesar USD 89,55 juta, maupun untuk biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan program itu. Evaluasi terhadap hasil yang dicapai tentunya tetap harus dilakukan. Namun, diharapkan bahwa dukungan ini telah memungkinkan untuk memastikan pendapatan minimum untuk semua keluarga dan, dengan demikian, menjamin tingkat minimum konsumsi.

Dua langkah pertama ini, yang direalisasikan melalui transfer pendapatan langsung (*Transfer tunai*), tujuannya adalah, di satu sisi untuk mendukung lapangan kerja (dalam rangka langkah pertama) dan, di sisi lain, untuk mengurangi dampak dari kekurangan pendapatan keluarga (untuk kedua kasus), dan pemerintah menyadari bahwa hal ini penting untuk mempertahankan tingkat (walaupun rendah) konsumsi rumah tangga dan konsumsi swasta dalam perekonomian secara umum, penting untuk mempertahankan tingkat normal kegiatan ekonomi negara dan kegiatan ekonomi dari banyak produsen dan perusahaannya. Sebagian dari barang-barang yang akan disalurkan untuk konsumsi rumah tangga adalah barang-barang yang diproduksi di dalam negeri, terutama di daerah pedesaan; sebagiannya adalah barang-barang impor, tetapi penjualan dan konsumsinya mendinamisasi perekonomian nasional, yang artinya, mendukung konsumsi swasta dan rumah tangga, juga mendukung produksi nasional dan perekonomian nasional, sesuatu yang sangat penting saat ini. Dengan kata lain, langkah-langkah ini, karena bersifat darurat, tampaknya cukup untuk mencegah hilangnya pekerjaan saat ini secara drastis dan, pada saat yang sama, mencoba untuk merangsang permintaan, menghindari semakin bertambahnya pekerjaan yang hilang, yang akan terjadi jika konsumsi turun terlalu banyak.

Selain dukungan langsung kepada keluarga, para pekerja dan perusahaan, Pemerintah berusaha, untuk menghindari penutupan besar-besaran perusahaan-perusahaan ini, memfasilitasi likuiditas perusahaan melalui langkah-langkah untuk mengurangi biaya operasional, terutama keuangan. Moratorium pemenuhan kewajiban yang timbul dari kontrak pemberian kredit termasuk dalam ruang lingkup ini, memungkinkan perusahaan, pengusaha perorangan, organisasi nirlaba dan individu untuk mendapatkan keuntungan dari pengurangan dan penangguhan pembayaran kewajiban terkait dengan kontrak pemberian kredit yang telah dibuat sebelumnya.

Akan tetapi, diakui bahwa perusahaan, dan pemberi kerja lain di sektor swasta, berada dalam situasi keuangan yang mengkhawatirkan, dalam banyak kasus benar-benar mengalami kekurangan modal. Krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi ini berkontribusi pada masalah ini, tetapi juga ada masalah yang sudah ada sebelumnya dalam hal kemampuan untuk menabung dan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian, langkah-langkah dukungan sosial-ekonomi yang diambil oleh Pemerintah VIII selama enam bulan pertama tahun 2020, karena bersifat sementara, mungkin tidak cukup, dalam pemulihan ekonomi, di satu sisi untuk mempertahankan banyak perusahaan di pasar, dan produksi / permintaan barang dan jasa dan pekerjaan, dan di sisi lain memastikan adanya stimulus untuk konsumsi (dan menghindari hilangnya pekerjaan baru).



BAB II: BIDANG-BIDANG YANG MENJADI PRIORITAS UNTUK INTERVENSI DAN LANGKAH-LANGKAH YANG DIUSULKAN

2.1 TUJUAN INTERVENSI: JANGKA PENDEK, JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANG

Setelah langkah-langkah pertama dari dukungan sosial dan ekonomi yang diambil oleh Pemerintah Konstitusi VIII, penting untuk menyadari sekarang bahwa tidak cukup hanya dengan “menutup luka dengan perban”, tetapi perlu mengambil langkah-langkah kebijakan ekonomi dan sosial yang mampu menanggapi masalah konjungtural dan struktural Timor-Leste – seperti dijelaskan di bab sebelumnya.

Oleh karena itu, intervensi harus memiliki dua tahap berbeda: tahap pertama, jawaban untuk jangka waktu (sangat) pendek, segera di paruh kedua tahun 2020, untuk mengurangi dampak dari krisis yang disebabkan oleh COVID-19; dan tahap kedua, dengan langkah-langkah jangka menengah - banyak di antaranya memiliki efek jangka panjang - yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi, dalam jangka waktu 2 tahun (hingga 2022), dan berupaya untuk menanggapi tidak hanya peningkatan kesulitan yang disebabkan oleh pandemi, tetapi juga secara fundamental, masalah (konjungtural dan struktural) yang sudah ada sebelumnya (yaitu kurangnya lapangan kerja) pada ekonomi nasional, dimana jika tidak ada perubahan substantif terkait dengan masa lalu, kita akan beresiko terhadap krisis baru yang mungkin muncul - selain kita terus berada “pada pembangunan” dengan tingkat yang rendah.

Pada tahap pertama, untuk jangka waktu yang sangat pendek, **pada periode pasca pandemi**, tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan sebanyak mungkin pekerjaan yang ada sebelum krisis dan untuk memulihkan pendapatan keluarga, dengan cara mempertahankan pekerjaan dan dukungan langsung kepada warga. Dengan cara ini, diharapkan bisa mempertahankan tingkat konsumsi yang sama (atau, setidaknya, tidak jauh lebih rendah) dari yang ada pada periode sebelum-COVID-19 - faktor penting untuk tidak mengurangi standar hidup penduduk dan mengurangi dampaknya pada resesi ekonomi. Berhubungan dengan hilangnya pekerjaan dan pendapatan, serta kendala di sisi permintaan dan penawaran, tujuannya adalah untuk secara langsung membantu

masyarakat dan perusahaan, untuk pulih dari krisis, dan bukan untuk menambah beban biaya yang harus mereka tanggung.

Pada tahap kedua, dengan mempertimbangkan bantuan langsung yang telah diberikan pada tahap sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai lebih bersifat **jangka menengah**, ditujukan untuk **pemulihan dengan transformasi** ekonomi, untuk menciptakan lapangan kerja baru yang produktif dan layak, untuk realisasi dan pemantapan program sosial investasi negara (pendidikan, kesehatan, perumahan, perlindungan sosial), dan untuk mengubah struktur produktif dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, intervensi-intervensi ini harus dilihat dalam konteks diagnosis ekonomi nasional sebelum COVID-19. Dengan kata lain, - sampai jangka waktu terbatas yang dimaksud (2-2,5 tahun) - perlu juga dipikirkan solusi jangka menengah-panjang, yang berdampak pada keberlanjutan dan bertujuan untuk merespon permasalahan struktural yang teridentifikasi, yaitu dalam hal tatanan produktif nasional dan kesulitan besar dalam menciptakan lapangan kerja produktif minimal, di satu sisi, rendahnya tingkat pendapatan sebagian besar warga negara - yang sebenarnya merupakan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan. Secara khusus, perlu dipikirkan langkah-langkah / program yang menciptakan jumlah lapangan kerja produktif yang cukup besar, yang dihasilkan oleh investasi padat karya daripada padat modal, tetapi, tentu saja, tidak mengabaikan semua jenis investasi.

Oleh karena itu, langkah-langkah yang diusulkan untuk tahap kedua adalah, dalam praktiknya, langkah-langkah jangka menengah, yang (harus) diimplementasikan segera (APBN 2021 dan APBN berikutnya) dan dengan efeknya, selain jangka panjang, dalam jangka pendek dan jangka menengah dan dirancang tepat untuk tujuan ini.

2.2 MITIGASI DAMPAK EKONOMI DAN SOSIAL DARI KRISIS COVID-19: JANGKA PENDEK (2020)

Negara lain boleh berpikir tentang jenis tindakan kebijakan ekonomi dan sosial yang lain. Akan tetapi, mungkin saja paket kebijakan alternatif yang akan diambil ini tidak akan cocok untuk negara kita, tetapi untuk negara yang "ideal" yang memiliki kapasitas lebih besar untuk mengimplementasikan langkah-langkah tersebut. Namun, itu seolah-olah akan membuat negara kita menjadi negara yang lain: negara dengan tingkat perkembangan yang lebih tinggi daripada negara kita saat ini.

Usulan-usulan yang ada bersifat sementara, untuk jangka waktu yang sangat pendek, dengan pertimbangan pertimbangan seperti di bawah ini:

- Dampak yang sebenarnya dari pandemi yang disebabkan oleh COVID-19 masih belum diketahui, tetapi, seperti di belahan dunia lainnya, di Timor Leste juga akan terjadi guncangan pada sisi penawaran dan sisi permintaan: kedua-duanya terpengaruh, dalam hubungan sebab-akibat. **Dampak yang paling signifikan** akan terjadi pada **penurunan pendapatan** dan **lapangan kerja**, serta **konsumsi swasta (dan pada investasi)** keluarga dan perusahaan.
- Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah selama masa Keadaan Darurat, di satu sisi bertujuan, untuk mengurangi kekurangan pendapatan yang dihadapi para entitas pemberi kerja yang terdaftar di Jaminan Sosial (umumnya, entitas di sektor formal ekonomi) dan untuk mempertahankan pekerjaan yang sudah ada sebelumnya; dan, di sisi lain, mengkompensasi sebagian pendapatan yang hilang pada keluarga yang bekerja di sektor informal ekonomi. Dengan demikian, hal tersebut dimaksudkan untuk mengintervensi sisi penawaran / produksi dan sisi permintaan / konsumsi.
- Langkah-langkah yang disebutkan di atas berlaku hingga akhir Juni.

- Setelah masa Keadaan Darurat berakhir, Pemerintah masih dapat mempertahankan beberapa langkah untuk membatasi pergerakan (seperti penutupan / pengawasan perbatasan), untuk mencegah penularan baru, yang berdampak pada perekonomian, terutama pada kegiatan yang berkaitan dengan sektor Pariwisata.
- Kebanyakan dari “permasalahan-permasalahan” pada perekonomian nasional pada dasarnya bersifat struktural, diperparah oleh krisis politik, dan COVID-19 hanya memperburuk keadaan.
- Negara ini masih tetap menggunakan anggaran duodesimal sejak awal tahun. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2020 hanya akan diserahkan ke Parlemen Nasional setelah tanggal 15 September, oleh karena itu, dalam praktiknya, jangka waktu untuk menerapkan langkah-langkah menggunakan APBN 2020 hanya sekitar 2 bulan (November dan Desember).
- Mengingat waktu yang tersedia sangat sedikit, diyakini bahwa **upaya terbesar akan terkonsentrasi pada rancangan dan implementasi langkah-langkah untuk jangka menengah (2021-2022), dengan efek juga dalam jangka panjang.**
- Meskipun demikian, penting untuk mengambil langkah-langkah itu, antara bulan Juli (ketika bantuan sosial ekonomi sementara yang dibuat berakhir) dan Oktober (ketika APBN 2020 sudah diberlakukan), mencegah ekonomi dari stagnasi atau tidak semakin melemah. Secara khusus, sangat penting untuk mempertahankan tingkat konsumsi yang dapat diterima dan mendukung upaya mempertahankan di perusahaan di pasar – dengan resiko dampak terhadap perekonomian menjadi lebih signifikan, dengan pengurangan konsumsi yang lebih besar dan akhirnya pengangguran meningkat.

2.2.1 DUKUNGAN UNTUK KELUARGA DAN PRODUSEN LOKAL: “PAKET SEMBAKO”

Langkah: menjamin “paket Sembako” (makanan dan barang-barang lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti kebersihan) untuk semua keluarga, melalui pembagian *voucher* (di ibu kota kabupaten) atau paket (di daerah-daerah lainnya di dalam negeri).

Tujuan: Tujuan utama yang pertama adalah untuk membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk makanan, juga berkontribusi dalam memerangi kelaparan dan kerentanan terbesar di beberapa daerah termiskin dan paling terpencil di negara ini. Dipercaya bahwa, meskipun mungkin telah terjadi peningkatan budidaya pertanian dalam beberapa bulan terakhir, di satu sisi masih belum ada panen; Di sisi lain, beberapa keluarga bahkan mungkin berada dalam situasi kelaparan.

Tujuan kedua adalah untuk membantu para petani, produsen, dan bahkan pedagang lokal, agar bisa mendorong pasokan lokal, dan memastikan aliran produk.

Penerima dan persyaratan kelayakan: “Paket Sembako” ditujukan untuk semua keluarga di Timor-Leste, secara universal.

Spesifikasi teknis dari langkah ini: “Paket Sembako” ini terdiri dari makanan dan barang-barang lain untuk kenyamanan dan pemenuhan kebutuhan dasar (seperti barang-barang untuk kebersihan), berdasarkan sebuah basis / jumlah per kapita, dengan mempertimbangkan struktur ukuran demografi dan keluarga, untuk memastikan ketersediaan barang yang memadai (dan, dalam hal makanan, menawarkan nutrisi yang diperlukan). Data tentang jumlah kepala keluarga dan dimensinya baru-baru ini dikumpulkan untuk pelaksanaan bantuan keuangan untuk tiap keluarga (100 USD / bulan / rumah tangga), yang memungkinkan untuk menyesuaikan dan mengukur “paket Sembako” dengan tipe rumah tangga.

“Paket Sembako” diberikan dalam bentuk paket atau dalam bentuk voucher, yang dapat ditukar di toko / pusat-pusat perbelanjaan (khusus di ibukota Kabupaten).

Di tempat dimana “paket Sembako” diserahkan dalam bentuk paket, sebagian dari barang-barang yang ada menjadi bagian dari paket itu, harus berupa produk nasional yang dibeli dari petani atau pedagang lokal. Diusulkan, jika memungkinkan, paling sedikit 50% bahan pangan dalam bentuk paket adalah produk nasional; dan bila ini tidak memungkinkan - karena pasokan lokal tidak mencukupi - dibelil dari pedagang lokal.

Di tempat-tempat dimana “paket sembako” diberikan dalam bentuk voucher, perlu dibuat kesepakatan dengan bisnis lokal (toko, pasar) agar voucher dapat ditukar dengan barang-barang yang menjadi bagian dari “paket sembako”.

Implementasi: Implementasi langkah ini harus mengikuti “panduan implementasi” yang dirancang untuk tujuan ini, dan mencakup tahap-tahap berikut:

- 1) Pembuatan “paket sembako”, dengan barang-barang yang diisi dan dalam jumlah yang diperlukan per kapita selama dua bulan;
- 2) Keluarga yang telah teridentifikasi, struktur dan ukurannya (database yang baru-baru ini dibuat berdasarkan ukuran “bantuan keuangan untuk keluarga”) dan “paket sembako” untuk setiap jenis ukuran keluarga;
- 3) Berdasarkan identifikasi keluarga, menghitung jumlah keluarga yang tinggal di setiap Kotamadya dan di kawasan lain di negara ini;
- 4) Di tempat-tempat dimana bantuan yang diberikan berupa paket, membuat kesepakatan dengan produsen lokal (petani, produsen atau pedagang) dengan maksud untuk memperoleh barang untuk diisi di dalam paket;
- 5) Dalam kasus keranjang, membuat perjanjian dengan entitas lain (pemerintah daerah dan lembaga solidaritas sosial) untuk pelaksanaan di lapangan: pengadaan barang untuk diisi di paket, pembuatan paket itu sendiri, dan pembagian ke keluarga. Untuk memfasilitasi dan mendesentralisasi proses implementasi, dan untuk memastikan bahwa paket-paket itu betul-betul sampai ke keluarga, diusulkan agar Pemerintah memberi tunjangan/membiayai Entitas di lapangan, yang lebih dekat dengan warga, sehingga mereka menjangkau fungsi-fungsi tersebut;
- 6) Di tempat-tempat dimana bantuan diberikan dalam bentuk voucher, membuat perjanjian dengan pedagang lokal (toko, pasar) sehingga voucher dapat di tukar dengan barang-barang yang menjadi bagian dari “paket sembako”.

Durasi: paket sembako atau voucher **dibagikan dua kali**, pada bulan November dan Desember

Pembiayaan: Biayai untuk langkah ini berasal dari APBN tahun 2020. Kemungkinan besar bisa mendapatkan bantuan dari donor/mitra pembangunan untuk menutupi biaya operasional.

Biaya: Biaya untuk langkah ini tergantung pada ukuran keluarga dan kesepakatan yang dibuat dengan lembaga/badan yang mendukung pemerintah dalam melaksanakan tindakan tersebut di lapangan. Perkiraan pertama (yang harus direvisi sesuai dengan data tersebut) menunjukkan total biaya sekitar USD 71,5 juta⁵.

⁵ Jadi dihitung: 1,3 juta orang x 25 USD per orang / “paket sembako” x 2 kali = 65 juta USD. Biaya ini akan ditambah 6,5 juta (10%) untuk biaya operasional/pelaksanaan

2.2.2 BANTUAN UNTUK PERUSAHAAN DAN ENTITAS PEMBERI KERJA LAINNYA – SEKTOR SWASTA

2.2.2.1 TUNJANGAN UNTUK MEMBANTU PEMULIHAN EKONOMI

Langkah: Menyediakan **tunjangan uang bulanan** untuk **entitas pemberi kerja** agar tetap beraktivitas secara rutin, dengan syarat mereka mengikuti aturan hukum, terdaftar di jaminan sosial dan dalam sistem perpajakan (meskipun mereka mungkin memiliki hutang). Langkah ini diperluas ke entitas yang aktivitasnya sangat terkait dan bergantung pada sektor pariwisata, meskipun mereka tidak dapat melanjutkan aktivitas formal normal, khususnya hotel/penginapan, biro perjalanan, maskapai penerbangan, dan entitas yang terkait dengan rencana perjalanan wisata (penyelaman, contohnya).

Tujuan: Tujuan dari langkah ini adalah **untuk membantu entitas pemberi kerja** (perusahaan, pengusaha perorangan, pekerja mandiri) **untuk melanjutkan kegiatan ekonomi**, dengan membantu mereka untuk menanggung biaya tetap (upah, sewa, pajak atau lainnya) dan untuk melakukan investasi kecil yang diperlakukan untuk aktivitasnya (seperti perolehan barang untuk dijual kembali atau untuk bahan baku).

Diyakini bahwa, antara bulan Maret dan Juni, tunjangan kerja (dalam jumlah tetap sebesar 60% dari gaji yang dinyatakan ke Jaminan Sosial) membantu memastikan pemeliharaan banyak pekerjaan, dari entitas yang mengalami situasi *lay off*, (penangguhan atau pengurangan aktivitas), pada saat pemberlakuan Keadaan Darurat, dimana aktivitas ekonomi sangat berkurang (di mana perusahaan, termasuk perdagangan dan jasa) hanya beroperasi sebagian, untuk menjaga jarak sosial dan membatasi resiko penularan. Sekarang, tujuannya adalah sebaliknya: untuk mendukung dimulainya kembali aktivitas perusahaan dan pemberi kerja lainnya secara teratur. Banyak dari entitas pemberi-kerja ini akan kemungkinan akan kehilangan modal dan tidak memiliki cukup pendapatan (atau tabungan) yang memungkinkan mereka melanjutkan aktivitas mereka dan memastikan pasokan barang dan jasa serta pekerjaan. Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk memberikan kelegaan kepada perusahaan dan entitas pemberi-kerja, agar mereka dapat melanjutkan aktivitas mereka.

Penerima dan persyaratan kelayakan: tunjangan untuk mendukung pemulihan ekonomi ditujukan pada semua pengusaha yang melakukan kembali kegiatan ekonomi, asalkan mereka terdaftar di Jaminan Sosial dan sistem perpajakan, meskipun mereka mungkin memiliki hutang.

Entitas Pemberi-Kerja yang memiliki hutang pajak atau hutang kontribusi sosial, bisa mendapatkan tunjangan tersebut, tetapi ini tidak membebaskan mereka dari pembayaran hutang itu di kemudian hari.

Volume negócios (faturação declarada em Jun/20, comparativamente à declarada em Jun/19)	custos salariais (trabalhadores e valores declarados à SS em Fev 2020) - inclui o subsídio anual				custos com energia (eletricidade)	novos trabalhadores (inscritos a partir de Agosto)
	Trabalhadores individuais, ou EE até 50 trabalhadores	51 a 100 trabalhadores	101 a 500 trabalhadores	mais de 500 trabalhadores		
perda superior a 50%	40% salarios declarados	50% salarios declarados	55% salarios declarados	60% salarios declarados	4% custos declarados ao MF	+ 2% no apoio aos custos salariais destes trabalhadores
perda entre 20% e 50%	20% salarios declarados	30% salarios declarados	35% salarios declarados	40% salarios declarados	3% custos declarados ao MF	
perda inferior a 20%	5% salarios declarados	15% salarios declarados	20% salarios declarados	25% salarios declarados	sem apoio	
ganhos volume negócios	sem apoio	sem apoio	sem apoio	sem apoio	sem apoio	

Tindakan ini **diperluas ke entitas yang aktivitasnya sangat terkait dan bergantung pada sektor pariwisata**, meskipun mereka tidak dapat melanjutkan aktivitas formal normal, khususnya hotel/penginapan, biro perjalanan, maskapai penerbangan, dan entitas yang terkait dengan rencana perjalanan wisata (penyelaman, contohnya).

Espesifikasi teknis dari langkah ini: Tunjangan ini memiliki nilai yang dapat dihitung berdasarkan pertimbangan dua kriteria: hilangnya volume bisnis dan jumlah pekerja:

Kerugian volume bisnis dihitung dengan membandingkan faktor yang diumumkan ke Kementerian Keuangan pada bulan Juni tahun 2020, jika dibandingkan dengan pengumuman pada periode yang sama di tahun sebelumnya.

Tunjangan akan diberikan **langsung kepada entitas pemberi kerja**, setiap bulan dari bulan Agustus sampai Desember (pada akhir setiap bulan), dengan syarat bahwa tidak ada pemberhentian pekerja selama jangka waktu penerapan aturan tersebut dan dalam dua bulan berikutnya (hingga bulan Februari tahun 2021), dengan pengecualian pemecatan karena alasan yang adil (dengan bukti yang tepat dari badan Pengawasan Ketenagakerjaan) dan atas permintaan pekerja. Pada bagian yang berkaitan dengan bantuan untuk biaya upah, jumlah yang diberikan adalah untuk membantu perusahaan membayar upah, tetapi upah-upah inilah yang menjadi dasar iuran dan pajak.

Entitas pemberi kerja/pekerja individu tetap memiliki kewajiban untuk membuat pernyataan bulanan ke Jaminan Sosial, dan biasanya harus menyatakan jumlah yang biasa dibayarkan kepada pekerja sebagai gaji, yang menjadi dasar iuran.

Dasar penghitungan komponen tunjangan terkait dengan dukungan pembayaran biaya gaji adalah pernyataan upah yang diserahkan ke Jaminan Sosial pada bulan february tahun 2020, dan pengusaha harus mengumumkan tingkatan gaji pekerja baru yang dipekerjakan mulai dari bulan Maret 2020.

Jika entitas pemberi kerja menciptakan pekerjaan dalam periode di mana langkah tersebut berlaku (Agustus sampai Desember), atau dengan kata lain, mempekerjakan pekerja baru, akan menerima bantuan tambahan 2% dalam pembayaran upah pekerja tersebut.

Pelaksanaan: Dengan pertimbangan bahwa APBN tahun 2020 seharusnya hanya berlaku pada akhir bulan Oktober/awal November, dan bahwa tunjangan saat ini untuk membantu perusahaan yang menanggung atau mengurangi aktivitasnya berakhir pada bulan Juni, boleh dikatakan bahwa menunggu selama 4 bulan tanpa bantuan apapun dapat berarti penutupan perusahaan, pengurangan produksi/pasokan yang lebih besar dan pemecatan pekerja, karena banyak entitas - terutama entitas-entitas nasional, dengan tingkat tabungan yang lebih rendah - tidak memiliki pendapatan yang memungkinkan mereka untuk tetap bertahan di pasar dan membayar upah dan biaya tetap lainnya.

Dengan demikian, diusulkan agar **langkah ini dilaksanakan dengan dukungan dan melalui bank-bank komersil**, yang dengannya Pemerintah akan membuat perjanjian. Dengan cara ini, bank-bank ini akan memberikan tunjangan ini, dalam bentuk pinjaman bulanan yang tidak akan dikembalikan (tanpa bunga) kepada entitas pemohon, dengan jaminan bahwa Pemerintah akan memberi kompensasi kepada bank segera setelah APBN 2020 diberlakukan.

Analisis permohonan dan penghitungan besaran tunjangan dapat dilakukan oleh bank itu sendiri, atau oleh entitas pemerintah. Jika solusi yang terakhir yang dipilih, disarankan untuk membentuk tim yang mencakup INSS, MF dan SEFOPE, agar prosesnya lebih mudah dan lebih cepat.

Durasi: tunjangan ini bersifat bulanan dan untuk kurun waktu 5 bulan (bulan Agustus hingga bulan Desember).

Pendanaan: dana untuk membiayai langkah ini berasal dari APBN 2020.

Biaya: dana untuk membiayai langkah ini tergantung pada berapa besarnya volume bisnis yang hilang pada entitas, dan juga pada besarnya jumlah permohonan yang diajukan. Namun, dan dalam perkiraan yang paling tinggi, langkah tersebut dapat menghabiskan biaya paling banyak sekitar USD 35 juta⁶.

Nota: Perlu untuk menganalisa, dengan Kementerian Keuangan (yang mungkin dimintai pendapat hukum), legalitas dari prosedur yang diusulkan, yang akan melibatkan pendanaan anggaran, tetapi hanya melakukan pengeluaran setelah APBN tahun 2020 mulai berlaku, meskipun ada kesepakatan dengan Bank sehingga langkah itu bisa diterapkan sekarang. Selanjutnya, perlu untuk menegosiasikan prosedur dengan bank dan memeriksa ketersediaan bank bank itu.

2.2.2.2 PEMBEBASAN DARI KONTRIBUSI UNTUK BAGIAN YANG MENJADI TANGGUNGAN ENTITAS PEMBERI-KERJA

Langkah: mempertahankan pembebasan iuran dari bagian pembyaran iuran untuk jaminan sosial yang **menjadi tanggungan entitas pemberi-kerja** (6%), selama 6 bulan, dengan hilangnya pendapatan Jaminan Sosial yang dikompensasi oleh Negara.

(UNDP, 1990, "Human Development Report 1990: Concept and Measurement of Human Development". New York. <http://www.hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1990>)

Tujuan: Untuk membantu entitas pemberi kerja dalam menanggung biaya-biaya tetap, meningkatkan likuiditas mereka, dengan menghilangkan / membebaskan mereka dari biaya untuk pembayaran kontribusi sosial yang menjadi tanggung-jawab mereka.

Penerima dan persyaratan kelayakan: Langkah ini ditujukan untuk **semua entitas pemberi kerja dan pekerja individu yang terdaftar di jaminan sosial** (wajib atau pilihan) - hingga akhir periode pendaftaran luar biasa yang dibuat berdasarkan Keputusan Undang-Undang n°16 / 2020, dari 30 April, yaitu, hingga 27 Mei - asalkan situasi mereka diatur (berlaku mulai Mei 2020)⁷, dan asalkan mereka berada dalam salah satu situasi berikut: atau melanjutkan aktivitas reguler atau, jika tidak melakukannya, menjadi entitas yang ada hubungannya dan bergantung pada sektor pariwisata (hotel / penginapan, biro perjalanan, maskapai penerbangan, dan entitas yang terkait dengan rencana perjalanan wisata) yang, karena sifat aktivitasnya, tidak dapat dilanjutkan dengan normal.

Spesifikasi teknis dari langkah ini: Langkah ini tidak mengurangi kewajiban entitas pemberi kerja untuk terus mengirimkan Laporan tentang Upah setiap bulan, dan Panduan Pembayaran yang dikeluarkan hanya akan mengacu pada pajak iuran yang ditanggung oleh pekerja (4%), dan membebaskan entitas pemberi kerja dari kontribusinya sendiri (6%).

Dalam kasus pekerja yang terdaftar dalam keanggotaan opsional - termasuk pekerja layanan rumah tangga, pekerja mandiri, perusahaan perorangan dan manajer serta administrator - pengecualian iuran hanya 6%, dan tagihan untuk kontribusi sosial sebesar 4% akan tetap dikenakan.

Implementasi: Implementasi langkah bersifat segera oleh INSS, melalui informasi yang terdaftar di Sistem Informasi Jaminan Sosial.

Jangka Waktu: Pengecualian berlaku selama 6 bulan, dari Juli hingga Desember 2020.

Pendanaan: Dana untuk membiayai langkah ini berasal APBN tahun 2020, yang

⁶ Dihitung dengan nilai maksimum yang diramalkan dalam tabel diatas, untuk sekitar 3 ribu entitas yang memenuhi syarat (terdaftar di Jaminan Sosial dalam sistem pajak): (40 ribu pekerja x 252 USD (nilai gaji rata-rata) x 62% x 5 bulan) + (3 ribu entitas x 6 ribu USD (jumlah rata-rata yang dibayarkan untuk listrik di perusahaan besar) x 4% x 5 bulan)

⁷ Sesuai dengan situasi yang diatur, dipahami sebagai entitas yang secara teknis tidak berhutang pada jaminan sosial, baik karena tidak memiliki tunggakan, atau karena telah menyepakati perjanjian cicilan dengan Jaminan Sosial.

mengkompensasi Anggaran Jaminan Sosial (OSS, Orçamento de Segurança Social), dengan mentransfer jumlah keseluruhan pada bulan November, setelah berlakunya APBN tahun 2020.

Biaya: Biaya maksimum untuk langkah ini berjumlah sekitar 3,6 juta USD⁸

2.2.2.3 BANTUAN KHUSUS UNTUK PEKERJA SEKTOR INFORMAL

Langkah: Memberikan subsidi luar biasa, setara dengan 60% dari nilai insiden tingkat pertama keanggotaan opsional ($60\% \times 60 \text{ USD} = 36 \text{ USD}$), selama 3 bulan (Oktober hingga Desember), **kepada pekerja mandiri dan pekerja sektor informal** yang belum terdaftar di Jaminan Sosial, dan yang mendaftar antara Juli dan September 2020, dengan syarat mereka mempertahankan iuran jaminan sosial setidaknya selama 3 bulan lagi, setelah berakhirnya periode pemberian (yaitu hingga Maret 2021).

Tujuan: Untuk mendukung pekerja yang berada dalam situasi tanpa perlindungan sosial, sementara memungkinkan formalisasi pekerja ini, meningkatkan kapasitas masa depan mereka untuk menghadapi resiko.

Penerima dan persyaratan kelayakan: Langkah ini ditujukan untuk semua pekerja mandiri dan pekerja sektor informal yang mendaftar ke jaminan sosial antara Juli dan September, dengan syarat mereka mempertahankan kontribusi sosial setidaknya selama tiga bulan, setelah masa pemberian subsidi berakhir, yaitu sampai Maret 2021.

Spesifikasi teknis pengukuran: Subsidi ini memiliki nilai 60% dari nilai dasar kejadian iuran sesuai dengan langkah pertama keanggotaan opsional dalam rezim jaminan sosial iuran; Artinya, subsidi memiliki nilai $36 \text{ USD} = 60 \text{ USD}$ (nilai tingkat pertama) $\times 60\%$.

Selama periode pemberian subsidi (3 bulan, dari Oktober hingga Desember 2020), penerima manfaat memberikan kontribusi pengurangan tingkat iuran sebesar 4% dari nilai langkah pertama (yaitu $4\% \times 60 \text{ USD} = 2,4 \text{ USD}$), jadi nilai bersihnya adalah 33,6 USD (36 USD dari hibah - 2,4 USD kontribusi sosial). Dalam 3 bulan berikutnya (Januari hingga Maret 2021) --- di mana mereka diwajibkan untuk mempertahankan partisipasi dan kontribusi sosial --- penerima manfaat berkontribusi pada tingkat kontribusi normal pada nilai langkah pertama (yaitu $10\% \times 60 \text{ USD} = 6 \text{ USD}$).

Implementasi: Langkah tersebut diimplementasikan oleh INSS.

Jangka Waktu: Langkah ini berlangsung selama 3 bulan (Oktober hingga Desember 2020).

Pendanaan: Pendanaan untuk langkah ini berasal dari APBN tahun 2020.

2.3 PEMULIHAN EKONOMI PASCA COVID-19: JANGKA MENENGAH DAN PANJANG (2021-2022) DAN TAHUN-TAHUN BERIKUTNYA

“Tidak ada demokrasi dalam kelaparan, tidak ada pembangunan dalam kemiskinan, atau keadilan dalam kesenjangan” Paus Francisco

(In <https://agencia.ecclesia.pt/portal/vaticano-nao-ha-democracia-com-fome-diz-o-papa>)

“Dengan menggunakan data statistik nasional dan internasional, kami menyimpulkan bahwa Timor-Leste menghadapi masalah serius dalam hal pangan, kesehatan dan pendidikan, dengan masalah kuantitas dan kualitas di semua dimensi ini.”

(Di Parlemen Nasional Timor-Leste, Opini Komisi Ekonomi dan Pembangunan tentang PPL No. 9/2019 - OGE2020 (DEC19), halaman 6 “Ringkasan dan Kesimpulan”)

⁸ Jadi dihitung: 40 ribu pekerja \times 252 USD (gaji rata-rata) \times 6% \times 6 bulan.

Pandemi COVID-19 mengungkap kelemahan ekonomi dunia dan ekonomi nasional, mempertanyakan model pembangunan ekonomi dan sosial, sekaligus menguji keberadaan kapasitas nasional untuk mengantisipasi dan mengelola resiko yang begitu besar. Karena merupakan ancaman kesehatan yang serius dengan efek buruk pada ekonomi dunia dan ekonomi nasional, COVID-19 membutuhkan perubahan perilaku dan cara hidup masyarakat dan pemimpinnya, menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan sumber daya yang ada tersedia untuk negara dinilai secara efektif. Ini kesempatan yang harus kita manfaatkan untuk menumbuhkan ekonomi guna menciptakan lapangan kerja yang layak dan produktif, sehingga kesejahteraan merangkul semua orang. Dan kemajuan hanya mungkin dicapai dengan produktivitas yang lebih tinggi, infrastruktur yang lebih baik, modernisasi proses, dan sumber daya yang lebih berkualitas dan siap untuk tantangan berikutnya.

Sejumlah negara terus merefleksikan konsekuensi masa depan krisis ekonomi yang melanda semua negara, mencari cara untuk mengatasinya. Banyak yang sampai pada kesimpulan bahwa kehidupan pasca-COVID-19 tidak akan pernah sama seperti di masa lalu. Para pemimpin dari negara kaya dan miskin menggunakan kesempatan ini untuk mencoba “mengoreksi jalan” masa lalu agar memiliki masa depan yang lebih baik dan tangguh serta mempersiapkan ekonominya (dan warganya) untuk menghadapi krisis di masa depan. Oleh karena itu, tidak ada gunanya memikirkan “mengubah beberapa hal saja agar semuanya tetap sama”.

Dalam jangka pendek, Negara akan memiliki peran yang menentukan dalam meletakkan dasar bagi pemulihan ekonomi dan perlindungan lapangan kerja, pendapatan dan perusahaan, berupaya untuk mencegah resesi berkepanjangan ini, yang melanda negara kita, menyebabkan ekonomi jatuh ke dalam depresi dimana akan terjadi stagnasi yang meluas dalam kegiatan dan jasa ekonomi. Negara akan terus membantu perusahaan dan keluarga yang mengalami kesulitan.

Langkah-langkah kebijakan publik yang diusulkan untuk paruh kedua tahun 2020, dengan tujuan untuk mengurangi dampak krisis dalam jangka waktu yang sangat pendek, serta yang diusulkan untuk diikuti yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi negara kita hingga berakhirnya periode legislatif Pemerintah Konstitusi VIII, **itu hanya masuk akal jika itu melakukan langkah pertama untuk masa depan kita** sebagai sebuah negara, dengan ekonomi yang lebih inklusif dan tangguh daripada yang kita miliki sampai awal COVID-19.

Ekonomi yang lebih inklusif dan lebih tangguh berdasarkan penggunaan sumber daya negara secara efektif adalah kunci untuk pertumbuhan yang lebih adil, sejahtera, dan abadi. Hanya dengan begitu kita bisa mengurangi angka kemiskinan.

Untuk tujuan ini, beberapa garis mendasar dari apa yang diperlukan untuk membangun ekonomi kita di masa depan dan upaya yang harus dilakukan negara dalam waktu dekat telah diuraikan.

Diagnosis yang dibuat untuk Rencana Pemulihan Ekonomi ini dengan jelas menunjukkan perlunya menghilangkan beberapa hambatan yang menghambat dan membatasi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara, dan memilih pembangunan manusia untuk diversifikasi ekonomi yang cepat.

Pembangunan manusia harus menjadi pusat dari kebijakan ekonomi Pemerintah VIII; Definisi sederhananya, menurut United Nations Development Programme (UNDP), adalah sebagai berikut:

“Pembangunan manusia adalah proses memperluas pilihan rakyat (...) sehingga mereka menjalani hidup panjang dan sehat, memperoleh pengetahuan dan memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk standar hidup yang layak. Jika pilihan-pilihan penting ini tidak tersedia, banyak kesempatan lain akan tetap tidak dapat diakses.”

Namun pembangunan manusia tidak berhenti di situ. Pilihan tambahan, yang sangat dihargai oleh banyak orang, berkisar dari kebebasan politik, ekonomi dan sosial hingga peluang untuk menjadi kreatif dan produktif serta menikmati harga diri dan jaminan hak asasi manusia.

Pembangunan manusia memiliki dua sisi: pembentukan kapasitas manusia --- seperti meningkatkan kesehatan, pengetahuan dan keterampilan - dan penggunaan kapasitas oleh orang-orang yang memperolehnya - untuk waktu luang, tujuan produktif atau untuk aktif dalam hal-hala kebudayaan, sosial dan politis. Jika tingkat perkembangan manusia tidak menyeimbangkan kedua sisi tersebut, maka dapat mengakibatkan frustrasi manusia yang cukup besar.

*Menurut konsep pembangunan manusia ini, pendapatan jelas merupakan pilihan yang ingin dimiliki masyarakat, meskipun penting. Tapi itu bukan keseluruhan hidup mereka. Oleh karena itu, pembangunan harus lebih dari sekedar perluasan pendapatan dan kekayaan. **Fokusnya harus pada orang.***

(UNDP, 1990, "Laporan Pembangunan Manusia 1990: Konsep dan Pengukuran Pembangunan Manusia". New York. <http://www.hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1990>)

Seperti yang dikatakan kutipan di atas, "*fokus [pembangunan] harus ditukan pada orang-orang*" karena, seperti apa yang disebutkan juga dalam kalimat pertama dari Laporan Pembangunan Manusia pertama, tahun 1990, itu "*orang-orang adalah kekayaan sejati Bangsa*".

Konsep "pembangunan manusia" bukan sebatas "pertumbuhan ekonomi" dan menyangkut perluasan kemampuan (kebebasan) orang-orang untuk memiliki akses ke standar hidup yang layak (pendapatan), pengetahuan (pendidikan) dan untuk hidup dengan umur yang lebih panjang dan sehat (sehat). Ini bukan hanya perihal memiliki pendapatan, tetapi juga memiliki akses ke barang dan jasa yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, makanan / nutrisi, partisipasi sosial dan budaya. Pendidikan dan kesehatan adalah dua pilar utama pembangunan sumber daya manusia, yang penting untuk berfungsinya masyarakat modern dan untuk pembangunan perekonomian negara dalam jangka panjang.

Masa depan Timor-Leste sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat adalah negara di mana penduduknya memiliki akses ke pendidikan yang lebih tinggi, perawatan kesehatan yang lebih baik dan sistem kesehatan yang lebih baik dan dengan kesejahteraan yang lebih baik secara materi, yaitu dalam bidang kuantitas dan kualitas makanan yang tersedia. Semua ini membutuhkan pekerjaan yang lebih produktif dan dengan gaji yang lebih baik.

Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah prinsip-prinsip baru di Timor-Leste; prinsip-prinsip ini selalu hadir, dalam perhatian dari hampir semua program pemerintah dan dalam tujuan yang dicanangkan dari anggaran-anggaran tahunan yang diajukan.

Tapi menyatakan prinsip saja tidak cukup. Penting sekali untuk mengimplementasikannya, **melalui alokasi sumber daya yang dibuat setiap tahun dalam APBN**. Di sinilah letak kesulitan terbesar: beralih dari pernyataan prinsip ke alokasi nyata sumber daya Negara yang menjadikannya konkret dalam kehidupan warga negara kita.

Secara konkrit, APBN tahunan harus menyediakan alokasi sumber daya yang efektif yang mencakup lebih banyak sumber daya untuk pendidikan, kesehatan dan pangan / gizi. Aturan praktisnya adalah menetapkan sebagai tujuan alokasi sumber daya baru pengandaan pengeluaran di daerah-daerah ini dalam periode 5 tahun, dimulai paling awal 2021. Inilah sebenarnya yang menjadi rekomendasi dari Komisi Ekonomi dan Pembangunan (Komisi D) Parlemen Nasional dalam laporannya tentang RUU Anggaran Tahun 2020 yang disampaikan Pemerintah pada Desember 2019:

“Oleh karena itu, disarankan ada keseimbangan kembali antara pengeluaran untuk modal fisik dan modal manusia, yang secara signifikan meningkat selama masa periode legislatif ini, sumber daya yang didedikasikan untuk meningkatkan modal manusia. Tujuan yang diusulkan mungkin akan mencapai sasaran dengan sekitar dua kali lipat dari apa yang didedikasikan sekarang untuk tujuan itu.”

(Di Parlemen Nasional Timor Leste Opini Komisi untuk Ekonomi dan Pembangunan mengenai PPL NO 9/2019-APBN2020(Des19), halaman 6 “Ringkasan dan Kesimpulan”)

Negara memilih perekonomian yang sangat terbuka untuk pasar, oleh karena itu Negara harus mendukung pengembangan dan konsolidasi sektor swasta nasional. Ini tidak berarti bahwa Negara berpartisipasi secara langsung dalam produksi - kecuali jika ada “kegagalan pasar” - tetapi terutama dalam menciptakan kondisi yang merangkai dan memandu pembangunan ekonomi dan sosial negara.

Dukungan ini mencakup kebutuhan untuk mengklarifikasi dan membuat undang-undang secepat mungkin tentang “UU Pertanahan”, yang telah menjadi hambatan bagi investasi produktif di negara oleh sektor swasta. Karena menghambat perkembangan kegiatan ekonomi, khususnya investasi swasta, maka fungsi sistem peradilan perlu ditinjau ulang secara menyeluruh, termasuk yang menyangkut kerangka hukum bagi berfungsinya perusahaan (transparansi pelayanan publik, intoleransi terhadap korupsi, mekanisme pembiayaan melalui akses ke kredit, peraturan tentang kebangkrutan dan musyawarah tentang sengketa dan arbitrase komersial, karena pengadilan hampir hanya menangani kasus pidana saja).

Negara sebagai penanggung jawab utama untuk menciptakan lingkungan hukum yang sesuai untuk investasi.



Karena bidang-bidang hukum inilah Bank Dunia dalam publikasinya “Doing Business 2020” memberi Timor-Leste peringkat terburuk. Ini menjadi disinsentif yang kuat bagi investasi swasta, baik nasional, terutama, internasional, yang penting bagi struktur produktif kita untuk mendapatkan “volume” dan kapasitas teknis dan manajemen.

Pembangunan negara membutuhkan sektor swasta yang kuat meskipun didasarkan pada perusahaan berskala mikro dan kecil / menengah seperti yang ditunjukkan oleh statistik yang tersedia (SERVE, Jaminan Sosial). Dukungan untuk perusahaan perdagangan, industri dan jasa ini terutama tidak langsung dan hanya bisa bersifat langsung, melalui keterlibatan Pemerintah dalam produksi, tetapi sebaiknya dengan maksud untuk meningkatkan sektor-sektor produksi tertentu, dan setelah itu, Pemerintah harus segera mengakhiri keterlibatannya.

Seperti disebutkan, dukungan tidak langsung melibatkan penciptaan lingkungan bisnis yang mendukung kemunculan dan konsolidasi perusahaan, baik perusahaan nasional maupun luar negeri. Termasuk disini persiapan dan publikasi undang-undang perpajakan yang sesuai - reformasi perpajakan sejalan dengan prinsip-prinsip insentif bisnis yang lebih besar dan keadilan sosial yang lebih besar -, penciptaan sistem pendidikan (termasuk pelatihan kejuruan) yang memungkinkan munculnya pekerja yang memiliki kesiapan teknis dan keterampilan dengan etos kerja yang sesuai, dan pembuatan jaringan jalan yang berkualitas (sebagian sudah selesai atau dalam tahap penyelesaian secepatnya).

Selain kualitas sumber daya manusia, hal lain yang fundamental untuk mendorong investasi, nasional atau asing adalah kerangka hukum yang merangkum hal tersebut. Salah satu batasan utama investasi dan yang harus diubah sesegera mungkin adalah definisi peraturan yang tepat tentang kebangkrutan perusahaan, tentang perpaduan perusahaan dan tentang segala sesuatu yang menghambat akses mereka ke kredit, aspek yang sangat penting bagi perusahaan nasional. Perusahaan nasional adalah yang terutama dirugikan oleh batas kredit yang dikenakan oleh bank yang beroperasi di Timor-Leste, yang salah satu yang paling penting adalah hampir tidak adanya kemungkinan untuk memberikan jaminan nyata sampai semua undang-undang yang terkait dengan "UU Pertanahan" dan implementasinya yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Parlemen Nasional.

Di beberapa bidang, pada tahap awal, Negara harus mendorong, mendukung dan mempromosikan produksi nasional, dan juga memfasilitasi aliran produk-produknya ke pasar, dengan maksud untuk menggantikan beberapa barang impor dan membuat negara tidak terlalu tergantung pada barang (terutama makanan) yang diproduksi di luar negeri dan seringkali kualitasnya tidak diketahui.

Pilihan kebijakan ekonomi yang disarankan di sini didasarkan pada kebutuhan utama untuk menciptakan lapangan kerja baru, upah yang lebih baik dan perlindungan sosial yang lebih besar bagi pekerja dan, oleh karena itu, produktivitas yang lebih tinggi, karena kurangnya pekerjaan yang layak adalah masalah utama masyarakat Timor-Leste, dengan segala akibatnya berupa rendahnya tingkat pembangunan manusia. Ini juga memerlukan investasi publik dalam memperluas cakupan sistem perlindungan sosial dan peningkatan upaya untuk memformalkan sektor informal.

Negara terus memiliki peran mendasar dalam pembangunan ekonomi dan sosial bangsa, tidak hanya melalui dukungan, baik langsung maupun tidak langsung, kepada sektor swasta, tetapi juga untuk fungsi esensial dalam menyediakan layanan publik yang lebih baik dan lebih komprehensif - terutama dalam Sistem Kesehatan Nasional, sistem pendidikan pemerintah dan sistem perlindungan sosial.

Krisis saat ini yang disebabkan oleh COVID-19 telah menunjukkan pentingnya memiliki layanan-layanan tersebut dan, secara umum, peran Negara dalam perekonomian dan masyarakat sehingga penduduk lebih terlindungi (termasuk secara klinis) dan lebih tahan terhadap jenis "Guncangan" seperti ini.

Peran negara dalam menghadapi masalah struktural lain perekonomian nasional masih tetap esensial, yaitu ketergantungan yang sangat besar pada pendapatan dari minyak. Cara alternatif pembiayaan ekonomi dan pengeluaran publik (dan investasi) harus dicari, seperti melalui perbaikan sistem administrasi perpajakan dan pembangunan Kode Pajak / skema perpajakan yang adil, redistributif, dan mendorong pelaksanaan kewarganegaraan. Perlu dicatat bahwa individu dan perusahaan hanya bisa membayar pajak jika menerima dukungan dan layanan yang berkualitas sebagai gantinya.

Lebih dari sekedar sebuah "Negara yang lebih besar", Negara Timor terutama perlu menjadi "Negara yang lebih baik". Oleh karena itu, Negara harus menegaskan dirinya sendiri untuk **kualitas layanan** yang diberikan kepada penduduk dan bukan untuk **jumlah orang** yang berada di bawah kendalinya.

Penyesuaian prioritas dalam jangka menengah dan panjang ini sejalan dengan keprihatinan yang disoroti untuk jangka pendek: memastikan pekerjaan yang layak dan bergaji minimal sehingga keluarga dapat bangkit dari kemiskinan dan memenuhi kebutuhan fisik mereka (pangan dalam jumlah dan kualitas dan kesehatan) dan intelektual (pendidikan, dalam arti luas).

Pembangunan manusia suatu negara membutuhkan, antara lain, intervensi yang sesuai di bidang yang dijelaskan dalam poin-poin berikut. **Penjadwalan waktu** yang efektif untuk **langkah-langkah** yang akan diambil terutama **tergantung pada kemampuan** Pemerintah **untuk mengimplementasinya** dan **ketersediaan keuangan** untuk melakukannya. Kriteria mendasar untuk memilih langkah-langkah haruslah berdasarkan **dampaknya dalam menciptakan pekerjaan yang “produktif dan layak”**.

Langkah-langkah yang akan diambil juga harus mempertimbangkan dua aspek penting lain dari “pembangunan manusia”: keberlanjutan dan kesetaraan. Dengan kata lain, penting bahwa program dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan tidak meninggalkan siapa pun di belakang, memiliki hasil yang bertahan lama untuk sepanjang waktu, dan tidak memberikan resiko kepada generasi mendatang.

2.3.1 SEKTOR-SEKTOR EKONOMI

Stimulasi produksi nasional, khususnya produksi industri, harus menjadi perhatian permanen, dalam logika melakukan “penggantian impor” untuk beberapa produk, meski terbatas. Dalam jangka menengah, penggantian semacam itu tidak mungkin dilakukan untuk sebagian besar produk, karena kebanyakan dari produk-produk itu, agar dapat bertahan, memerlukan skala produksi yang berada di luar jangkauan pasar nasional. Dalam beberapa kasus, “penggantian produk-produk impor” ini akan memerlukan, karena alasan skala produksi, penggunaan sebagian produksi untuk ekspor - yang tidak akan mudah dalam konteks Asia Tenggara mengingat adanya ekonomi-ekonomi yang jauh lebih besar daripada Timor-Leste dan proses industrialisasi yang jauh lebih maju dari negara kita seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, Singapura dan lain-lain.

Kebijakan untuk mengganti (beberapa) barang impor, seperti yang disebutkan diatas mungkin memerlukan, seperti dalam kasus lain dimana strategi ini digunakan pada tahap awal pembangunan (yaitu di negara-negara ‘keajaiban asia’ – Korea, Taiwan, Malaysia, misalnya), beberapa perlindungan dari “*industri baru/infant industries*”(industri yang baru didirikan) melalui hambatan (bea cukai atau lainnya) yang melindungi mereka dari persaingan dengan produk (yang sampai saat itu) di impor, dan yang pengantiannya diupayakan.

Dalam kasus Timor-Leste, perlindungan ini semakin diperlukan karena secara geografis negara ini terletak di suatu kawasan dengan beberapa negara, yang karena karakteristiknya – yaitu besarnya pasar domestik dan berbagai kualifikasinya – akan selalu cenderung menjadi “elemen penyerap” (sebagaimana nol dalam perkalian, membatalkan hasil akhir) dari proses pembangunan negara kita, ketika bersaing di pasar nasional dengan produksi nasional.

Perusahaan nasional sangat terbatas dalam kapasitas organisasi, sumber daya manusia dan keuangan. Ini akan membutuhkan kerjasama yang erat antara sektor swasta (aksi nasional atau asing di antara kita), Negara dan sektor perbankan.

Negara akan bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi investasi (modal manusia, infrastruktur, kerangka hukum, kemungkinan kolaborasi dengan sektor swasta untuk mendirikan beberapa perusahaan).

Sektor swasta, yang harus menjadi pemain utama dalam “strategi substitusi impor (terbatas)” ini, harus membekali dirinya dengan sarana untuk meluncurkan perusahaannya, yakni memiliki kemampuan finansial dan manajemen. Keduanya sangat langka di antara kita dan

ini membutuhkan keterbukaan yang besar untuk berhubungan dengan modal asing.

Yang terakhir, sektor perbankan, dengan dukungan Negara, akan bertanggung jawab untuk menyediakan sarana keuangan yang diperlukan yang ada, tetapi tidak dimobilisasi karena para pengusaha tidak dapat mempresentasikan proyek dan jaminan yang menjadi kewajibannya. Di sisi lain, cukup banyak perusahaan yang belum memiliki akuntansi terorganisir dan hal ini juga menjadi kendala dalam pemberian kredit bank kepada sektor swasta.

Bantuan yang diberikan Negara harus dalam menentukan kerangka hukum yang sesuai dan menetapkan, dalam kemitraan dengan sektor perbankan dan sektor swasta, kondisi pembiayaan yang menarik dalam hal volume kredit dan kondisi pinjaman (volume, suku bunga, masa tenggang/grace period).

Dukungan-dukungan ini, yang akan dinegosiasikan antara para pihak, sangat penting dalam fase pemulihan ekonomi ini, untuk memberikan kondisi minimum ke banyak perusahaan untuk bertahan dalam krisis ekonomi saat ini, dengan resiko bahwa, seperti yang telah diketahui di sebagian besar negara, banyak dari perusahaan-perusahaan ini akan tutup selamanya dari pasar dengan semua konsekuensi dari produksi yang berkurang dan, terutama, lapangan kerja – yang akan menyebabkan krisis sosial yang mendalam. Dalam arti tertentu, hampir dapat dikatakan bahwa pilihan pada saat ini adalah antara membelanjakan sedikit lebih banyak sumber daya sekarang dan mempertahankan stabilitas sosial atau tidak membelanjakannya dan menghadapi krisis sosial yang berkepanjangan dalam waktu dekat.

Persyaratan untuk dukungan tersebut harus menyediakan jangka waktu pinjaman sekitar 4-5 tahun, dengan minimal 1 tahun masa tenggang awal. Tingkat suku bunga, untuk dinegosiasikan dengan bank, dapat mengacu pada LIBOR selama 6 bulan ditambah sekitar 2-3 persen. Bank harus diberi kompensasi atas upaya keuangan dengan pinjaman tersebut dan penyediaan fasilitas fiskal yang sesuai.

Pada saat yang sama, dan untuk mendukung inisiatif untuk meningkatkan perekonomian negara, kampanye untuk mendorong **Promosi Produksi Nasional** harus dilakukan sebagai cara untuk meningkatkan konsumsi produk yang diproduksi di Timor-Leste (apapun sifat atau sektornya). Menghargai dan mempromosikan produksi nasional harus menjadi tujuan kampanye ini, yang bertujuan untuk menambah nilai dan memberikan relevansi dan keunggulan bagi produksi nasional. Dengan mengkonsumsi produk nasional, kita akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang lebih besar, serta mendukung petani, peternak, pengrajin, dll. Dan, seperti yang sudah disebutkan, untuk mengurangi volume impor, kita akan menanamkan modal pada produk nasional yang berkualitas unggul.

Untuk alasan ini, **sangatlah penting untuk membangun kerjasama yang kuat antara semua produsen nasional** (dan industri nasional yang sangat sedikit) untuk mendorong konsumsi yang lebih besar akan produk yang diproduksi di Timor-Leste, sehingga menjadi pendorong ekonomi yang penting bagi pembangunan bangsa.

Promosi produksi nasional harus menjadi salah satu fokus untuk pemulihan ekonomi negara, yang akan membawa beberapa keuntungan utama: peningkatan harga produksi lokal, peningkatan rasa dan kebanggaan nasional seluruh rakyat Timor-Leste, perubahan kebiasaan konsumsi ("**Buatan Timor-Leste**" / "**Produk Kita**"), meningkatkan ekonomi lokal dan agribisnis (pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan tangan, dll.) mengurangi ketergantungan luar negeri, dengan mengurangi volume impor, peningkatan kapasitas produksi perusahaan lokal, produk lokal yang lebih berkualitas, harga yang lebih kompetitif (dibandingkan dengan yang diimpor), peningkatan infrastruktur lokal (produksi dan distribusi), pelatihan sumber daya manusia, pengembangan masyarakat lokal terutama di luar Dili), meningkatkan proses produksi dan irigasi, meningkatkan taraf hidup produsen nasional.

Lebih memilih apa yang menjadi milik kita **sangat penting bagi produksi nasional untuk mendapatkan relevansi yang lebih dan lebih di konsumsi**. Untuk tujuan ini, kampanye ini dapat dioperasionalkan dengan memasang segel (atau beberapa yang serupa) pada semua



produk nasional, yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bahwa suatu produk tertentu diproduksi di Timor-Leste (“Dibuat di Timor-Leste”/ “Produk Kami”). Segel ini akan dikaitkan dengan simbolisme tertentu yang dimaksudkan untuk disebarakan kepada semua konsumen atau wisatawan yang berkunjung ke negara kita, yaitu: afirmasi nasional, apresiasi produk lokal, daya tarik konsumsi lokal, kebanggaan nasional, konstruksi “merek” nasional, kepercayaan Pada produk nasional, kedekatan dengan komunitas lokal dan visibilitas ke luar (“Dibuat di Timor-Leste”/ Produk Timor-Leste”). Pada saat yang sama, kampanye komunikasi untuk mempromosikan produk nasional melalui berbagai format: video promosi (TV), jejaring sosial, dan surat kabar/majalah. Kampanye ini harus meningkatkan kesadaran akan produk lokal, tetapi juga fokus pada proses produksi yang ada, untuk menonjolkan kualitas produk (organik) kita. Dibawah ini kami membagikan beberapa contoh kampanye yang sudah ada di negara lain:



2.3.1.1. PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN DAN TANAMAN UNTUK PENGHASILAN

Pertanian menempati sekitar 2/3 dari mata pencaharian penduduk Timor-Leste dalam usia kerja dan mereka yang hidup dari pertanian subsisten sekitar 15% dari populasi aktif (Survey Tenaga Kerja, 2016). Oleh karena itu, bidang ini menjadi kegiatan ekonomi yang sangat penting di negara kita, yang bertanggung jawab atas pendapatan lebih dari 60% warga negara kita.

Ini adalah kesempatan untuk merefleksikan **masa depan seperti apa yang kita inginkan untuk Timor-Leste, terutama untuk daerah pedalaman di mana terdapat banyak kesenjangan!** Sekaranglah saatnya untuk menentukan langkah-langkah kebijakan ekonomi yang menjamin keberlanjutan sumber daya air, mineral dan non-mineral kita, apresiasi dan tata wilayah, perlindungan penduduk dan ekonomi lokal.

Pertanian, dalam semua dimensinya yang beragam, sangat penting bagi pembangunan bangsa, strategi penggunaan ruang teritorial dan apresiasinya. Dalam pengertian ini, pertanian merupakan vektor fundamental dari Rencana Pemulihan Ekonomi.

Selama periode pemulihan ekonomi pasca-COVID-19, investasi di bidang pertanian akan menjadi cara tercepat untuk mencapai kemajuan ekonomi untuk kepentingan lebih dari dua pertiga penduduk kita yang tinggal di daerah pedalaman di negara kita. Ini merupakan bidang yang sudah lama terabaikan, sehingga membutuhkan dorongan baru untuk pembangunan dan di sana, pertanian dapat memainkan peran utama dalam menghasilkan nilai. Pengelolaan pertanian yang baik sangat penting untuk melindungi lingkungan, keanekaragaman hayati, sumber daya air, dan pemadaman kebakaran, yang telah menjadi salah satu masalah yang di hadapi negara ini. Sektor pertanian yang kuat akan menjadi kunci untuk meningkatkan ketahanan pangan dan melindungi perekonomian kita dari krisis di masa depan. Ancaman COVID-19 telah mengajarkan kita untuk lebih mementingkan produksi pangan dalam jumlah banyak untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk dan untuk memastikan bahwa tersedia pangan yang cukup dan terjangkau bagi warga.

Alasan peningkatan investasi di bidang pertanian meliputi:

- Produktivitas petani kita yang rendah saat ini tidak boleh dilihat sebagai kendala, tetapi lebih sebagai peluang untuk mencapai “kemenangan cepat” dalam hal produktivitas dan peningkatan hasil melalui intervensi sederhana dan berbiaya rendah.
- Bahkan dengan beberapa program yang tidak berhasil di masa lalu, kita masih memiliki banyak contoh keberhasilan. Dan, contoh keberhasilan ini kebanyakan melibatkan sektor swasta.
- Fakta bahwa sebagian besar dari contoh yang berhasil tidak diperhitungkan dengan benar dalam permintaan agregat, hanya mendapat sedikit perhatian dalam hal meningkatkan inisiatif yang berhasil.
- Beberapa faktor eksternal telah menyebabkan emigrasi penduduk usia kerja dari pedesaan ke perkotaan, sehingga menghambat peningkatan yang signifikan di sektor pertanian. Investasi dalam modernisasi pertanian dapat membalikkan tren ini.
- Investasi yang salah, akibat intervensi langsung yang berlebihan oleh negara dalam produksi, yang lebih mementingkan produksi lokal yang bersifat subsisten dan kurang memperhatikan peningkatan produktivitas dan pemasaran; masih sedikit pengakuan akan pentingnya insentif ekonomi bagi para petani; integrasi pelaku sektor swasta yang tidak memadai.
- **Tidak ada sektor lain** yang dapat menghasilkan tingkat pembangunan dan kesempatan kerja bagi banyak keluarga selain pertanian. Misalnya, menurut perkiraan yang sangat optimis, pariwisata akan menyerap sekitar 15.000 pekerjaan pada tahun 2030 dan Pabrik LNG akan menciptakan sekitar 500 pekerjaan. Pertanian, untuk saat ini mempekerjakan sekitar 200.000 pekerja – Bayangkan pendapatan yang didapati pekerja dua kali lipat, itu akan berdampak pada pengurangan kemiskinan yang lebih besar.

Di Timor-Leste, produksi pertanian terbagi dalam kategori-kategori berikut:

- Tanaman pangan (bagian yang penting untuk konsumsi sendiri).
- Tanaman komersial (kopi dan produk lain yang kurang penting seperti vanili dan beberapa tanaman/pohon buah).
- Hutan.
- Peternakan.

Merupakan karakteristik umum bagi hampir semua kategori ini adalah produksi yang memenuhi syarat sebagai “padat karya”; oleh karena itu, produksi-produksi ini cocok untuk mendukung fase pembangunan kita saat ini (bahkan dalam perspektif struktural jangka menengah panjang) dan situasi konjungtural saat ini (jangka pendek).

Tanaman pangan adalah tanaman yang terutama ditujukan untuk konsumsi langsung (konsumsi sendiri) oleh rumah tangga pedesaan tetapi dapat menghasilkan surplus produksi yang dapat dipasarkan baik di pasar pedesaan maupun perkotaan. Dalam kedua kasus tersebut, ini menghasilkan pendapatan berupa uang bagi para petani, yang mereka butuhkan untuk memenuhi sebagian kebutuhan mereka - termasuk berinvestasi dalam pendidikan anak-anak mereka. Termasuk dalam hal ini ada jagung, beras dan berbagai macam hasil pertanian lainnya (kentang, ubi kayu, ubi jalar, talas, buncis, kedelai, dll). Timor-Leste bisa mendapatkan segalanya jika, di dalam bidang pertanian ini (terutama beras, tetapi tidak hanya beras, seperti yang akan disebutkan nanti), jika kerjasama teknis dengan Vietnam meningkat, yang kebijakan pertaniannya telah menguntungkan para petani dan

negara secara umum.

Tanaman komersial sebagian besar adalah tanaman seperti kopi dan, pada tingkat yang jauh lebih kecil dan terbatas pada beberapa penduduk lokal/ petani, produksi seperti kelapa, jambu mete dan coklat atau lainnya yang kurang umum di negara ini (seperti anggur dan beberapa buah-buahan yang agak jarang di antara kita).

Hutan yang selama ini merupakan “kerabat miskin” dari kegiatan pertanian, memainkan peran yang cukup relevan dan memiliki banyak ruang untuk berkembang di negara kita, lebih-lebih di tanah yang kurang cocok untuk pertanian karena terletak di daerah yang lebih bergunung-gunung dan lebih terjal – mayoritas di Timor-Leste. Mitra pembangunan seperti Uni Eropa (yang mendukung kerjasama Jerman) telah melakukan pekerjaan di bidang ini (proyek *Ai ba Futuru*) di beberapa Kabupaten di negara ini dan upaya mereka harus didukung dan diperluas.

Sumber penting pangan yang kaya kaya protein adalah **peternakan** (sapi, kerbau kambing dan domba dan babi).

Setiap produksi ini memiliki masalah khusus terkait **produksinya** tetapi juga **pemasarannya**, baik untuk pasar domestik maupun internasional.

Peternakan dapat berkontribusi pada perbaikan pola makan penduduk, yaitu mengurangi beberapa penyakit kronis pada kalangan usia muda (kesulitan perkembangan fisik dan intelektual). Beberapa hewan (seperti kerbau, sapi, domba dan kambing) dapat menghasilkan industri kecil produksi susu dan keju – meskipun ada anggapan bahwa orang Timor-Leste mencerna produk ini dengan buruk, produk ini mungkin memiliki pasar yang menarik pada industri katering dan perhotelan dan komunitas ekspatriat di negara ini. Kondisi *sine qua non* (esensial) adalah pengendalian kesehatan hewan, sebuah tugas yang harus dikembangkan oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan masalah kesehatan masyarakat dan sebagai cara mendukung produsen (dalam jangka menengah) melalui penyelenggaraan kampanye vaksinasi secara masif.

Fakta bahwa negara ini bergunung-gunung menghadirkan kondisi yang wajar untuk memelihara ternak dalam sistem silvo-pastoril, metode yang menghubungkan pemeliharaan ternak di kawasan hutan. Tetapi intensifikasi sistem ini selalu memerlukan promosi budidaya pakan ternak. Hal ini dapat dilakukan dengan menanam tanaman-tanaman yang bisa dijadikan pakan ternak. Tanaman-tanaman ini mudah di konsumsi oleh ternak tanpa perlu menggunakan peralatan impor, seperti produksi jerami atau silase. Redi Kamodi, salah satu proyek yang bersifat silvo-pastoril sudah beroperasi.

Negara akan dapat memasok benih tanaman-tanaman (untuk pakan ternak) ini kepada peternak untuk mempercepat proses intensifikasi dan mempromosikan penyuluhan pedesaan yang diperlukan dengan para teknisi – yang membutuhkan pelatihan yang memadai dan berkualitas, mengubahnya menjadi penggerak nyata dari transformasi dunia pedesaan.

Peningkatan produksi kambing, babi, dan unggas harus dilakukan dalam bentuk pengurangan dan didukung oleh Negara, tetapi ini terutama harus dilakukan oleh sektor swasta. Faktanya, kambing – dan juga domba – merupakan penghalang penting bagi reboisasi, yang diperlukan jika dibiarkan bebas dalam pemeliharaannya karena mereka memakan semua tanaman muda, dengan begitu mempercepat pengurangan/desertifikasi.

Dalam jangka panjang, sektor peternakan harus didukung dengan jaringan gudang pendingin yang dipromosikan oleh Negara yang memungkinkan konservasi daging dan susu dan memfasilitasi peredarannya di seluruh negeri.

Kurangnya pendidikan kedokteran hewan yang lebih tinggi merupakan kendala lain untuk sektor ini dan Universitas Nasional Timor Lorosa'e memiliki peran penting untuk dilakukan di sini. Pemerintah juga harus memberikan dukungan dalam menciptakan dan memelihara titik-titik penyediaan air untuk ternak di pedesaan. Penyediaan air irigasi dengan sistem

gravitasi sederhana dari pegunungan juga dapat membantu produksi pakan ternak di musim kemarau. Promosi koperasi pertanian merupakan faktor lain yang sangat penting di sektor ini.

Pemerintah Konstitusi VII mengusulkan kepada Parlemen Nasional, yang menyetujui, undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan Produksi Hutan (UU No.14/2017, tanggal 2 Agustus) dimana negara, karena bergunung-gunung dan tanah yang umumnya miskin, cenderung cocok untuk bidang ini. Sektor kehutanan harus mengarah pada pembudidayaan tanaman industri (kayu cendana, mahoni, jati, agar) dan untuk kayu bakar (contoh: kayu putih, cemara, albisia) supaya mencegah masyarakat menebang pohon secara sembarangan untuk digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga.

Undang-undang ini adalah titik awal yang baik untuk meningkatkan produksi hutan yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan petani – salah satu tujuan mendasar dalam konteks upaya saat ini untuk menentukan strategi pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dan meningkatkan lingkungan alam, yaitu dengan menetapkan tanah-tanah di daerah pegunungan, yang menjadi korban erosi hebat. Penyuluhan pedesaan yang berkualitas, yang harus didukung dengan kuat, memiliki peran mendasar untuk dimainkan di sini.

Sedangkan untuk **tanaman komersial**, yang paling menonjol adalah **kopi**

Kopi Timor-Leste terkenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Ketenaran ini dapat berlanjut “jika dan hanya jika” diperlakukan (produksi dan pemanggangan) yang semestinya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitasnya.

Faktanya, perlu disadari bahwa keduanya, pada saat ini, tidak mencukupi dan, terlepas dari semua “*lip service*” yang diberikan padanya, ada banyak hubungannya dengan refleksi alami dalam pendapatan petani dan ekspor negara, penting untuk keberlanjutannya. Meskipun tampaknya perlu dilakukan studi menyeluruh tentang “ekonomi politik” kopi, berikut beberapa rekomendasinya.

“Hibrida Timor” kini hadir dalam banyak varietas yang ditanam di seluruh dunia, dari Brasil hingga Kolombia, dari Cina hingga Vietnam (saat ini salah satu produsen dan eksportir terbesar di dunia) dan India.

Keberhasilan dari strategi pengembangan produksi dan pemasaran kopi di Vietnam, yang kini menjadi eksportir terbesar ketiga di dunia, mendorong kami untuk menyarankan bahwa salah satu langkah yang harus diambil adalah mengirimkan misi studi ke negara tersebut dan melaksanakan langkah-langkah Serupa, terutama dalam hal pengendalian kualitas dan strategi pemasaran global. Meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara ini di bidang kopi bisa menjadi sangat penting.

Dua entitas portugis dapat memberikan dukungan penting untuk “revolusi” nyata yang diperlukan untuk meningkatkan produksinasional dan untuk mengontrol kualitasnya. Ini merujuk pada Centro Internacional da Ferrugem do Cafeeiro (CIFC), di Oeiras/Portugal, dan Proyek Quinta Portugal, di Aileu (https://www.facebook.com/QuintaPortugalAileu/?epa=SEARCH_BOX).

CIFC adalah entitas yang bertanggung jawab atas pembuatan dan penyebaran varietas-varietas kopi yang, karena berasal dari “Hibrida Timor”, memiliki sifat yang sama, yaitu cukup tahan terhadap penyakit utama tanaman (karat) dan memiliki produktivitas



yang meningkat.

Proyek tersebut di atas, yang didirikan dari Misi Pertanian Portugis, bertanggung jawab atas penyebaran varietas dan praktek budidaya yang meningkatkan produksi dan kualitas kopi Timor-Lorosa'e bersama dengan para petani nasional – di Kabupaten Aileu, juga di tempat-tempat lain.

Sarannya ada dua

- agar aktivitas Quinta Portugal ditingkatkan (dilipatgandakan) dengan penguatan signifikan dari kapasitas teknis dan keuangannya, untuk menjangkau lebih banyak produsen dan
- agar CIFIC menjadi konsultan yang memiliki hak istimewa di Timor-Leste dalam bidang ini.

Dari ini akan menghasilkan peningkatan signifikan pada perkebunan kopi di negara kita dan pada kualitas kopi yang dihasilkan. Hal ini akan memungkinkan, dalam jangka menengah, keberlanjutan pabrik pengolahan kopi dengan peningkatan nilai kopi dan nilai ekspor kita.

Sangat mudah untuk dilihat bahwa salah satu masalah mendasar dari perkebunan kopi kita adalah produktivitasnya yang rendah akibat umur tanaman yang sudah tua.

Salah satu teknik pembaruan tersebut adalah mencabut tanaman tua dan menanam tanaman muda. Masalah utama dari solusi ini adalah tanah di Timor-Leste, banyak di antaranya, memiliki kemiringan yang sangat curam dan pepohonan memiliki sistem perakaran yang sangat berkembang. Kedua situasi tersebut mempersulit pilihan untuk solusi ini di negara kita.

Alternatif yang relatif “sederhana” adalah pemangkasan radikal tanaman tua dan mencangkoknya dengan tanaman baru yang lebih produktif. Praktik ini telah diadopsi di beberapa tempat di Timor-Leste tetapi dengan dimensi yang lebih bersifat eksperimental. Faktanya, teknik ini menyebabkan penurunan produksi di daerah intervensi setidaknya selama 3-5 tahun, yang berarti penurunan tajam dalam penghasilan para petani – itulah sebabnya mereka enggan menerapkannya.

Solusi lain adalah dengan menerapkan kebijakan intervensi bertahap (misalnya, 25% setiap tahun) dan memberi kompensasi kepada petani atas sebagian pendapatan mereka yang hilang. Proses ini bisa dimulai paling cepat pada tahun 2021 – meski dengan dimensi yang masih terbatas – dan mengandalkan dukungan mitra pembangunan (kita), terutama Portugal (yang sudah mendukung melalui Quinta Portugal) dan Uni Eropa yang mendukung program serupa di negara Afrika lainnya.

Solusi seperti itu tidak dapat dihindari dalam 10-25 tahun ke depan untuk memperbaharui perkebunan kopi kita. Hasilnya adalah peningkatan pendapatan petani karena peningkatan produksi dan kualitas kopi – dengan bayaran yang lebih baik di pasar internasional.

Yang lebih umum di negara kita adalah penggunaan beberapa (2 atau 3) pucuk yang muncul dari tunas alami yang muncul setelah pemangkasan. Teknik ini harus meningkatkan skala penggunaannya.

Peningkatan kualitas ini memerlukan, selain perenjaab perkebunan kopi, juga perbaikan signifikan pada praktik pertanian – sebuah tugas di mana Proyek Quinta Portugal dapat membantu, jika secara efektif didukung dan diperluas.

Peningkatan kualitas produksi kopi tercermin dalam pendapatan dari ekspor, yang memungkinkan ekspor ke negara-negara yang membeli dengan harga yang lebih baik (AS, Kanada, Jerman) dan, pada akhirnya, mengurangi penjualan ke pasar yang membeli dengan harga yang lebih rendah (Indonesia, karena menerima kopi dengan kualitas yang

lebih buruk).

EKSPOR KOPI TIMOR-LESTE, 2017-2019									
	2017			2018			2019		
	Quant. %	Value %	Price Kg	Quant. %	Value %	Price Kg	Quant. %	Value %	Price Kg
Indonésia	20.2%	7.4%	0.99	35.6%	10.5%	0.74	50.1%	29.9%	2.61
Canada							13.4%	22.7%	4.40
USA	21.6%	33.4%	4.17	19.1%	32.8%	4.27	12.1%	21.3%	4.59
Germany	22.8%	22.5%	2.67	12.1%	11.4%	2.35	5.2%	4.6%	2.29
Total	100%	100%	2.70	100%	100%	2.49	100%	100%	2.61

Sumber: DJE, statistik perdagangan internasional

Sejalan dengan peningkatan dalam perkebunan kopi dan kopi, tanaman baru dengan penerimaan yang kuat di pasar harus diperkenalkan (vanilli, stroberi, anggur, kesemek, biwa).

Referensi ke Proyek Quinta Portugal memungkinkan kita untuk merujuk pada proyek-proyek lain yang serupa (misalnya: TOMAK, Ai Ba Futuru dan lain-lain): dukungan kepada petani dalam modernisasi tanaman mereka. Dari proyek-proyek ini, beberapa yang memiliki dampak terbaik bagi masyarakat harus dipilih oleh Negara untuk mendapat dukungan dari pemerintah /atau dari mitra pembangunan kita.

Mengingat salah satu permasalahan pertanian kita adalah pemasaran produksi, maka disarankan untuk mendorong partisipasi badan pemasaran (misalnya kopi) dalam pendampingan teknis kepada petani, dengan memberikan keuntungan pajak kepada entitas entitas itu.

Penyuluhan pedesaan juga harus menyediakan integrasi dan promosi budidaya beberapa tanaman rempah-rempah (cengkeh, lada, jahe, vanili) dalam sistem agroforestal dataran tinggi, terutama di perkebunan kopi tetapi juga di tempat-tempat dengan hutan palem.

Tanah di Timor-Leste, khususnya di pegunungan, umumnya miskin (tidak terlalu subur, dengan keasaman). Peningkatan produksinya memerlukan koreksi pada karakteristik-karakteristik ini. Negara harus mencari cara untuk mendukung petani dalam memperbaiki tanah dan memupuk tanaman. Untuk kopi misalnya, dapat digunakan pupuk organik.

Merupakan sesuatu yang mendesak untuk **mendukung perusahaan yang beroperasi di sektor ini** dan meminta **mereka untuk melakukan penyuluhan** dan, pada saat yang sama, berinvestasi dalam program penyuluhan pedesaan dengan teknisi mereka sendiri yang berkualifikasi, dan perbaikan tanah serta pemupukan untuk tanaman pangan (beras, jagung, ubi kayu, dll) dan juga untuk *komoditas* agroforestal.

Ini semua menjadi lebih benar jika kita melihat pada pengalaman yang menunjukkan bahwa penyuluhan pedesaan oleh teknisi Pemerintah, karena seringkali tidak disiapkan dengan baik dan tanpa insentif, tidak efektif dan harus ditingkatkan dengan melatih tenaga-tenaga ini. Setiap Direktorat pertanian kabupaten harus didukung lebih lanjut untuk meningkatkan kinerja mereka di bidang penyuluhan pedesaan, yang harus menjadi kegiatan inti mereka.

Terakhir, **tanaman pangan**. Ini merujuk terutama pada beras, jagung, kacang-kacangan, kedelai dan singkong. Sebagaimana telah disebutkan, produksi tanaman-tanaman tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk konsumsi sendiri, pada hakikatnya dilakukan dari perspektif subsisten, tanpa ada insentif untuk meningkatkan skala produksi – yaitu dalam bentuk produksi kekeluargaan (karena jumlah hektar lahannya sangat kecil dan rendahnya

penggunaan Teknologi tepat guna), kesulitan arus produksi⁹ dan persaingan produk yang sama, terutama beras, yang diimpor dari luar negeri dan menjangkau pasar di Timor-Leste dengan harga yang jauh lebih kompetitif.

Dalam jangka menengah, khususnya yang berkaitan dengan beras, perlu diambil kebijakan untuk meningkatkan swasembada nasional produk ini, yang sangat penting dalam menu makanan masyarakat Timor. Keadaan saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan hal tersebut karena akan berdampak pada konsumsi masyarakat, tetapi perlu dipertimbangkan, dalam jangka menengah – jangka waktu sekitar 5 tahun-, kemungkinan mengadopsi kebijakan pengendalian impor (batasan terhadap kuantitas impor dan kenaikan tarif impor) yang, akan dengan sendirinya berarti peningkatan (lebih lambat atau lebih cepat, tergantung pada kebijakan yang diterapkan) dalam harga produsen (dan dalam konsumsi, sebagai insentif untuk memproduksi banyak lahan tidur) pada masa pasca kemerdekaan – khususnya karena pengaruh perolehan pendapatan yang “lebih mudah” (seperti pensiun para veteran dan persaingan dari beras “murah” yang diimpor dari Vietnam. Jika diperhatikan, kebijakan serupa telah diterapkan oleh negara-negara lain di kawasan. Strategi pengendalian impor ini dapat/harus **dilengkapi dengan penciptaan intensif publik langsung untuk produksi** – yaitu melalui penyediaan “benih” – **dan kepada aliran produk**, untuk mengurangi kecenderungan kenaikan harga ke konsumen akhir.

Budidaya padi telah memperoleh manfaat dari beberapa mekanisasi melalui mesin penanam. Hal ini harus didorong untuk mengurangi tenaga manusia dan menambah luas lahan garapan, namun penggunaan traktor yang relatif besar terbukti benar-benar menjadi “bencana” di antara kita karena sulitnya memelihara dan mempertahankannya dalam produksi – alokasi anggaran Kementerian Pertanian dan Perikanan untuk tujuan ini selalu sangat rendah, dan akhirnya menambah jumlah kendaraan yang tidak digunakan. Solusi untuk situasi ini dapat berupa menyediakannya dalam jumlah “sedikit” untuk tetap beroperasi tetapi mengabaikan kebijakan mekanisasi “berat” dengan penggunaan traktor seperti yang dipraktikkan beberapa tahun lalu.

Hal mendasar untuk dinamisasi produksi beras adalah pemilihan varietas yang paling produktif dan disesuaikan dengan selera orang timor, sambil memanfaatkan hikmah dari tindakan kerjasama internasional yang akhirnya berhenti dan tidak ada kelanjutannya (lebih-lebih dari China). Perlu diketahui bahwa Vietnam memiliki wilayah produksi beras pengunungan yang luas, kerja sama dengan negara ini dalam menyediakan benih yang sesuai (tetapi disesuaikan dengan Timor-Leste) harus diupayakan.

Pengalaman-pengalaman ini penting untuk pendirian bank benih yang lebih produktif dan ketersediaannya bagi petani Timor. Ini adalah sesuatu yang dapat dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat namun perlu diperhatikan secara serius agar berkelanjutan dan tercermin dalam pendapatan petani kita.

Di daerah yang bergunung-gunung, harus didukung dengan sistem irigasi lereng dan penanaman padi terasering – seperti yang sudah dilakukan di banyak daerah. Negara dapat/harus mendukung salah satu dari praktik pertanian ini dengan dukungan teknis dan finansial untuk meningkatkan swasembada pangan bagi masyarakat lokal dan negara.

Sebuah aspek penting untuk ditinjau dalam pengorganisasian dan fungsi dunia pedesaan adalah **peran koperasi** dan peran Sekretariat Negara sendiri yang menaungi koperasi-koperasi ini.

Koperasi-koperasi ini harus didukung agar produsen menerima nilai produksinya secara efektif dan tepat waktu. Oleh karena itu, pembayaran untuk produksi tidak boleh ditunda terlalu lama. Koperasi-koperasi pertanian harus memiliki manajemen yang lebih profesional dan untuk itu mereka mungkin harus bergantung pada bantuan negara dan terutama

⁹ Bahkan jika petani memiliki cara untuk mangangkut produk sekalipun, dalam banyak kasus, jumlah produksi yang rendah tidak membenarkan biaya transportasi, dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan.

mitra pembangunan.

Solusi yang diadopsi di beberapa negara adalah pembuatan program yang memastikan pembelian dari produsen dan pengiriman ke pasar konsumen. Di banyak negara ini disediakan oleh lembaga/program negara, oleh pengusaha swasta atau oleh koperasi produsen.

Di Timor-Leste mekanisme-mekanisme yang terakhir ini tidak benar-benar merupakan kisah sukses dan hanya dalam jangka panjang mereka akan dapat menemukan cara yang lebih profesional untuk berfungsi dan mampu memberikan layanan yang memadai kepada para anggotanya.

Jika mekanisme-mekanisme ini tidak ada, perlu untuk mempertimbangkan kemungkinan menghidupkan kembali program pemerintah yang telah ada sebelumnya di Timor-Leste "*Povu Kuda, Governu Sosa*" – tetapi tanpa permasalahan yang menyebabkan penggantiannya, yang salah satunya adalah tidak membayar hutang kepada produsen. Apapun solusinya, perlu dipastikan pembayaran "tunai" untuk produk yang dikirim oleh produsen, selalu membutuhkan likuiditas untuk konsumsi dan investasi mereka.

Tetapi para pelaku utama pemasaran adalah pedagang swasta. Namun, harus ada mekanisme **kontrol harga yang ada (oleh pemerintah)** untuk menghindari permainan harga oleh para produsen dalam negeri.

Jika memungkinkan, harus ditambahkan lebih banyak nilai ke produksi pertanian nasional melalui pengenalan beberapa industri pengolahan, walaupun terbatas, dari sebagian produksi.

Permintaan global akan konjak (konnyaku/devil's tongue/elephant foot yam) besar dan terus meningkat, dengan permintaan terbesar datang dari China dan Jepang. Dalam tiga tahun terakhir, telah terjadi peningkatan ekspor yang signifikan dari Timor-Leste, terutama ke China. Statistik resmi mencatat 1.669 MT *keripik* konjak kering diekspor pada tahun 2018, dibandingkan dengan 568 MT pada tahun 2016. Pada tahun 2019, ekspor turun secara signifikan, karena beberapa masalah pada industri ini. Konjak adalah ekspor barang terbesar kedua di Timor-Leste (setelah kopi), dalam hal ini.

Konjak cocok untuk banyak petani Timor-Leste. Perekonomian produk ini cukup sehat. Seorang petani bisa menanam konjak di lahan yang juga digunakan untuk kopi, untuk mendapatkan nilai tambah dari lahan tersebut. Seorang petani yang menggunakan lahan sepenuhnya untuk tujuan ini dapat memperoleh setidaknya USD 2.000 perhektar, selain dari pendapatannya dari kopi (saat ini pendapatan dari kopi kurang dari USD 1.000 per hektar, jadi ini merupakan peningkatan pendapatan yang cukup besar).



Rencana Tindakan yang Diusulkan untuk Pertanian tahun 2020-2023

Sektor	Rencana Strategis dan Komitmen	Persyaratan	Dukungan yang Ditargetkan	Investasi Tingkat Industri
Petani Kopi dan tanaman komersial terkait	Ada rencana strategis tentang kopi: perlu membuat pernyataan yang jelas tentang rencana tersebut	Memperbaiki proses untuk mengeksplor kopi dan produk lainnya, termasuk standarisasi skema sertifikat asal untuk semua tanaman	<p>Mendukung perluasan Mitra Pembangunan dan inisiatif komersial untuk meningkatkan produksi dan produktivitas di lahan pertanian dan meningkatkan kualitas produk</p> <p>Mendukung perusahaan dengan biaya langsung untuk mendapatkan sertifikasi organik</p>	<p>Mendukung Associação do Café (ACT) dan kegiatannya, termasuk festival dan kompetisi kopi</p> <p>Bekerja sama dengan ACT untuk membangun sistem klasifikasi kualitas nasional yang memungkinkannya harga yang berbeda</p> <p>Membentuk Dewan Pemasaran Kopi, untuk membangun Merek Kopi Timor secara internasional</p>
Konjak: Ditanam dalam perkebunan kopi	menyiapkan rencana industri untuk Konjak			Bernegosiasi dengan China untuk mengimpor Konjak
Produsen Jagung	Menyiapkan Rencana Strategis untuk produksi jagung		<p>Komisi dan inisiatif dukungan untuk menangani ancaman hama langsung (termasuk ulat tentara musim gugur).</p> <p>Mendukung program untuk menjangkau 3-4 kelompok produsen jagung yang terkait dengan agregator, untuk meningkatkan produktivitas dan rantai pasokan. Menggunakan agregator yang ada sebagai pelaksana program. Menyertakan kemungkinan faktor-faktor produksi jangka pendek bagi petani</p>	<p>Mendukung penelitian tentang efisiensi produksi jagung, termasuk pengujian kecocokan jagung hibrida</p> <p>Komisi dan inisiatif dukungan untuk menangani ancaman hama (termasuk ulat tentara musim gugur), termasuk kampanye kesadaran yang ditujukan pada para petani jagung</p>

Rencana Tindakan yang Diusulkan untuk Pertanian tahun 2020-2023

Sektor	Rencana Strategis dan Komitmen	Persyaratan	Dukungan yang Ditargetkan	Investasi Tingkat Industri
Penggunaan Jagung untuk tujuan komersial: pakan ternak	Menyiapkan rencana strategis produksi pakan ternak	Bekerja dengan asosiasi penyalur faktor-faktor produksi pertanian (ANSATIL) untuk menyelesaikan masalah dengan impor faktor-faktor produksi pertanian Mengembangkan aturan untuk produksi makanan hewan	Dukungan diarahkan kepada 3-4 perusahaan lokal yang sudah memiliki mesin untuk segera memulai produksi pakan ternak lokal menargetkan dukungan bagi produsen yang ada untuk meningkatkan produksi kedelai lokal; ini adalah faktor pembatas utama dalam produksi pakan ternak lokal	Menyediakan pembiayaan pokok multi-tahunan kepada ANSATIL untuk mendukung perluasan impor, produksi dan distribusi input pertanian
Ayam, Telur, Babi dan Sapi		Ayam: mengidentifikasi opsi untuk mengatasi pembatasan saat ini terkait ketersediaan anak ayam umur sehari (DOC) (yang saat ini diimpor) Ternak: Menerapkan langkah-langkah yang terkait dengan persyaratan Indonesia untuk mengizinkan ekspor sapi dari Timor-Leste lagi	Ayam: Mendukung MAECOM (Movimento de Aço sobre Economia da Comunidade) [Gerakan Aksi Ekonomi Masyarakat] untuk memperluas jaringan peternakan ayam yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat Babi: Mendukung program untuk mengelola Penyakit Flu Babi Afrika (ASF) dengan membuat kandang dan membantu perusahaan yang ada untuk mengganti kerugian ASF dengan produksi anak babi Sapi: Mendukung kemitraan percontohan pengolah daging dan petani besar di tempat pengurangan percobaan Sapi: Mendukung manajemen rumah pemotongan hewan untuk meningkatkan kualitas dan keandalan	Babi: mengembangkan rencana pemulihan ASF untuk sektor peternakan babi, menggunakan sumber daya teknis/donor yang ditawarkan. Memperluas kampanye kesadaran tentang MDF/MAF ASF

Rencana Tindakan yang Diusulkan untuk Pertanian tahun 2020-2023

Sektor	Rencana Strategis dan Komitmen	Persyaratan	Dukungan yang Ditargetkan	Investasi Tingkat Industri
produsen beras	Menyiapkan rencana strategis untuk beras timor, termasuk komitmen mengembangkan industri ini		<p>Menyelesaikan program rehabilitasi irigasi yang diusulkan dan mendanai pembentukan kelompok pengguna dan produsen air di setiap wilayah</p> <p>Mendukung perluasan program yang ada untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi</p> <p>Memberikan subsidi (hingga tiga tahun) untuk agregator beras lokal untuk diteruskan ke petani, sehingga harga eceran dapat bersaing dengan beras impor</p>	Riset pasar dan mulai membangun pasar internasional spesifik untuk beras Timor (Australia, Selandia Baru)
Kehutanan Masyarakat	Menyiapkan strategi nasional industri kayu cendana	Mengubah undang-undang untuk mengizinkan ekspor kayu cendana, disertai dengan kebijakan yang sesuai untuk panen kayu cendana yang bertanggung jawab Kemajuan yang diusulkan: pembentukan Yayasan untuk skema sertifikasi karbon nasional	Mendukung perluasan swasta dalam produksi dan distribusi kayu cendana dalam skala besar	
Budidaya Perikanan		Meresmikan kebijakan MAF (Kementerian Pertanian dan Kehutanan) saat ini untuk memindahkan tempat pembenihan Gleno (GoTL) untuk fokus pada pembudidaya nila, memungkinkan sektor swasta untuk mengembangkan pasar benih ikan	<p>Mendukung perluasan sektor swasta dalam penyediaan pembangunan tambak ikan dan/ subsidi pembangunan pembenihan baru</p> <p>Mendukung petani kecil dengan benih ikan, menggunakan sistem kupon dengan pembenihan pribadi</p>	Mendukung peningkatan pengetahuan/kapasitas dalam budidaya ikan, menghubungkan organisasi pemerintahan dan swasta yang relevan

Yang berkaitan dengan kopi, perkiraan saat ini adalah bahwa 38.000 keluarga memproduksi kopi untuk dijual; artinya, jika setiap produsen dapat menggandakan produksi kopinya dan memperoleh pendapatan tambahan dari tanaman pelengkap seperti konjak, mereka memperoleh penghasilan tambahan rata-rata USD 2.000 per tahun, atau 76 juta USD untuk keseluruhan produsen. Dampak terhadap PDB setidaknya dua kali lipat dari dampak domestik, dengan efek pertambahan nilai yang lebih berlipat ganda, yang berarti peningkatan setidaknya USD 150 juta pertahun dalam PDB.

Sedangkan yang berhubungan dengan kehutanan, menurut evaluasi yang dilakukan FAO, diperkirakan tersedia 240.000 hektar lahan untuk produksi hutan, tidak termasuk yang dicadangkan untuk konservasi atau tujuan lainnya yang lindungi. Jika industri kayu di Timor-Leste dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat penggunaan dan pendapatan seperti di negara tetangga (Malaysia dan Indonesia digunakan sebagai pembandingan), maka akan menghasilkan produksi kayu tahunan sebesar 500.000 m³, (Sumber: timbertradeportal.com). Dengan harga konservatif 200 USD per m³, ini akan mewakili USD 100 juta per tahun dalam nilai produksi ketika kapasitas penuh tercapai. Dampak PDB pada sektor kehutanan akan lebih dari USD 200 juta, belum termasuk efek-efek multiplier. Tentunya, untuk mencapai tingkat ini kita perlu menunggu beberapa tahun sampai pohon mencapai kematangan; tetapi kemajuan yang signifikan mungkin terjadi dalam jangka pendek dengan stok yang ada, bersama dengan pendapatan tahunan dari penjualan kredit karbon.

Berikut ini adalah tabel dengan hasil dari simulasi yang menunjukkan kontribusi signifikan pertanian terhadap PDB dan pengurangan kemiskinan.

	Situasi Saat ini	Visi Realistis untuk tahun 2030
Jumlah Keluarga	150.000	120.000
Produktifitas	Rendah	2-3 kali produksi saat ini
Pendapatan	1.000 USD per keluarga	2.500 USD per keluarga
Kemiskinan	50% keluarga pedesaan	20% keluarga pedesaan
PDB riil (Pertanian)	300 juta	USD 750 juta

2.3.1.2 PARIWISATA

Asosiasi Pemilik Hotel (HOTL) memperkirakan bahwa sejak awal tahun 2020, sektor perhotelan dan pariwisata telah mengalami penurunan pendapatan penjualan sebesar 95% karena berkurangnya konsumsi domestik dan penurunan yang signifikan di bidang transportasi udara, darat dan laut. Turunnya penawaran dan permintaan telah memberikan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada restoran, hotel, dan perusahaan perjalanan untuk tetap beroperasi, mempertahankan karyawan dan membayar biaya operasional (sewa, pelayanan umum, dll.).

Parawisata di Timor-Leste jumlahnya sangat kecil secara angka dan terbatas, dalam hal tingkat kematangan “merek” dan “produk”. Survey Internasional tentang Pengunjung yang dilakukan Asian Foundation menetapkan kedatangan turis tahunan sekitar 10.000 pertahun, dengan negara asal yang paling umum adalah Australia (lebih dari 30%). Sepuluh ribu turis setahun berarti sekitar 30 turis yang tiba di Timor-Leste setiap hari jumlah yang sangat kecil (yang menempatkan Timor-Leste di 187 dari 190 negara di dunia, menurut data Bank Dunia pada tahun 2017).

Tampaknya hanya ada sedikit turis dari bagian lain Asia. Dengan rata-rata pengeluaran turis 600 USD untuk ekonomi lokal (perkiraan berdasarkan data survey dari Asia Foundation), angka saat ini menunjukkan bahwa parawisata menyumbang sekitar 6 juta USD per tahun, yang mewakili kurang dari 0,5% dari PDB, nilai yang tidak signifikan ini adalah permulaan yang baik, tetapi industri ini sendiri masih memiliki jalan panjang untuk dilalui!

Selama beberapa tahun, sektor pariwisata telah menjadi salah satu alternatif utama bagi pembangunan dan diversifikasi perekonomian nasional, baik dari segi produksi maupun penyerapan tenaga kerja, karena merupakan pencipta banyak lapangan kerja, yang tidak membutuhkan kualifikasi yang terlalu tinggi. Namun demikian, harus diakui bahwa hal itu belum cukup, khususnya “bagian” dari anggaran tahunan yang ditujukan ke sektor itu, sumber daya yang didapatkan sesuai dengan sentralitas yang dimiliki. Penting juga pada sektor ini (seperti di sektor lain), untuk mengubah situasi ini dan memberinya anggaran yang dibutuhkan dan layak sebagai sumber produksi dan penyerapan angka pengangguran atau semi pengangguran yang tinggi.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memusatkan sumber anggaran yang lebih besar di sektor ini, baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Itulah yang disarankan di sini dan yang dapat diimplementasikan, meskipun secara bertahap, melalui (APBN tahun 2021 dan APBN-APBN berikutnya).

Sebuah “Strategi Pariwisata Nasional” telah diterbitkan sejak masa pemerintahan VI (2017), yang memberikan serangkaian gagasan yang sangat umum tentang sektor ini dan perannya dalam pembangunan Timor-Leste.

Kita dapat memiliki Strategi ini sebagai latar belakang untuk masa depan, tetapi kita harus ingat bahwa:

- Strategi Pariwisata Nasional, sebagaimana yang telah diterbitkan, tidak lebih dari seperangkat pedoman yang sangat umum dan tidak menyebutkan program dan proyek khusus untuk sektor ini, yang menjadi pusat perhatian kita dalam kerangka Rencana Pemulihan Ekonomi ini; dan
- Ada kepastian, setidaknya di tahun-tahun mendatang, bahwa dampak pandemi COVID-19 akan sangat besar, memaksa peninjauan seberapa banyak yang telah direncanakan untuk masa depan. Masih terlalu dini untuk menentukan dampak sebenarnya dari pandemi ini terhadap pariwisata baik secara global maupun nasional.

Untuk kedua alasan tersebut, hal-hal berikut ini harus dilihat sebagai seperangkat pedoman yang **mungkin perlu direvisi dalam jangka menengah**, ketika efek pandemi di pasar pariwisata internasional menjadi lebih jelas. Bagaimanapun juga, investasi di bidang Pariwisata kita tampaknya menjadi investasi masa depan, namun penting juga untuk menemukan jawaban untuk menarik wisatawan nasional (menciptakan pariwisata di dalam negeri kita sendiri).

Karena pada dasarnya ini adalah kegiatan penting para pekerja intensif — terlepas dari besarnya modal yang dibutuhkan, terutama di fasilitas perhotelan dan fasilitas-fasilitas sejenis lainnya, sektor ini adalah salah satu yang paling sesuai, bersama sektor lainnya (pertanian, konstruksi perumahan, industri manufaktur berskala kecil dan menengah), untuk memberikan kontribusi bagi pemulihan ekonomi negara, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan tingkat lapangan kerja baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Berikut ini adalah serangkaian saran / proposal untuk pembangunan jangka menengah sektor ini - tetapi dengan dampak yang nyata di jangka panjang— membantu memulihkan lapangan kerja dan tingkat pendapatan bagi banyak keluarga:

- Mempromosikan pembangunan sektor pariwisata dalam jangka menengah dan jangka panjang sebagai salah satu sumber pendapatan dan lapangan kerja bagi penduduk dan kas Negara dan menanggung konsekuensi dari hal ini dalam hal struktur anggaran, dengan peningkatan bobot sektor baik dalam pengeluaran Negara saat ini maupun infrastruktur.
- Disarankan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Negara yang berdedikasi pada implementasi kebijakan pariwisata dalam berbagai dimensinya. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan penataan kelembagaan kebijakan dan implementasinya.

- Investasi publik (atau, sebagai alternatif, dalam kemitraan publik-swasta) dalam infrastruktur yang berguna untuk pariwisata. Satu komponen penting pariwisata, lebih banyak di beberapa negara/kawasan daripada di negara lain, adalah monumen-monumen nasional. Harus diakui bahwa Timor-Leste, karena kondisi sejarahnya, tidak terlalu kaya di bidang ini.

Namun banyak konstruksi, yakni dari masa penjajahan Portugal, yang masih bisa dilestarikan dan bahkan akhirnya digunakan sebagai pusat/obyek wisata. Sebuah tindakan yang diambil dalam waktu dekat yang berpotensi menciptakan banyak pekerjaan adalah pelestarian warisan-warisan ini, dan untuk itu bisa meminta dukungan teknis dan finansial dari para mitra pembangunan dan UNESCO. Melihat pengalaman dari Goa / India dalam artikulasi antara pelestarian warisan yang dibangun dan pariwisata, disarankan untuk mencari jalan lain untuk meminta dukungan dari Negara Bagian India tersebut.

Contoh infrastruktur yang harus dilestarikan dan bahkan dipulihkan ke kondisi di mana bisa dapat digunakan (yaitu sebagai penginapan kecil untuk mendukung **pariwisata lokal**) adalah beberapa bekas kediaman mantan bupati (Portugis) dan benteng. Salah satu Contoh dari benteng-benteng itu adalah yang ada di Bagaia yang direhabilitasi beberapa tahun lalu oleh Sekretaris Negara untuk Kebudayaan. Salah satu contoh kediaman adalah yang ada di Maubara - meskipun pekerjaannya telah dihentikan selama beberapa tahun, karena kurangnya perhatian dari pemerintah Timor-Leste setelah ditinggalkan oleh kerjasama Portugis skarena kesulitan keuangan karena krisis ekonomi yang dialami negara itu sekitar satu dekade lalu.

Sebuah daftar (tidak lengkap) dari bangunan ini, misalnya, termasuk:

Manatuto— Bangunan bekas kediaman bupati, terletak di atas bukit terpencil, dengan pemandangan yang sangat menarik ke persawahan, kota, dan laut. Tempat lalu lintas jalan yang padat dan sekarang dengan akses yang relatif mudah ke Dili, dapat menjadi daya tarik untuk eksploitasi komersil.

Laga — Bangunan bersejarah di luar benteng yang bisa digunakan. Dulu, pernah berfungsi sebagai tempat tinggal, antara lain, untuk keluarga mantan Presiden José Ramos Horta dan dalam keadaan yang “cukup” terawat, tetapi dapat dengan mudah menjadi reruntuhan jika tidak direhabilitasi. Karena lokasinya yang dekat dengan Baukau, bisa mendapatkan dukungan teknis dari Pousada (Penginapan) di kota ini; memiliki pemandangan yang menakjubkan pada rute ke Bagian-Timur.

Maliana —Bekas kediaman bupati. Titik penyeberangan ke mata air panas Marobo dan wilayah perbatasan bagian barat, yang dapat “menggandakan” dukungan pariwisata di wilayah yang diberikan oleh benteng Balibo.

Batugadé — Bangunan di dalam benteng di tepi pantai. Titik penyeberangan wajib untuk lalu lintas perbatasan. Alternatif ke Maliana dan Balibo dan kemungkinan titik daya tarik bagi turis asal Indonesia (Atambua).

Maubara — Menyelesaikan pekerjaan dan mulai melakukan eksplorasi komersial dengan cara yang akan ditentukan.

Ossu — Benteng yang memerlukan pekerjaan konservasi yang relatif sederhana. Timor Telecom mendirikan menara transmisi di tempat ini dan, sebagai gantinya, boleh diminta bantuannya untuk perawatan tempat ini.

Semua bangunan yang disebutkan di atas adalah bangunan bersejarah. Penggunaan dan pemulihan arsitekturalnya akan berkontribusi pada pelestarian warisan budaya, juga menginformasikan Identitas Rakyat Timor.

- Pekerjaan pemugaran / pemeliharaan yang disarankan memiliki keuntungan karena pada dasarnya merupakan pembangkit pekerjaan bagi pekerja yang tidak terampil, yaitu penduduk di daerah pedesaan di mana bangunan tersebut berada. Untuk alasan ini, mereka harus mendapat prioritas khusus di tahun-tahun mendatang — tetapi memastikan kualitas pekerjaan yang akan dilakukan, seperti yang dilakukan dengan pemugaran “Benteng” Baguia.
- Satu hal yang penting untuk berfungsinya unit-unit wisata (penginapan, hotel, restoran) adalah pelatihan kejuruan yang memadai bagi para karyawan. Apa yang dipraktikkan di antara kita saat ini berkualitas rendah, sehingga pelayanan kepada wisatawan dan pengguna lain berkualitas rendah. Pendirian sebuah Sekolah Perhotelan yang berkualitas sangatlah penting untuk yang menjadi referensi bagi sekolah-sekolah lain di bidang ini di negara ini dan “langkah-langkah” untuk standar layanan di bidang ini. Hal yang memungkinkan untuk dilakukan adalah memanfaatkan beberapa sekolah yang ada saat ini dan “meningkatkan” kualitasnya. Contoh: sekolah di Baukau, yang dapat digunakan sebagai mitra pelatihan bagi siswa-siswanya untuk Penginapan Baukau yang terkenal.

- Dengan dukungan dari pemimpin daerah dan / atau orang-orang yang sangat mengetahui tentang wilayah tersebut, mengidentifikasi beberapa rute jalan atau jalur yang menarik minat wisatawan dan melakukan beberapa pekerjaan untuk meningkatkan kondisi penggunaannya. Kekhawatiran ini, khususnya dan sebagai contoh, beberapa jalan pedesaan dengan akses ke tempat-tempat yang menarik bagi wisatawan (pemandangan), seperti jalan yang menghubungkan Baukau-Venilale, melewati “Danau Venilale” dan hingga sampai kota ini melalui bagian timur. Contoh lainnya adalah jalan lama yang menghubungkan Maubara dengan perbatasan melalui Vatuvou.



- Program rehabilitasi jalan pedesaan harus diperluas dan mencakup jalan lain yang rehabilitasinya akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Rehabilitasi ini dapat mengikuti contoh jalan dalam program “Roads 4 Development” yang didanai Australia, tetapi menghindari pengeluaran yang berlebihan untuk saran teknis luar negeri.
- Pembuatan beberapa infrastruktur yang dapat mendiversifikasi penawaran wisata negara dan menarik wisatawan nasional maupun mancanegara. Sebagai contoh, pembuatan lapangan golf di suatu tempat di dekat Baukau (di jalan menurun ke pantai Wataboo, misalnya) yang, dalam jangka panjang, dapat menarik wisatawan asing yang akan dapat menggunakan jalan Dili-Baukau yang sekarang telah direhabilitasi dan / atau bandara Baukau yang telah direhabilitasi - setidaknya dalam beberapa periode dalam setahun (musim kemarau atau, umumnya, dari Maret hingga Oktober).
- **Pengendalian buaya** di pantai utara agar penggunaan pantainya tidak beresiko.
- Pendirian fasilitas dukungan kesehatan bagi wisatawan, seperti, **unit pemulihan kecelakaan pada penyelaman** di sepanjang pantai utara. Penginapan Baukau mulai mendirikan unit seperti itu tetapi tidak menyelesaikannya. Dukungan kesehatan

yang berkualitas ini akan menjadi penting dalam periode pasca-COVID-19 di masa mendatang karena, setidaknya di tahun-tahun mendatang, salah satu hal mendasar yang harus diperhatikan dalam pilihan wisatawan yang dilakukan mengenai destinasi mereka adalah ketersediaan fasilitas dukungan kesehatan yang berkualitas — dan dalam hal ini, penting untuk meningkatkan layanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Nasional Guido Valadares tetapi juga oleh rumah sakit regional lainnya.

- **Meningkatkan promosi di luar negeri tentang kekayaan pariwisata** negara (misalnya, melalui kedutaan Timor-Leste), seperti kekayaan laut Timor-Leste (pantai utara, Atauro dan Jaco) untuk pelatihan olahraga diving dan *snorkeling*, tetapi juga pendakian gunung. Hal ini berimplikasi pada alokasi anggaran yang lebih besar untuk kampanye pemasaran dan promosi negara di luar negeri, terutama di negara-negara terdekat yang terhubung melalui transportasi udara, seperti Australia, Indonesia dan Singapura.
- **Mempromosikakan unit-unit Eko-Wisata**, dengan menggabungkan akomodasi dengan perkebunan kopi atau persawahan, misalnya, memberikan pandangan yang lebih berkelanjutan tentang aktivitas wisata dan memungkinkan wisatawan mendapatkan pengalaman baru di Timor-Leste, dan memiliki hubungan erat dengan alam.
- Kemungkinan pembangunan **Satu “Taman tematik” yang berkualitas tentang budaya dan sejarah Timor-Leste** di sekitar Dili — Metinaro atau Likisa — yang melestarikan beberapa elemen ini dimasa depan, misalnya rumah “adat” dari setiap daerah tetapi juga kegiatan kerajinan tangan. “Taman tematik” ini bisa menjadi titik penting untuk daya tarik bagi wisatawan nasional dan manca negara, khususnya anak-anak sekolah agar bisa mengenal lebih mendalam tentang negerinya sendiri, dimana kebanyakan masyarakat Timor-Leste sendiri belum mengetahuinya karena sirkulasi mereka di teritori nasional, sampai sekarang masih terbatas.
- Melakukan segala upaya agar pembangunan proyek ***Pelican Paradise*** dimulai pada 2021
- Awal persiapan **pembangunan Museum dan Perpustakaan Nasional** di lokasi yang ditentukan dekat kantor Kepresidenan, di tempat dimana selama masa pemerintahan portugis berfungsi sebagai bandara. Perlu diingat bahwa ada anggaran (sekitar 10 juta USD) yang telah ditetapkan untuk proyek itu, dalam kesepakatan penelitian tentang minyak yang ditandatangani antara Timor-Leste dan perusahaan ENI dari Italia, untuk pembiayaan (sebagian) pekerjaan ini. Proyek ini sangat penting, oleh karena itu, harus segera diprogramkan dan setelah itu dibangun.
- Ada banyak manfaat dalam mengartikulasikan kekuasaan negara dengan **kelompok masyarakat sipil** (seperti, LSM, yang pendiriannya harus didorong) yang secara khusus berdedikasi dan secara teknis siap mendukung rekonstruksi dan pelestarian warisan kita. Masyarakat sipil harus mengorganisasi diri lebih ke tujuan ini dan Pemerintah harus membantu dan bersandar pada kelompok-kelompok yang didirikan oleh masyarakat sipil itu sendiri, yang menunjukkan kapasitas teknis dan ilmiah untuk membantu dalam tugas yang diusulkan. Pengalaman dari Goa, di India, bisa digunakan sebagai referensi.
- Dalam proses desentralisasi administratif yang ingin dilaksanakan, **perlindungan pada warisan budaya negara oleh badan-badan pusat Negara** harus dijamin, karena ini bersifat nasional dan bukan hanya daerah. Perlu diingat sebagai contoh, di mana jika tanggung-jawab ini dibiarkan kepada pemimpin lokal, mereka bisa, karena kekurangan pengetahuan dan tidak memiliki kesiapan teknis, “menghancurkan komponen-komponen warisan alam (seperti: “pantai 1 dolar/ One Dolar Beach”) dan kantor (pasar kabupaten Baukau yang kehilangan karakternya tanpa sepengetahuan Sekretaris Negara untuk Urusan Kebudayaan, oleh pemerintahan kabupaten tersebut).

- Mempelajari kemungkinan untuk melakukan kesepakatan **dengan satu atau dua maskapai penerbangan** yang memastikan, dengan harga yang terkendali, koneksi udara dengan luar negeri - khususnya dengan Singapura, Bali dan Darwin atau satu atau dua kota di Australia (Sydney, Perth). Kesepakatan ini dapat meliputi jaminan dari Pemerintah Timor-Leste, persentase tertentu dari kursi yang tersedia, yang akan memberikan keuntungan untuk penerbangan dan dapat digunakan oleh orang Timor dalam perjalanan resmi - termasuk pelajar Timor di luar negeri.

Tingkat indikatif investasi publik dalam tiga tahun ke depan (2021-2023) termasuk USD 2 juta per tahun untuk kegiatan tertentu di industri pariwisata:

- Layanan konsultasi untuk implementasi rencana strategis - pasar, tema dan audit produk.
- Membangun strategi pemasaran dan basis informasi, terutama pemasaran digital, untuk memberikan visibilitas yang lebih besar di luar negeri tentang negara ini.
- Mengidentifikasi daftar tindakan untuk mempromosikan produk-produk yang dapat dikembangkan.
- Mendukung Perhimpunan Pemilik Hotel (HOTL) dan mendirikan kembali Asosiasi Industri Pariwisata, sebagai badan penasihat industri, tetapi juga sebagai sarana yang memiliki yang lebih banyak kontak tentang pengalaman pariwisata di luar Timor-Leste.
- Bekerja dalam pemulihan layanan udara ke Australia dan Singapura, termasuk menyiapkan standar layanan pasca-COVID-19.

2.3.2 PERUMAHAN

Selain sektor pariwisata, satu sektor lain, yang untuk beragam alasan (ekonomi dan sosial) mungkin diistimewakan dalam jangka pendek dan, terutama, dalam jangka menengah-panjang, adalah **konstruksi sipil** dan pekerjaan umum karena banyaknya pekerjaan yang biasanya diciptakan, terkait dengan sumber daya tenaga kerja berkualitas rendah, seperti sebagian besar yang ada di Timor-Leste.

Dalam sektor konstruksi sipil, kita percaya bahwa, dengan mematuhi prinsip-prinsip keadilan sosial, **pembangunan perumahan dengan harga murah / ekonomis** yang dapat disediakan untuk penyewa dengan harga sewa rendah, harus diistimewakan.

Beberapa prinsip yang mendasari penerapan kebijakan ini:

- Perumahan harus dibangun dengan bahan yang memungkinkan **penggabungan nasional maksimum dan dengan harga yang terjangkau**, oleh karena itu tidak akan termasuk dalam pembangunan perumahan ini jenis “kampung milenium” karena sebagian besar komponennya diimpor, dan karena kualitas konstruksi sangat rendah (dan tidak terlalu tahan lama) dan karena masalah-masalah yang ditimbulkan dalam proses pendistribusiannya - disarankan untuk melakukan studi sosial-ekonomi tentang “kampung-kampung milenium” ini, misalnya.
- Perumahan harus dibangun di **“lingkungan” yang memiliki infrastruktur yang baik** dan dalam kerangka proses urbanisasi di daerah yang akan dibangun — yang menuntut dipercepatnya penerbitan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan teritorial, yang diblokir oleh Parlemen Nasional beberapa tahun lalu.
- Demi **pemamfaatan ruang kota yang sebaik mungkin, mungkin** lebih diutamakan bangunan dengan 2 atau, paling banyak, 3 lantai untuk menghindari penggunaan elevator yang akan membuat konstruksi menjadi lebih mahal dan membutuhkan

ketersediaan sarana teknis yang diimpor, di samping tuntutan selanjutnya dalam hal pemeliharaan. Pada model perumahan dengan dua lantai, jika ada ruang, lebih baik membangun rumah / vila yang tersambung satu sama lain (misalnya, satu bagian untuk satu keluarga dan bagian lainnya untuk yang lain), dengan dua lantai, dengan halaman kecil yang bisa digunakan untuk menanam pohon buah dan sayur-sayuran.

Komponen konstruksi harus dipertimbangkan dengan partisipasi dan keterlibatan langsung calon penyewa dalam angkatan kerja—diawasi dan dipantau oleh orang yang bertanggung jawab / mandor yang kompeten untuk tujuan tersebut. Pemerintah bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan membuat rencana pembangunan yang tersedia dan rencana konstruksi yang akan tersedia bagi para pembangun, mungkin anggota dan kelompok gotong-royong atau koperasi.

- Penyewa, saat membayar sewa, **mencicil biaya untuk tempat tinggal** yang akan menjadi miliknya setelah 20 atau 25 tahun.
- Karena jenis urbanisasi ini tidak sama dengan perumahan tradisional masyarakat Timor-Leste, penyewa harus berkomitmen untuk mematuhi aturan ketat tentang kehidupan kolektif dalam jenis perumahan seperti ini. Bagi yang tidak menaati aturan-aturan ini secara sistematis, harus dihukum dengan dikeluarkan dari perumahan.
- Karena tidak diinginkan agar hal ini terjadi, perumahan yang akan dibangun harus terdiri dari, paling tidak, dua jenis dengan kualitas yang berbeda, dan secara alami, biaya sewa bulannya juga akan berbeda.
- Kepemilikan dan inisiatif pembangunan perumahan harus diberikan kepada **entitas pemerintah** yang bertanggung jawab atas pengelolaan persediaan perumahan milik negara, tetapi dapat memasukkan komponen dengan partisipasi dari penerima untuk memanfaatkan pembangunan itu sendiri. Boleh diputuskan bahwa entitas itu:
 - menjadi bagian dari sistem jaminan sosial: **Lembaga Jaminan Sosial Nasional (INSS, Instituto Nacional de Segurança Social)** itu sendiri; atau
 - Sebuah badan otonom tetapi diawasi oleh Kementerian Jaminan Sosial, seperti “Institut Nasional Perumahan Sosial” (INPS) [“Instituto Nacional de Habitação Social” (INHS)].

Dari semua pilihan tersebut, program “perumahan sosial” dapat dibiayai bersama oleh Negara, melalui pinjaman dari bank komersial.

Sebagai bagian dari kebijakan perumahan ini, namun tidak terbatas pada itu, harus dilakukan upaya untuk meningkatkan kebersihan dasar, pasokan air ke rumah yang kualitasnya terkontrol dan pasokan listrik, terutama di daerah (pedesaan tetapi tidak hanya), yang kondisinya sudah ada untuk dilakukan dan itu tidak dilakukan karena alasan yang susah dipahami.

Semua proyek ini memiliki (setidaknya) dua karakteristik yang tampaknya penting bagi kita:

1. pada dasarnya adalah **menciptakan lapangan kerja**, khususnya pekerjaan untuk tenaga kerja yang kurang terampil, oleh karena itu, sesuai dengan karakteristik tenaga kerja kita saat ini;
2. jika sudah beroperasi, merupakan **kontribusi penting bagi kondisi kesehatan** masyarakat kita.

Pemerintahlah yang berhak untuk memutuskan prioritas pekerjaan yang akan dilaksanakan. Akan tetapi, kami menyarankan agar untuk dua tahun ke depan sudah ada perencanaan intervensi di wilayah yang disebutkan, setidaknya di beberapa daerah di kota Dili (kawasan kota dengan model penataan segi empat, misalnya Bairro Pité).

Masih di bidang kebersihan, sudah harus dipertimbangkan, pembangunan instalasi pengolahan limbah dan air limbah modern yang melayani kota Dili.

Untuk ke depannya, sudah harus dilakukan intervensi (kebersihan, suplai air minum dengan kualitas yang terkontrol, asokan listrik, pengolahan limbah dan air limbah) di kota-kota lain, seperti Baukau, Maliana dan Pante Makasar.

Jika memungkinkan, harus dilakukan upaya untuk menyediakan **kran umum air bersih** bagi penduduk pedesaan, tetapi kualitas air yang tersedia harus dijaga, dengan memastikan kontrol bahan kimia secara teratur.

2.3.3 MODAL MANUSIA: PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

Meskipun telah dicapai kemajuan, tingkat pembangunan sumber daya manusia saat ini masih menunjukkan situasi yang jauh dari apa yang kita inginkan untuk negara kita—dengan indikator yang masih mengkhawatirkan di berbagai tingkatan, yaitu kemiskinan, (kurang) gizi, kematian ibu dan anak, (rendahnya) kualifikasi tenaga kerja, pengangguran dan pekerjaan rentan, cakupan perlindungan sosial, (hambatan) akses ke barang dan jasa, dan kesenjangan regional. Dalam periode pertumbuhan ekonomi yang lebih besar sekalipun, hal ini tidak diterjemahkan ke dalam pengurangan kemiskinan yang nyata dan pembangunan manusia — dan, setidaknya sebagian, ini adalah cerminan dari dana yang setiap tahun dialokasikan oleh Negara untuk bidang-bidang ini.

Dalam dua tabel di bawah ini dipublikasikan informasi yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama beberapa tahun.

Tabel di bawah ini menunjukkan perkiraan dana untuk berbagai program Dana Infrastruktur untuk periode 2011–2019.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total 11-19
Program										
Kesehatan + Pendidikan	5098	17745	10463	7127	4751	2452	1205	608	2063	20515
Imigrasi + pariwisata	2634	9229	6953	12074	16966	4397	3406	4098	2742	62500
Total 4 di atas	7732	26974	17416	19201	21717	6849	4611	4706	4805	83015
Modal fisik (listrik* pelabuhan*bandara+ TasiM+Jembatan+Jalan										
	5506868	590551	381776	239990	188162	587901	187037	283166	228054	3066085

Apa yang ingin diungkapkan di sini adalah perbedaan besar antara dana yang dialokasikan untuk berbagai program dari waktu ke waktu. Perlu dicatat bahwa meskipun berbagai pernyataan dari Pemerintah tentang Program dan Anggaran Pemerintah menekankan pentingnya sektor Kesehatan, Pendidikan, Pertanian / irigasi dan Pariwisata, jumlah TOTAL Dana Infrastruktur untuk 9 tahun, dari 2011 hingga 2019, sekitar USD 83 juta - sangat kontras dengan USD 3.066 juta yang dialokasikan untuk modal fisik - 37 kali lebih besar dari anggaran yang mempengaruhi 4 sektor yang disebutkan di awal.

Tabel berikut menunjukkan jumlah yang dialokasikan antara 2009 dan 2019 untuk sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, solidaritas sosial, dan veteran serta pariwisata, perdagangan dan industri.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total 09-19	% 09-19
Kesehatan	32,893	35,692	37,914	48,323	65,058	67,217	67,849	42,387	43,715	42,709	45,371	526,128	3.56
Pendidikan	62,570	67,486	70,139	94,773	92,008	106,618	99,866	100,613	86,074	72,727	81,973	934,847	6.33
Solidaritas sosial dan veteran	74,523	69,597	104,678	127,986	148,958	146,716	197,165	157,959	162,346	153,061	158,671	1,501,660	10.17
Pertanian	33,914	16,398	12,909	16,186	25,164	25,247	25,677	22,343	16,192	7,016	14,709	215,755	1.46
Pariwisata, Perdagangan da Industri	61,008	38,374	27,209	18,894	23,270	27,826	32,488	18,286	14,196	5,532	7,775	274,858	1.86
Total anggaran	902,000	859,000	1,500,800	1,674,130	1,850,900	1,677,900	1,570,000	1,562,200	1,386,800	1,459,100	1,989,600	14,759,974	

Satuan: Ribuan USD - Sumber: Buku 1 & Anggaran Umum Negara (beberapa tahun)

Perlu dikgarisbawahi bahwa selama periode yang bersangkutan, alokasi dana untuk kesehatan hanya 3,5% dan sektor pendidikan mendapat alokasi 6,3% dari total APBN dan dengan kecenderungan menurun; Pada periode yang sama, pertanian memiliki 1,4% dan pariwisata 1,8%, juga dengan kecenderungan menurun, berbeda dengan transfer publik ke solidaritas sosial dan veteran yang melebihi 10% dari total yang dianggarkan.

Dalam rancangan APBN terakhir yang diajukan untuk tahun 2020 (yaitu pada Desember 2019), jumlah yang terpengaruh baik dalam “pengeluaran saat ini” dan dalam “pengeluaran modal” untuk modal manusia dan pertanian (anggaran untuk sektor Pariwisata tidak disertakan di sini), secara total, sekitar USD 210 juta (120 juta untuk Pendidikan + 70,8 juta untuk Kesehatan + 19,9 juta untuk pertanian), sekali lagi, sangat kontras dengan pengeluaran untuk modal fisik.

TABEL: PENGELUARAN UNTUK MODAL MANUSIA (dalam Juta Dolar dan %)			
	APBN 2019 (USD 1482 juta USD)	APBN 2020 Oktober (1950 juta USD)	APBN2020 Desember (1668 juta USD)
Pendidikan: Kementerian Pendidikan + Kemen. Pendidikan Tinggi + FI_Pendidikan	82,4 + 7,1 + 20 + 0,67 = 110,17 (7,4%)	164,7 (8,4%)	96,075 + 7,210 + 13 + 3,8 = 120,085 (7,2%)
Kesehatan: Kemen. Kesehatan + HNGV + FI_Kesehatan	46,2 + 10,5 + 1,1 = 57,8 (3,9%)	73,6 (3,8%)	58,4 + 12,07 + 0,7 = 70,77 (4,2%)
Pertanian: MPP + FI_Pertanian	14,7 + 1,6 = 16,3 (1,1%)	29,4 (1,5%)	17,299 + 2,6 = 19,899 (1,2%)
Total (Pendidikan+ Kesehatan+ Pertanian)	184,3 (12,4%)	267,7 (13,7%)	210,8 (12,6%)

Sumber: Proposal kebijakan tentang APBN

Jika tujuannya, seperti yang diusulkan dalam Rencana Pemulihan Ekonomi ini, adalah untuk meningkatkan, dalam jangka menengah hingga jangka panjang, modal manusia Timor-Leste, modal manusia harus mendapatkan lebih banyak sumber daya yang dialokasikan kepadanya dalam Anggaran Pendapatan Negara— setidaknya dari 2021 dan seterusnya.

2.3.3.1 PENDIDIKAN

Proposal konkret untuk **memperbaiki situasi pendidikan** adalah dengan **meningkatkan anggaran tahunan untuk sektor pendidikan setidaknya 2 poin persentase per tahun hingga dua kali lipat dari jumlah saat ini**.

Tetapi karena masalahnya tidak hanya kuantitatif, mengalokasikan lebih banyak anggaran tidak dengan sendirinya menyelesaikan permasalahan di sektor ini. Pilihannya harus dua: memperluas cakupan pendidikan, di semua tingkatan hingga menengah (inklusif); dan meningkatkan mutunya.

Ini memerlukan, sejak awal, investasi dalam infrastruktur (ukuran - contohnya: 88,4 siswa / kelas - kelas di sekolah menengah membuat pengajaran yang berkualitas tidak mungkin) dan materi (yaitu buku pelajaran dan materi pendukung lainnya). Dalam jangka pendek hingga menengah - sudah dengan APBN tahun 2021 - kita percaya bahwa merupakan sesuatu yang mungkin, untuk meningkatkan pendidikan, **peningkatan pengeluaran saat ini** (dengan, misalnya, meningkatkan akses siswa ke bahan pelajaran dan meningkatkan pelatihan kualitas guru) atau **pengeluaran untuk investasi** (meningkatkan infrastruktur sekolah: sekolah yang lebih baik dan perlengkapan yang lebih baik). Jenis pengeluaran yang terakhir ini memungkinkan terserapnya sejumlah besar tenaga kerja lokal, sehingga memperluas pasar tenaga kerja dalam kegiatan padat karya, seperti yang disyaratkan oleh karakteristik konjungtur dan pasar tenaga kerja nasional. Pekerjaan ini harus diawasi secara ketat oleh pemerintah pusat dalam hal perencanaan dan pelaksanaannya untuk menjamin kualitasnya.

Namun demikian, upaya untuk memperluas cakupan dan kualitas pendidikan merupakan tugas berkelanjutan, dan hasilnya akan terlihat pada jangka panjang - oleh karena itu tidak boleh, seharusnya tidak, mencegah dimulainya upaya untuk mencapai hasil ini sekarang!

Dalam hal ini, dengan pertimbangan khususnya pada peningkatan **mutu** pengajaran dan **perluasan pendidikan menengah dan pra-sekolah**, suatu pilihan yang baik, mencakup, misalnya, **memperluas jaringan CAFE** untuk menggandakan jumlah siswanya sampai akhir masa legislatif. Memperluas jaringan ini juga memiliki keuntungan dalam mendukung secara langsung pelatihan para guru Timor-Leste yang terlibat - aspek ini merupakan aset penting CAFE, karena menempatkan kita dalam kontak dengan praktik ilmiah dan pedagogis yang lebih baik.

Pelatihan guru - termasuk di tingkat ilmiah dan pedagogis - memiliki peranan penting dalam pengembangan sektor Pendidikan: hanya dengan guru yang terlatih dapat meningkatkan mutu pengajaran. Dan ini akan tercermin dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di dalam negeri dan sebagai hasilnya, dalam pembangunan yang sesungguhnya untuk sektor ini.

Namun demikian, **peningkatan kualitas pendidikan juga penting untuk meningkatkan investasi (nasional dan luar negeri)** di sektor produktif nasional — untuk menghadapi daya tarik negara-negara lain di kawasan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada Timor-Leste. Dengan tingkat yang ada saat ini dan tidak ada faktor daya saing lain dengan negara lain, **kemampuan Timor-Leste untuk menarik investasi luar negeri akan sangat terbatas — seperti yang ditunjukkan oleh sejarah investasi baru-baru ini** di negara ini meskipun memiliki undang-undang yang sangat menarik bagi investasi.

Hal yang penting untuk meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan pekerjaan yang berkualitas adalah memperluas pendidikan kejuruan / Pelatihan Kejuruan. Pada tahap ini, jika ingin meningkatkan jumlah lulusan secara signifikan, penting untuk meningkatkan kualitas mereka dengan memperbaiki sekolah / pusat pelatihan yang ada. Mungkin ini hanya bisa dilakukan, seperti yang pada awalnya terjadi dengan pusat pelatihan profesional di Tibar (kerjasama Portugis) dan Becora (SENAI Brazil), dengan bantuan dari beberapa mitra pembangunan, karena biaya peralatan yang besar untuk dipasang di sekolah dan kurangnya staf yang siap secara teknis untuk melatih siswa.

Satu kalimat khusus tentang pendidikan tinggi di Timor-Leste. Negara harus menuntut lebih dalam hal kualitas pengajaran di tingkat ini di dalam negeri, baik di UNTL maupun di universitas-universitas swasta. Sayangnya, banyak jurusan yang tidak memiliki kualitas yang cukup, meninggalkan kesan, terutama yang berkaitan dengan universitas swasta, bahwa ini adalah cara untuk “menyembunyikan” apa yang akan menjadi sekelompok besar pemuda yang menganggur atau setengah menganggur. Selain itu, ada juga kesan bahwa banyak dari lulus dari universitas-universitas ini akhirnya tidak mendapatkan pekerjaan di lapangan kerja atau menemukan mereka di bidang yang sama sekali berbeda dengan pendidikan mereka.

Kesimpulannya, kita percaya bahwa negara membutuhkan Universitas / pendidikan tinggi yang lebih baik dan bukannya yang lebih banyak seperti yang terjadi selama ini, dengan menyalakan banyak sumber daya yang langka – milik Negara bagian dan keluarga, yang membiayai pendidikan yang akhirnya tidak banyak berguna bagi anak-anak mereka.

Mengingat keterbatasan sumber daya dan pentingnya investasi dalam meningkatkan kualitas perguruan tinggi, menurut kami, daripada terus memberikan subsidi publik gratis kepada Perguruan Tinggi Swasta—di mana siswa membayar uang sekolah, yang dalam beberapa kasus sangat mahal - akan lebih baik jika memberikan dukungan yang bersyarat dan membuat institusi-institusi itu bertanggung jawab.

Dengan demikian, diusulkan agar dibuat Dana Pinjaman, dengan modal awal yang diberikan oleh Pemerintah, untuk dikelola oleh bank-bank komersil (satu atau lebih), dimaksudkan untuk mendukung Lembaga-lembaga Swasta itu, sehingga dapat berinvestasi dalam perbaikan infrastruktur fisik dan pelatihan sumber daya manusianya. “Layanan kredit” ini harus menawarkan syarat pemberian sehubungan dengan pasar, segera setelah tarif bersubsidi, dan akses ke layanan kredit ini memerlukan kondisi dan / atau proyek yang dievaluasi sebelumnya.

Juga merupakan pemborosan sumber daya jika Negara memberikan beasiswa kepada warga negaranya untuk belajar di luar negeri tapi setelah kembali tidak memanfaatkannya. Berapa banyak lulusan seperti ini, yang saat mereka kembali ke tanah air, melihat tidak adanya lapangan kerja - termasuk yang disediakan oleh Negara, yang telah membiayai pendidikan mereka! ... — dan harus merantau ke negara lain dan bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan kualifikasi mereka.

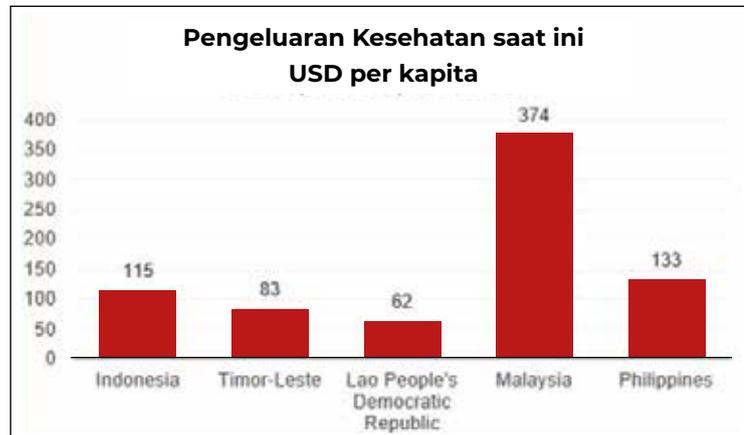
Negara harus memberi contoh dalam hal peningkatan kualifikasi tenaga kerjanya. Ada beberapa kasus lulusan luar negeri yang tidak mendapatkan tempat di antara kita dan akhirnya merantau ke luar negeri, dengan begitu sumber daya yang dihabiskan untuk pendidikan mereka terbuang begitu saja tanpa manfaat apa pun bagi negara. Menurut laporan dari UNDP, tahun 2018 hanya 28,2% tenaga kerja Timor-Leste yang memenuhi syarat. Oleh karena itu, inilah saatnya untuk berinvestasi lebih banyak dalam pendidikan sebagai salah satu cara yang mungkin untuk meningkatkan tingkat produktivitas di Timor-Leste dan, sebagai hasilnya dalam jangka menengah / panjang, mengurangi kemiskinan. Orang-orang muda berusia hingga 25 tahun merupakan sebagian besar dari populasi kita, sehingga pendidikan akan menjadi pendorong utama pembangunan Timor-Leste di tahun-tahun mendatang.

Satu catatan terakhir untuk satu hal yang sangat penting: menciptakan kondisi untuk kebijakan yang koheren dan terorganisir untuk peningkatan dan distribusi infrastruktur, fisik, teknis dan manusia di lembaga pendidikan di seluruh negeri. Untuk itu, dan sebagai proposal konkrit, kami menyarankan agar 13 **Surat Edukasi** (satu per Kabupaten dan Wilayah Administratif Oekusi Ambenu), ditulis pada tahun 2014/2015, bersama-sama oleh Kementerian Pendidikan Timor-Leste dan Universitas Katólik Portugal, di bawah koordinasi seorang spesialis yang diakui dalam kebijakan pendidikan. Surat-surat Pendidikan ini— yang harus diperbarui sekarang — yang berisi diagnosis tentang situasi pendidikan negara ini, merupakan alat perencanaan yang penting, dengan proposal konkret untuk strategi reorganisasi jaringan pendidikan. Pekerjaan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk

menentukan kebijakan konkret, di setiap kabupaten, yang bertujuan untuk memperluas pendidikan wajib untuk semua, meringankan masalah aksesibilitas di beberapa daerah, dan menyediakan sekolah dan guru dengan kondisi kerja yang layak, mendukung pendidikan inklusif dan berkualitas.

2.3.3.2 KESEHATAN

Timor-Leste telah melakukan upaya besar di bidang kesehatan. Namun, dibandingkan dengan negara lain di kawasan ini, angka ini masih kurang sesuai dengan indikator pengeluaran kesehatan pada tahun 2017 per kapita. Oleh karena itu, tampaknya ada ruang / kebutuhan untuk peningkatan pengeluaran ini.



Di tahun-tahun mendatang, fokus di bidang kesehatan harus diberikan pada Sistem Kesehatan Nasional (SNS, Sistema Nacional de Saúde), sumber daya manusia, rumah sakit dan peralatan, puskesmas dan pada persiapan sistem yang mampu menghadapi situasi-situasi darurat baru.

Berikut ini hanyalah beberapa catatan tentang beberapa aspek yang kami yakini penting untuk ditinjau di sektor ini (daftar ini tidak mengasumsikan kepentingan relatif yang lebih besar atau lebih kecil, dari item yang dirujuk):

- Pandemi COVID-19 telah menunjukkan pada sebagian besar negara betapa buruknya persiapan mereka di bidang kesehatan. Di Timor-Leste, bisa dikendalikan efek negatif dari pandemi pada penduduk, tetapi disadari bahwa jika dampaknya lebih besar, negara tidak akan siap sedikitpun — khususnya dalam peralatan pendukung kehidupan — untuk merespons. Tindakan segera yang harus diambil adalah melengkapi rumah-sakit rumah sakit nasional, terutama Rumah Sakit Nasional Guido Valadares dan beberapa rumah sakit rujukan lainnya, dengan peralatan yang sesuai (misalnya: “paru-paru buatan”) dan tenaga profesional terlatih yang mampu menggunakan peralatan tersebut.
- Ada banyak keluhan/laporan tentang kebersihan fasilitas dan rasa kemanusiaan pada saat perawatan pasien. Keduanya dapat diperbaiki sedemikian rupa dengan penerapan “praktik yang baik” dan pelatihan yang memadai. Mitra pembangunan, termasuk organisasi non-pemerintah dan ordo keagamaan, dapat memainkan peran penting dalam melatih para staf di salah satu bidang ini, baik di sekolah atau di rumah sakit dan pos-pos kesehatan, tetapi harus dipersiapkan sebaik mungkin juga staf untuk mengawasi kegiatan ini untuk memastikan pelaksanaan yang efektif oleh para tenaga kesehatan. Kehadiran teknisi dari mitra pembangunan di Timor-Leste—seperti dari Kuba—harus dimanfaatkan secara maksimal.
- Layanan Kesehatan Nasional (SNS, Serviço Nacional de Saúde) bersifat publik dan gratis— suatu pilar penting dari Negara Sosial dan landasan fundamental bagi pembangunan manusia, yang tercantung sebagai hak dalam Undang-Undang Dasar Negara. Tetapi, seperti kita tahu bahwa sulit bagi Negara untuk menjangkau semua warga secara langsung, dengan layanan yang berkualitas. Oleh karena itu, bisa dipertimbangkan kemungkinan agar beberapa rumah sakit / layanan kesehatan atau bagiannya diserahkan kepada manajemen swasta (termasuk sektor ketiga— yaitu Gereja Katolik dan ordo religius yang terkait dengannya), dengan subsidi Negara, sampai sejumlah rutinitas terinstal dengan baik dalam praktik tenaga kesehatan

saat ini—pengembangan kemitraan publik-swasta di bidang ini dapat menjadi strategi untuk dieksplorasi. Pelayanan kesehatan bagi warga harus terus gratis, tapi kualitasnya meningkat. Di masa depan, boleh dipikirkan untuk memperkenalkan sebagian pengguna SNS di beberapa layanan (“biaya terjangkau”) – tapi selalu membebaskan yang termiskin dan paling rentan.

- Kesulitan yang dirasakan dalam pengoperasian fasilitas kesehatan sehari-hari adalah kurangnya kemampuan untuk melakukan perawatan dan perbaikan peralatan yang semakin canggih. Solusi harus ditemukan untuk mencegah, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di HNGV, agar sebagian besar peralatan (dalam kasus perawatan hemodialisis) tidak dapat beroperasi selama beberapa bulan, yang berakibat pada perujukuan pasien ke luar negeri (Bali) meskipun perbaikan peralatan itu sederhana.
- Hal ini mengacu pada ketidakmampuan yang terlihat sejauh ini untuk memanfaatkan sepenuhnya sumber daya dari Klinik yang dibangun di dekat Rumah Sakit Rujukan Pante Makasar. Klinik ini seharusnya dilengkapi dengan peralatan dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjalankan fungsi yang menjadi alasan di balik pendiriannya. Oleh karena itu sarannya adalah membuat kontrak manajemen dengan perusahaan yang membangunnya atau perusahaan yang lain.
- Salah satu jenis penyakit yang umum di Timor-Leste adalah penyakit paru-paru, khususnya tuberkulosis. Dipercaya bahwa perawatan pasien-pasien ini memerlukan pendirian setidaknya satu pusat rumah sakit khusus yang didedikasikan untuk penyakit ini (bekas rumah sakit Dr. Carvalho, di pinggiran kota Dili, atau yang lain di daerah tertentu untuk perawatan pasien-pasien ini di Laclubar).
- Para pemimpin kesehatan harus melakukan upaya untuk membatasi masyarakat menggunakan obat “tradisional”. Pemulihan menggunakan “tradisi” oleh para pasien dan keluarganya, telah menelan banyak nyawa dan ini tidak dapat dilanjutkan. Penggunaan “praktek” “tradisional” akan cenderung berkurang jika ada peningkatan kapasitas sistem kesehatan nasional untuk merawat pasien yang menggunakannya dengan baik.

2.3.3.3 PERLINDUNGAN SOSIAL

“Perlindungan sosial memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, mewujudkan keadilan sosial dan dalam mewujudkan hak asasi manusia atas jaminan sosial bagi semua. Dalam hal ini, kebijakan perlindungan sosial merupakan elemen penting dari strategi pembangunan nasional dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan di sepanjang siklus kehidupan, dan mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan pendapatan keluarga, meningkatkan produktivitas dan pembangunan manusia, meningkatkan permintaan atau demand domestik, memfasilitasi transformasi struktural ekonomi dan mempromosikan pekerjaan yang layak.”

Sumber: ILO, Laporan Dunia tentang Perlindungan Sosial - 2017-2019

Perlindungan Sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan manusia, tetapi juga ekonomi, bukan hanya karena dukungan langsung yang diberikan kepada warga negara, tetapi juga karena efek multiplier yang dihasilkannya—terutama program transfer uang dan penciptaan lapangan kerja aktif - seperti yang tercantung dalam kutipan di atas.

Krisis saat ini yang disebabkan oleh COVID-19 telah menunjukkan kepada kita semua pentingnya memiliki sistem perlindungan sosial yang kuat, yang memungkinkan orang

menjadi lebih terlindungi dan lebih tangguh dalam situasi seperti itu—di seluruh dunia, sistem perlindungan sosial (dan jaminan sosial) adalah sistem yang memberikan tanggapan yang lebih cepat, koheren, dan terarah. Dan, tentu saja, negara-negara, dan di dalamnya orang-orang, yang memiliki kapasitas minim untuk menanggapi krisis, adalah mereka yang, sebelumnya berada dalam situasi yang lebih buruk dalam hal perlindungan sosial. Di akhir tahun 90-an, krisis Asia juga telah menunjukkan hal yang sama.

Di Timor-Leste, seperti di dalam hal sumber daya manusia lainnya, kemajuan yang signifikan telah dicapai sejak tahun 2002 dalam sistem Perlindungan Sosial—termasuk bantuan sosial, jaminan sosial dan layanan sosial. Namun, seperti yang disebutkan dalam Bab 2, sistem tersebut belum menjangkau sebagian besar penduduk—dengan cakupan yang sangat rendah untuk anak-anak dan penduduk usia kerja yang bekerja di sektor informal. Di sisi lain, sistem ini juga belum komprehensif dalam hal kemungkinan yang ditanggung dan risiko sosial-ekonomi yang dilindungi sepanjang hidup—khususnya, bahkan di bawah skema iuran, masih belum ada perlindungan terhadap penyakit atau pengangguran.

Meski demikian, selama masa pandemi ini, dalam sistem perlindungan sosial nasional ditemukan pulalah ditemukan respon-respon pertama untuk mendukung masyarakat, keluarga dan perusahaan.

Selama bertahun-tahun, berbagai langkah dan program perlindungan sosial, terutama dalam hal “bantuan sosial”, telah dikembangkan dan dilaksanakan secara terpisah, berupaya untuk menjawab kebutuhan, tetapi tanpa sebuah perencanaan strategis dan koordinasi yang memungkinkan perluasan cakupan (vertikal dan horizontal) secara permanen dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, langkah pertama yang diusulkan adalah **meloloskan dan memulai implementasi Strategi Nasional Perlindungan Sosial (ENPS, Estratégia Nacional de Proteção Social)** – yang disusun dengan dukungan teknis dari ILO, secara partisipatif, dan melibatkan berbagai Kementerian dan Badan-badan Negara, Mitra Sosial, Masyarakat Sipil dan Mitra Pembangunan. ENPS merupakan instrumen penting untuk intervensi pemrograman secara strategis, progresif, dan berkelanjutan, sesuai dengan kapasitas teknis dan ketersediaan keuangan negara. ENPS sudah mencakup sejumlah langkah kongkret, seputar tujuan pengurangan kemiskinan, peningkatan cakupan jaminan sosial, dan perbaikan kelembagaan dalam sistem perlindungan sosial.

Tanpa mengurangi langkah-langkah yang “lebih spesifik” tersebut, ijin kami menyampaikan beberapa proposal berikut untuk dikembangkan dalam jangka menengah, beberapa di antaranya akan dimulai awal tahun 2021:

- Mengoperasionalkan **layanan verifikasi untuk orang-orang penyandang disabilitas**, yang akan memungkinkan untuk mulai melindungi, dalam kerangka jaminan sosial, orang dengan cacat permanen atau sementara (seperti dalam kasus penyakit) untuk bekerja.

Memperbaiki sistem dan instrumen untuk mengoperasionalkan pembayaran untuk pengiriman uang, dengan menghindari pembayaran tunai - selain masalah keamanan, hal ini akan membantu mengurangi biaya pelaksanaan langkah jenis ini, dan membantu **ekonomi menggunakan sistem “bank”**. Perlu dicatat bahwa hanya sekitar 30% penduduk Timor yang memiliki rekening bank.

- Menyetujui konstitusi dan model pengelolaan **Dana Cadangan Jaminan Sosial (FRSS)**, dan mulai mengkapitalisasi cadangan yang telah terhimpun dalam skema iuran jaminan sosial, untuk menjamin keberlanjutannya di masa depan, dengan kata lain, akan selalu ada cukup uang untuk membayar dana pensiunan di masa depan. Sebagai prinsip dasar yang fundamental, harus dipastikan: bahwa FRSS dikelola secara mandiri, oleh lembaga yang sesuai dan dengan akses permanen ke pasar modal; bahwa investasinya dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan

persyaratan keamanan, likuiditas dan profitabilitas; bahwa ada pemisahan total dan jelas antara dana FRSS dan dana Negara - dana FRSS adalah berada “dalam pengawasan” jaminan sosial, tetapi menjadi milik pembayar pajak, penerima manfaat dari skema ini, dan oleh karena itu tidak sah bagi Negara untuk menggunakannya seperti miliknya untuk pembiayaan kegiatannya.

- Dalam lingkup **bantuan sosial**, menciptakan kondisi agar **cakupan program Beasiswa untuk anak-anak tidak mampu diperluas**,— karena disadari bahwa program ini bisa memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan di antara anak-anak, yang saat ini merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kemiskinan.
- Dalam lingkup skema jaminan sosial **non-kontributif**, menciptakan perlindungan pada kematian.
- Dalam lingkup skema iuran jaminan sosial, menciptakan **perlindungan terhadap penyakit dan pengangguran** - tunjangan sakit dan tunjangan pengangguran harus dikontrol sebaik mungkin untuk mencegah penyalahgunaan.

Mengenai perlindungan pada pengangguran, kami menganggap bahwa itu hanya berarti jika terkait dengan kebijakan ketenagakerjaan aktif: dengan kata lain, tujuannya adalah untuk melindungi hilangnya pendapatan dari mereka yang bekerja, kehilangan pekerjaan, tetapi bersedia untuk kembali bekerja / mencari pekerjaan. Oleh karena itu, kami percaya bahwa penting, sebelum menerapkan tunjangan ini, untuk meningkatkan sistem dan tempat pendaftaran pengangguran (“pusat kerja”) dan merancang langkah-langkah ketenagakerjaan aktif (termasuk magang kerja) dan pelatihan – karena, jika tidak “tunjangan pengangguran” bisa menjadi “pendapatan minimum” tanpa syarat, yang membawa penerima subsidi ke pasar informal.

- Melakukan kampanye tentang kesadaran dan informasi, secara masal, agar **pekerja informal dan keluarga-keluarga petani dapat berpartisipasi dalam skema jaminan sosial** – walaupun hal ini bisa berdampak, pada tahap awal, pada turut berpartisipasinya Negara dalam iuran untuk kontribusi. Langkah ini akan membantu memformalkan ekonomi, dan di saat yang juga memastikan perlindungan sosial yang bermartabat bagi kelompok orang / pekerja yang, berdasarkan sifat aktivitasnya, lebih rentan dan lebih tidak terlindungi.

Berinvestasi dalam pengembangan **program ketenagakerjaan aktif**, yang didukung secara langsung atau tidak langsung oleh Negara, seperti program ketenagakerjaan pedesaan yang intensif. Contoh nyata dari program ini adalah program pembangunan parasarana umum – kran air umum, pasar, jalan pedesaan yang kualitasnya tidak kalah dengan program “*Roads 4 Development*”, dll. - tetapi juga jenis program kewirausahaan lokal lainnya. Program-program ini, karena bersifat padat karya, tanpa memerlukan keterampilan tinggi, memungkinkan terciptanya lapangan kerja, menjamin pendapatan dan, pada saat yang sama, berkontribusi untuk meningkatkan infrastruktur umum lokal, terutama di pedesaan. Dalam konteks ini, dan dengan mempertimbangkan praktik-praktik baik dan pengalaman negara lain, disarankan, misalnya, misi studi ke India, negara dengan pengalaman praktis dalam program serupa.

2.3.4 REFORMASI KELEMBAGAAN

Tujuan kita adalah tidak hanya agar perekonomian nasional yang tumbuh, tetapi agar pertumbuhan itu tercermin dalam pembangunan manusia yang lebih besar: ekonomi yang menciptakan lapangan kerja yang layak dan kesempatan untuk semua; masyarakat yang adil dan bersolidaritas, dengan kemiskinan dan kesenjangan yang lebih sedikit, dengan sumber

daya manusia yang berkualitas; ekonomi di mana setiap orang memiliki akses ke barang dan jasa penting (nutrisi, kesehatan, pendidikan, perumahan) dan mendapat manfaat dari perlindungan sosial yang memadai di seumur hidup.

Oleh karena itu, lebih dari sekedar “memulihkan” ekonomi pasca-COVID-19, adalah penting untuk menyelesaikan masalah struktural yang ada, membantu transformasi ekonomi dan sosial yang diperlukan, untuk mencapai tujuan yang diusulkan Timor-Leste. Dan tugas itu bisa dan harus dimulai sekarang.

Langkah-langkah yang diusulkan dalam Rencana ini memiliki tujuan yang sama, cukup komprehensif dan “meliputi” berbagai bidang dan sektor. Tetapi sangat penting agar **langkah-langkah ini dapat diterapkan secara efektif**, jika tidak “Rencana” ini tidak lebih dari sebuah surat niat baik saja. Untuk itu, penting bahwa setiap orang berkontribusi pada tujuan bersama ini, dalam strategi gabungan: Negara, Sektor swasta / Perusahaan, Bank, Lembaga swadaya masyarakat, dan warga negara itu sendiri. Walau demikian, kami percaya, bahwa Negara memainkan peran utama yang tak tergantikan - baik dengan menciptakan kerangka peraturan yang diperlukan, dengan mendukung dan memantau inisiatif swasta, atau bahkan dengan campur tangan langsung di bidang-bidang utama, untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan. Jadi, yang diinginkan, seperti yang telah dikatakan, pada dasarnya adalah negara yang lebih baik, dan tidak harus negara yang lebih besar.

Ini berarti bahwa hanya mungkin untuk menerapkan langkah-langkah yang diusulkan, untuk sektor ekonomi dan sosial, jika langkah-langkah itu disertai dengan intervensi dalam hal “pelatihan” dan peningkatan / **reformasi kelembagaan**.

Berikut ini adalah beberapa saran untuk mereformasi fungsi aparaturnya Negara guna meningkatkan manfaat bagi warga negara. Daftar ini jauh dari lengkap dan hanya bersifat indikatif.

- **Perundang-undangan yang diperlukan untuk investasi swasta:** khususnya, seperti yang telah disebutkan, sangat mendesak untuk mengesahkan “Undang-undang Pertanahan” dan undang-undang lain yang penting bagi beroperasinya perusahaan - termasuk peraturan tentang kepailitan/kebangkrutan.
- **Peran Pengadilan:** penting sekali agar Pengadilan tidak hanya menangani dan memutuskan kasus hukum pidana tetapi juga kasus hukum perdata. Jika ini tidak dilakukan, “keputusan” yang diambil hanya akan berpihak pada yang “lebih kuat” dan menindas yang “lebih lemah” dan merugikan, misalnya, perusahaan yang tidak berinvestasi di negara kita.
- **Kerangka Anggaran:** penyusunan dan pelolosan undang-undang kerangka anggaran baru, yang memperbaiki, mengoreksi / merevisi dan melengkapi Undang-undang Anggaran dan Pengelolaan Keuangan saat ini dan mengintegrasikan kerangka kerja dan aturan pengelolaan (anggaran dan keuangan) dari seluruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara, atau dengan kata lain, seluruh Sektor Administrasi Negara - termasuk, selain Administrasi Pusat Negara, juga Sektor Jaminan Sosial, Wilayah Administratif Khusus Okusi Ambenu, dan badan-badan Pemerintah Daerah yang akan datang. Undang-undang baru ini antara lain, harus mencakup klarifikasi konsep, batasan anggaran dan siklus pendapatan dan pengeluaran; penganggaran berdasarkan program; perencanaan multi-tahunan; aturan untuk penundaan undang-undang anggaran, jika perlu; serta perbaikan keseluruhan proses, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan keuangan, produksi informasi, akuntabilitas dan inspeksi.
- **Bagan Akun:** untuk sektor pemerintahan dan swasta, sangat penting untuk mengembangkan dan menyetujui “bagan akun” (yang, bagi Negara, secara alami akan memiliki kekhususannya sendiri), yang memungkinkan kontrol keuangan dan

akuntansi, dan sebagai hasilnya transparansi dalam akuntabilitas. Ini sangat penting tidak hanya untuk perusahaan-perusahaan itu sendiri (dan untuk pengetahuan internal mereka sendiri) tetapi juga untuk Negara, dalam perspektifnya untuk mendukung inisiatif swasta.

- **Reformasi Administrasi Negara:** untuk menjadikan aparatur Negara lebih efisien dan produktif, maka diusulkan empat langkah:
 - Menciptakan sebuah sistem evaluasi kinerja bagi pegawai negeri, yang yang lebih mengedepankan kelayakan dan, oleh karena itu, harus memberi dorongan. Sistem evaluasi kinerja harus disesuaikan dengan kategori pekerjaan Pegawai Negeri dan harus selaras dengan tugas yang dilakukan (TOR) dan tujuan tahunan, yang telah ditetapkan sebelumnya. Juga direkomendasikan agar proses ini dimodernisasi melalui penggunaan sistem komputer yang sesuai untuk menghindari pekerjaan manual dan pengiriman formulir kertas ke Dili.
 - Memperbaiki sistem pelatihan jangka pendek (kursus intensif), yang akan dilaksanakan selama jam kerja, ditujukan pada bidang tertentu dari kegiatan yang dikembangkan. Definisi Rencana Pelatihan tahunan harus sesuai dengan posisi dan kategori yang diduduki oleh masing-masing Pegawai Negeri, serta sejalan dengan perkembangan karir mereka. Kursus pelatihan yang tidak ada hubungannya dengan uraian tugas setiap karyawan harus dihindari. Agar ini berfungsi dengan baik, harus ada matriks kompetensi umum untuk semua pegawai negeri, dan matriks lain khusus untuk setiap kementerian, yang menyortir pengetahuan teknis yang diperlukan.
 - Tanpa mengurangi peranan yang dimiliki oleh Komisi Kepegawaian (CFP, Comissão da Função Pública), memperkuat, secara teknis dan kompetensi, tim/ layanan sumber daya manusia dari berbagai instansi, agar beberapa prosedur di Administrasi Negara berfungsi lebih cepat dan tidak terlalu birokratis. Disarankan bahwa tim-tim ini memiliki pelatihan teknis di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, khususnya di bidang perekrutan dan seleksi, manajemen pelatihan, evaluasi kinerja, manajemen karir dan manajemen administrasi sumber daya manusia, agar bisa memberi kontribusi yang lebih besar dan tanggapan yang lebih cepat kepada CFP.
 - Merestrukturisasi tenaga kerja di Administrasi Negara, dengan membuat proses pensiun pegawai negeri yang berusia diatas 60 tahun sebagai sesuatu yang wajib.
- **Catatan sipil:** membuat persyaratan yang diperlukan agar semua warga negara di Timor-Leste terdaftar dalam satu dokumen sipil dan wajib (seperti “kartu identitas”), dengan penomoran untuk seumur hidup – perlu diingat bahwa meskipun kartu identitas telah dibuat, ditujukan untuk semua orang, pada tahun 2004, dokumen identitas sipil ini masih jauh dari universal. Dokumen ini sangat penting untuk mengurangi / menghindari penipuan dan memudahkan pemberian layanan dan bantuan sosial, selain menjadi instrumen penting untuk merevitalisasi kewarganegaraan. Tujuan utama dari dokumen ini adalah untuk menciptakan database tunggal, yang terkait dengan satu dan hanya satu warga negara, memusatkan sebanyak mungkin informasi mengenai kewarganegaraannya.

Salah satu kemungkinan adalah pembuatan satu kartu khusus yang menghimpun informasi sipil, pajak, jaminan sosial dan kesehatan (bahkan jika kartu tersebut memiliki beberapa “nomor” yang terkait).

- **Layanan Statistik:** Direktorat Jenderal Statistik (DJS) Kementerian Keuangan telah melakukan pekerjaan penting – kadang-kadang dengan dukungan dan kolaborasi dari lembaga lain dan organisasi internasional. Akan tetapi, produksi dan ketersediaan

informasi statistik resmi untuk publik harus teratur dan independen dari kekuatan politik langsung. Namun, sangat penting bahwa studi dan analisis teknis tentang statistik yang dihasilkan juga dikembangkan di beberapa bidang (tentang Sensus, Neraca Nasional, Kemiskinan, Pasar Tenaga Kerja, dll.). Kami percaya bahwa ini hanya mungkin dengan mengubahnya menjadi sebuah badan otonom (Administrasi Negara Tidak Langsung). Oleh karena itu, sarannya adalah mengubah DJS saat ini menjadi sebuah Institut Publik (mungkin di bawah pengawasan Perdana Menteri sendiri atau Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perencanaan).

Masih di bidang statistik, penting bahwa, tanpa mengurangi aturan kerahasiaan, anonimitas dan perlindungan data, bisa tersedia di dalam pemerintah sendiri, dan berkaitan dengan hal ini, mikrodata yang diperlukan untuk produksi indikator atau studi khusus - misalnya, di bidang kemiskinan.

- **Konsultasi sosial:** Mengingat hubungan langsung antara bidang jaminan sosial (khususnya skema iuran jaminan sosial) dan bidang pekerjaan, serta pentingnya partisipasi dari kemitraan Sosial dalam diskusi dan dialog mengenai hal-hal tersebut, maka penting untuk memperkuat hubungan antara kedua bidang intervensi negara ini. Dengan demikian, diusulkan agar bidang Jaminan Sosial menjadi bagian dari Badan Koordinasi Sosial yang beroperasi di negara kita (yang sekarang disebut “Dewan Ketenagakerjaan Nasional”, sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan).
- **Pengawasan Ketenagakerjaan:** Diketahui secara umum bahwa ini adalah bidang di mana terdapat banyak pelanggaran legalitas di negara kita - yang berbangga sebagai Negara Hukum - adalah pematuhan terhadap aturan yang berlaku di pasar tenaga kerja. Inspektorat Umum Ketenagakerjaan dan layanan-layanan SEFOPE yang bertugas untuk memantau lebih dekat hubungan antara pengusaha (majikan) dan karyawan tampaknya kekurangan staf untuk mengembangkan aktivitas mereka secara tepat waktu—khususnya untuk melindungi para pekerja—dan oleh karena itu tidak hanya stafnya yang harus ditambah tetapi juga harus didorong untuk bertindak preventif dan tidak hanya sebagai reaksi terhadap pengaduan kasus-kasus yang terbukti ilegal karena, seringkali, para pekerja menghindari pelaporan situasi ini karena takut menjadi penganggur dan berada dalam situasi yang lebih buruk daripada yang mereka sedang alami.
- **Pasar tenaga kerja:** Untuk meningkatkan informasi statistik tentang pasar tenaga kerja dan, khususnya, tentang pengangguran, disarankan agar meningkatkan sistem pendaftaran / registrasi untuk pencari kerja, mejadikan pendaftaran ini sebagai sesuatu yang wajib, untuk tujuan dukungan pemerintah, baik pelatihan, magang, beasiswa, program dukungan untuk pekerjaan, atau tunjangan pengangguran di masa depan. Langkah ini harus mulai dikerjakan, sehingga dalam kurun waktu 2 tahun bisa menyediakan tunjangan pengangguran.

Di sisi lain, pendaftaran entitas pemberi kerja (yaitu perusahaan) bisa dan harus berhubungan dengan daftar komersial, pajak dan jaminan sosial, itu berarti, menciptakan **mekanisme khusus** yang memungkinkan bahwa ketika sebuah entitas melakukan pendaftaran komersialnya (di SERVE) informasi segera dikirim ke Kementerian Keuangan dan ke Jaminan Sosial— jika idealnya adalah “**komunikasi informatik**” melalui sistem database, dan jika ini mustahil untuk dilakukan secara langsung, mekanisme alternatif, walaupun secara manual, harus dibuat agar informasi yang beredar bisa mendukung untuk lebih memformalkan perekonomian. Tidak adanya komunikasi informatik ini, yang menghubungkan berbagai jenis informasi yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, menimbulkan proses seperti “penggelapan pajak/ menghindar dari otoritas pajak”, pernyataan yang tidak benar / tidak lengkap, tidak terdaftarnya karyawan di Jaminan Sosial dan, akhirnya berakibat pada pengurangan pendapatan Negara dan Jaminan Sosial, selain kurangnya perlindungan terhadap pekerja.

- **Reformasi Pajak:** Musthail untuk menerapkan kebijakan negara yang menghasilkan pengeluaran – berdasarkan “Keadaan Sosial” yang tercantum dalam UUD Negara —, tanpa pendapatan yang seimbang. Seperti yang disebutkan diatas, salah satu masalah struktural terbesar dalam perekonomian nasional adalah ketergantungan yang besar pada pendapatan dari minyak, termasuk pembiayaan pengeluaran Negara saat ini.; Sistem perpajakan yang ada saat ini terbatas dan kurang redistributif, sehingga diusulkan untuk direvisi secara menyeluruh, dengan beberapa pertimbangan antara lain: pembuatan tingkatan pajak yang progresif untuk pendapatan, dengan meningkatkan pajak pada pendapatan yang lebih tinggi; pemberlakuan pajak yang adil atas tunjangan sosial (khususnya, tunjangan pensiun sosial dan pensiun minimum); ketentuan pembebasan pajak dalam kasus-kasus tertentu, dan untuk waktu tertentu, untuk insentif langsung pada perekonomian; Kenaikan biaya pajak atas barang tertentu yang impornya ingin diganti. Namun, penting juga untuk memperkuat langkah-langkah pengumpulan dan pengendalian sehubungan dengan kepatuhan pembayaran pajak.
- **Koordinasi Antar Kementerian:** harus ada koordinasi antar berbagai Kementerian yang menjadi bagian Pemerintah untuk menghindari duplikasi tugas / tanggung jawab, serta untuk mengarahkan sumber daya yang ada secara memadai, berdasarkan ruang lingkup tugas masing-masing Kementerian.
- **Desentralisasi dan deskonsentrasi:** desentralisasi administratif (badan dan layanan Pemerintah Daerah, serupa dengan Kotamadya / Kabupaten) beberapa tahun terakhir telah dijadikan sebagai tujuan di Timor-Leste, namun tidak memiliki hasil praktis yang signifikan.

Deskonsentrasi administratif dan desentralisasi sangat penting dalam urusan hubungan langsung dengan masyarakat, karena memungkinkan untuk lebih dekat dengan rakyat, untuk lebih memahami masalah, karakteristik dan aspirasi mereka, untuk menyesuaikan tanggapan. Namun demikian, Pemerintah Daerah perlu dipersiapkan secara teknis, administratif dan finansial untuk menjalankan peran tersebut: perlu memiliki, paling tidak, SDM yang berkualitas, sistem akuntabilitas yang transparan, dan sarana untuk menciptakan pendapatan asli daerah.

Para Kepala Desa telah memberikan layanan dukungan penting kepada Pemerintah, dalam hubungan yang paling langsung dengan masyarakat, yaitu dalam masalah sosial.

Selain Kepala Desa, untuk saat ini, proses “pendekatan dengan warga negara” telah berkembang melalui penciptaan beberapa layanan desentralisasi dari badan-badan Administrasi Pusat — seperti Pusat / delegasi Kementerian di Kabupaten, tetapi juga Pemerintah Kabupaten itu sendiri yang, untuk saat ini, hanya berfungsi sebagai layanan deskonsentrasi dari Pemerintah Pusat, dan bukan sebagai “Pemerintah Daerah” yang otonom.

Kami percaya bahwa proses desentralisasi —yang seharusnya tidak menggantikan deskonsentrasi beberapa layanan, dalam hal-hal esensial yang harus selalu berada dalam tanggung-jawab Administrasi Pusat — harus dilakukan dengan hati-hati, sesuai dengan waktu dan bertahap. Dengan demikian, kita lebih suka dan menyarankan untuk memulai dengan melakukan “pengelompokan” Kabupaten (“Wilayah”), mendesentralisasikan kepada mereka (dan tidak harus ke kabupaten secara individual dipertimbangkan untuk mendapatkan ekonomi berskala) beberapa fungsi dan kompetensi; tetapi proses ini selalu dilakukan dalam kaitan yang erat dengan badan-badan Pemerintah Pusat, terutama di bidang-bidang sensitif yang lebih bersifat “nasional” daripada “lokal” seperti dalam kasus kontrol dan tindakan mengenai warisan budaya.

Desentralisasi ini, terutama dalam bentuk yang kami sarankan untuk menciptakan “pengelompokan kabupaten”, dapat menjadi instrumen penting untuk menempatkan teknisi dengan kualifikasi memadai --- khususnya mereka yang belajar di luar negeri.

Diakui bahwa, terutama di daerah yang lebih terpencil, perlu segera dilakukan upaya tambahan untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Yang kita bicarakan di sini adalah tentang layanan penting, seperti, misalnya, pencatatan sipil, bantuan kesehatan dan pengobatan dasar, pembayaran tunjangan sosial, bantuan makanan. Salah satu proposal konkret adalah menciptakan “**mobil kewarganegaraan**”, yang mencakup berbagai layanan umum, dan melakukan kunjungan secara berkala ke masyarakat. Proyek ini dapat dimulai sebagai “proyek percontohan” untuk menganalisis potensi dan kendala dari langkah tersebut.

Timor-Leste telah melakukan berbagai usaha dalam penggunaan teknologi digital dalam proses produksi dan Administrasi Negara, tetapi masih banyak lagi yang perlu dilakukan. Beberapa keterlambatan dalam pemrosesan dokumen oleh banyak perusahaan, lambatnya layanan yang diberikan oleh Administrasi Negara dan minimnya akses layanan internet, baik di ibu kota maupun di pedalaman negara, terbukti dengan krisis COVID-19. Di sisi lain, peningkatan fasilitas itu sendiri juga harus dilakukan, sehingga memberikan kondisi kerja yang lebih baik bagi para pegawai dan mereka yang dilayani.

Oleh karena itu, **pemasangan serat optik yang menghubungkan negara ini dengan dunia**, secara cepat dan mudah diakses merupakan proyek penataan untuk masa depan Timor-Leste. Ini adalah kekuatan pendorong yang sangat penting untuk memperkuat kohesi wilayah dan integrasi pedalaman dalam ekonomi nasional (dan, akhirnya, global), dengan mempromosikan platform digital untuk arus produk, barang dan jasa secara *online*, serta untuk universalitas pengajaran digital. Jika daerah pedalaman dan terpencil di negara sudah terhubung ke layanan internet yang cepat dan dapat diakses, akan memungkinkan, misalnya, mobilisasi petani muda untuk menetap di pedalaman dan melakukan pembaruan pertanian dan sistem produktif, sehingga mengurangi kepadatan di ibukota Dili; Masuknya serat optik ke seluruh bagian negeri penting untuk memastikan tujuan ini dan tujuan-tujuan lainnya.

Akhirnya, dan tidak kalah pentingnya, kita harus mulai berpikir tentang **energi terbarukan, berkelanjutan dan alternatif** bagi negara ini, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang Timor-Leste memiliki - matahari, laut dan angin. Perubahan tersebut bisa berarti penurunan konsumsi listrik seperti yang kita kenal saat ini dan menyebabkan penurunan biaya bahan bakar, selain menjadi sumber energi yang ramah lingkungan.

Sektor/ Bidang	Tindakan/ Langkah yang Diusulkan
<p>Pertanian (dan industri kecil pengolahan makanan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat kebijakan untuk memperbaharui perkebunan kopi Timor-Leste dengan subsidi bagi petani yang mengganti tanaman lama dengan yang baru dan lebih produktif; • Mengembangkan pemamfaatan kehutanan, yaitu cendana dan kayu jati, berdasarkan undang-undang yang disetujui pada tahun 2017; • Mendorong penanaman pohon untuk kayu bakar untuk menghindari penebangan pohon secara sembarangan; meningkatkan kualitas penyuluhan pedesaan; pengenalan pendidikan peternakan; • Implementasi kebijakan penggantian impor (Sebagian), sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, khususnya impor beras: : <ul style="list-style-type: none"> ○ omeningkatkan kontrol impor (menaikkan tarif); ○ mendorong produksi nasional, melalui penyediaan bibit dan jaminan pemasaran / bantuan untuk penjualan produksi (Program pembelian dan distribusi produksi oleh Negara); ○ Mengintensifkan penggunaan mesin penanam (tetapi bukan traktor) dalam penanaman padi; ○ Mendirikan “bank benih” yang produktif dan menyediakannya bagi para petani. • Mendukung sektor swasta dalam meningkatkan produksi daging dengan sistem kurungan hewan dan pengawasan kesehatan: <ul style="list-style-type: none"> ○ Melakukan kampanye vaksinasi hewan secara masal; ○ Memberikan bibit tanaman untuk pakan hewan kepada para peternak; ○ Membangun sarana penampungan air untuk ternak di desa-desa, menggunakan program pekerjaan umum pedesaan padat karya. • Mempromosikan dan mendukung asosiasi pertanian, khususnya melalui dukungan langsung kepada lembaga yang mempromosikan kredit mikro di masyarakat pedesaan; • Menyediakan, di Perguruan Tinggi atau Lembaga lainnya, pelatihan kursus (pada tingkat yang lebih tinggi, untuk jangka waktu yang lebih lama, tetapi juga teknis-intensif jangka pendek) di bidang tertentu seperti pertanian tropis dan peternakan; • Meningkatkan dukungan untuk proyek-proyek seperti “Quinta Portugal” atau proyek serupa lainnya, untuk meningkatkan bantuan teknis untuk kopi dan produsen pertanian lainnya.

Sektor/ Bidang	Tindakan/ Langkah yang Diusulkan
<p>Pariwisata</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mendirikan perusahaan milik negara untuk mendorong sektor ini; • Meningkatkan pendidikan/ pelatihan profesional dibidang ini dengan “mengupgrade” sebuah sekolah pariwisata ke tingkat yang lebih tinggi, internasional; • Melakukan pemugaran terhadap bekas kediaman bupati dan “benteng” untuk melestarikan warisan kita dan mendukung pariwisata, kemungkinan dengan dukungan dari Mitra Pembangunan dan UNESCO; • Merehabilitasi jalanan pedesaan yang memiliki daya tarik wisata khusus, menggunakan program pekerjaan umum pedesaan padat karya. • Mengendalikan (memusnahkan) buaya di pantai utara untuk membuat pantainya menjadi lebih aman; • Membangun / menciptakan (di Metinaro?) Sebuah taman tematik yang didedikasikan untuk penyebaran dan pelestarian budaya dan kerajinan tangan Timor-Leste; • Mempromosikan Ekowisata, misalnya dengan mengkombinasikan tempat penginapan dengan perkebunan kopi atau persawahan; • Berpegang pada Strategi Nasional yang telah disetujui untuk sektor tersebut sebagai referensi, membuat rencana konkret untuk mengembangkan pariwisata, secara bertahap. Berdasarkan karakteristiknya, akan dimulai sekarang dengan "ujung timur", kabupaten Baukau, Vikeke dan Lautein, sebagai daerah untuk prioritas awal untuk pengembangan pariwisata (yang akan diikuti dengan daerah lain); dalam jangka waktu 5 sampai 6 tahun, merehabilitasi bandara Baukau untuk menerima penerbangan “charter”; • Membangun Museum-Perpustakaan Nasional, yang telah direncanakan, di Dili; • Mengembangkan iklan dan kampanye pemasaran tentang Timor-Leste, untuk dipromosikan di luar negeri, yang menyoroti kekayaan alam laut dan pegunungan negara ini.
<p>Perumahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun perkampungan lengkap dengan infrastruktur di beberapa kota (misalnya: Dili, Baukau, Pante Makasar) untuk membangun perumahan yang ditujukan untuk keluarga berpenghasilan rendah untuk perumahan sosial, yang akan diserahkan kepada penghuninya setelah 25 tahun pembayaran sewa - dinamisasi, kepemilikan dan pengelolaan program ini harus menjadi tanggung-jawab Jaminan Sosial atau lembaga baru yang didirikan (National Housing Institute?), yang terkait dengan Jaminan Sosial; • Menjamin kebersihan umum, pasokan air di rumah dan pasokan listrik di seluruh negeri, secara bertahap; • Membangun sebuah pusat pengolahan sampah dan air limbah moderen (Dili); • Membangun pusat mata air untuk umum.

Sektor/ Bidang	Tindakan/ Langkah yang Diusulkan
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan persentase pengeluaran untuk pendidikan dalam konteks APBN tahunan hingga, setidaknya, akhir periode legislatif, dan menetapkan sebagai tujuan selama 5 tahun penggantian beban biaya-biaya ini di APBN; • Menambah jumlah CAFE – (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah), menjadi 2 sampai 3 per kabupaten, pada tahap pertama (5 sampai 6 tahun); • Memperluas jaringan pusat pendidikan menengah, Taman kanak-kanak dan pusat pelatihan ketenaga-kerjaan; • Membuat proyek pemeliharaan / rehabilitasi gedung sekolah (semakin banyak sekolah yang lebih baik dengan pengurangan jumlah siswa per guru), dapat dilakukan dalam kerangka program pekerjaan umum pedesaan padat karya; • Membuat kesepakatan dengan Portugal dan Brazil untuk memungkinkan dukungan untuk CAFE-CAFE baru yang akan dibangun; menggunakan pembiayaan dari mitra pembangunan untuk pendirian CAFE dan rehabilitasi gedung sekolah dan gedung pelatihan ketenaga-kerjaan; • Meningkatkan program pelatihan guru untuk berbagai tingkat pendidikan; • Mencetak dan membagikan buku pelajaran kepada siswa dan guru; • Memulihkan 13 Surat Pendidikan yang telah dibuat, mengupdate dan menggunakan surat-suat itu sebagai instrumen perencanaan dan strategi pendidikan yang penting; • Memperbaiki program makanan tambahan anak sekolah (yang berkaitan dengan menu dan proses pelaksanaan); • Membuat layanan kredit, dengan persyaratan konsesi, untuk memberikan dukungan finansial kepada Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Terakreditasi, menggantikan subsidi pemerintah saat ini; • Menetapkan program untuk mengikat lulusan muda, agar mereka tidak "merantau" ke luar negeri untuk mencari peluang kerja.
Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menambah pengeluaran di bidang kesehatan saat ini untuk meningkatkan secara signifikan kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien, peralatan, materi, pelatihan sumber daya; • Menambah bantuan keuangan dan teknis untuk Program-program seperti Kesehatan di Keluarga, Kesehatan di Sekolah dan Kesehatan di tempat-Kerja; • Melaksanakan pekerjaan pemeliharaan rumah sakit dan pusat kesehatan, jika hanya memerlukan rehabilitasi kecil-kecilan, dapat dilakukan dalam rangka program pemerintah untuk pekerjaan padat karya; • Meningkatkan investasi publik dalam memperluas infrastruktur rumah sakit dan pusat perawatan kesehatan di seluruh negeri, berdasarkan rencana yang tepat;

Sektor/ Bidang	Tindakan/ Langkah yang Diusulkan
<p>Kesehatan (kelanjutan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan investasi negara dalam pelatihan dan akreditasi sumber daya manusia di bidang kesehatan; • Mengembangkan kesepakatan dengan entitas swasta (termasuk sektor ketiga) untuk konsesi pengelolaan (mungkin sebagian) rumah sakit, klinik dan pusat kesehatan, dengan subsidi Negara, untuk meningkatkan penawaran dan kualitasnya, tanpa menciptakan hambatan untuk mengaksesnya; • Mempromosikan peningkatan berkelanjutan pelatihan petugas kesehatan (kesepakatan dengan WHO dan mitra-mitra pembangunan), baik di tingkat ilmiah maupun teknis (misalnya untuk mengoperasikan peralatan) maupun di tingkat pedagogis; • Melakukan kampanye - baik secara langsung atau melalui bantuan kepada lembaga solidaritas sosial yang bergerak di bidang ini - di lapangan, tentang praktik kebersihan yang baik (seperti mencuci tangan), penggunaan obat-obatan, dan penggunaan layanan kesehatan, dan menghindari penggunaan praktik tradisional yang tidak terbukti secara ilmiah.
<p>Perlindungan Sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyetujui Strategi Perlindungan Sosial Nasional yang sudah disiapkan dan merancang rencana implementasi tahunan, yang harus diperhitungkan dalam persiapan rencana dan anggaran tahunan Negara; • Menciptakan mekanisme / instrumen alternatif untuk pembayaran tunjangan sosial, dan menghindari pembayaran tunai dan resiko yang terkait, dan membantu ekonomi menggunakan sistem "bank", dan mengurangi biaya untuk implementasi langkah-langkah tunjangan sosial; • Mengoperasikan Layanan Verifikasi Orang-orang penyandang disabilitas; • Menyetujui bentuk dan model pengelolaan Dana Cadangan Jaminan Sosial; • Meningkatkan cakupan Program "Bolsa da Mãe/ Beasiswa untuk siswa tidak mampu"; • Menciptakan perlindungan terhadap kematian, dalam skema non-kontributif; • Menciptakan perlindungan terhadap penyakit dan pengangguran, dalam skema iuran; • Menerapkan program ketenaga-kerjaan aktif - program pemerintah untuk ketenaga-kerjaan pedesaan, di bidang padat karya, seperti konstruksi sipil (jalan pedesaan, kran air umum, pasar, pekerjaan kecil perbaikan fasilitas umum) atau pariwisata; • Melakukan kampanye informasi besar-besaran untuk pekerja pedesaan dan pekerja dari sektor informal, untuk mendorong kepatuhan mereka pada skema jaminan sosial - mendukung keterikatan ini, melalui partisipasi bersama Negara dalam pajak iuran; • Mempelajari kemungkinan, untuk membuat tindakan perlindungan sosial baru untuk jangka panjang, yang bertujuan untuk menjamin pendapatan minimum bagi semua warga negara yang tidak memiliki pendapatan.

Sektor/ Bidang	Tindakan/ Langkah yang Diusulkan
Aspek-aspek Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyetujui dan mempublikasikan “Hukum Pertanahan” dan semua peraturan terkait lainnya; • Menyusun dan menyetujui kerangka peraturan yang diperlukan untuk operasionalisasi perusahaan (peraturan tentang kebangkrutan, perpaduan perusahaan, akses ke kredit, dll); • Meningkatkan fungsi Pengadilan dengan memberi mereka kemampuan untuk memutuskan kasus perdata, bukan hanya kasus pidana; • Menyusun dan menyetujui Undang-undang Kerangka Kerja APBN yang baru, termasuk seluruh Sektor Administrasi Negara; • Mempersiapkan dan menyetujui Bagan Akun, untuk sektor swasta dan pemerintah; • Melakukan reformasi dalam Administrasi Publik: membuat sistem yang adil untuk mengevaluasi kinerja para pegawai; memberikan kursus pelatihan singkat yang ditujukan pada bidang-bidang tertentu; meningkatkan kapasitas dan keterampilan layanan sumber daya manusia dari berbagai badan publik, untuk mengurangi birokrasi di beberapa prosedur; merestrukturisasi tenaga kerja, dengan mewajibkan proses pensiun sejak usia 60 tahun; Menerapkan efektifitas penerbitan “kartu identitas” (dengan nomor identitas satu-satunya dan untuk seumur hidup) untuk semua; • menjadikan Direktorat Jenderal Statistik saat ini menjadi Lembaga Publik otonom - di bawah pengawasan politik Perdana Menteri atau Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perencanaan dan Perencanaan; • Merumuskan kembali komposisi Dewan Ketenagakerjaan Nasional, agar Jaminan Sosial menjadi bagian dari dewan itu, untuk mempromosikan dialog sosial yang efektif dan terkoordinasi, di bidang ketenagakerjaan dan jaminan sosial; • Membuat sistem pendaftaran wajib bagi orang-orang yang menganggur / yang mencari pekerjaan; • Meningkatkan layanan Pengawasan Ketenagakerjaan, terutama dengan menyediakan lebih banyak sumber daya bagi layanan-layanan ini; • Menciptakan sebuah mekanisme komunikasi, tepat waktu, antara layanan registrasi bisnis (SERVE), layanan perpajakan (Kementerian Keuangan) dan Perlindungan Sosial - membuat registrasi bisnis lebih efisien, lebih cepat dan tidak birokratis; • Reformasi pajak: membuat kode pajak yang redistributif dan adil, yang memperhitungkan juga pengecualian / manfaat pajak dalam situasi tertentu (kebijakan ekonomi untuk mendorong sektor swasta); • Pembentukan kemitraan dengan sektor perbankan, bertujuan untuk menciptakan kondisi pembiayaan bagi perusahaan dan usaha kecil: negosiasi tentang persyaratan pinjaman (volume, suku bunga, masa tenggang). Bank-bank, kemungkinan harus diberi kompensasi, dengan memberikan manfaat pajak yang sesuai;

Sektor/ Bidang	Tindakan/ Langkah yang Diusulkan
<p>Aspek-aspek Kelembagaan (kelanjutan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Antar Kementerian: harus ada koordinasi antar berbagai Kementerian yang menjadi bagian dari Pemerintahan VIII untuk menghindari tumpang-tindih tugas / tanggung jawab, serta untuk mengarahkan sumber daya yang ada dengan baik, sesuai ruang lingkup masing-masing Kementerian; • Memulai proses desentralisasi administratif secara efektif, melalui, pada tahap pertama - dan dengan mempertimbangkan peningkatan skala yang diperlukan - pembentukan kawasan (4/5), yang otonom; • Mengembangkan suatu proyek percontohan - di 2 atau 3 Kota— “carrinhas móveis de cidadania” [Mobil Kewarganegaraan], untuk meningkatkan beberapa layanan publik yang penting (catatan sipil dan aktualisasi data, bantuan medis / konsultasi umum dan pengobatan, pembayaran tunjangan sosial, pengiriman barang dan bantuan makanan) kepada masyarakat yang paling terisolir untuk menbongkar hambatan akses.
<p>Instalasi serat Optik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mempercepat seluruh proses pemasangan serat optik melalui kabel bawah laut yang menghubungkan Timor-Leste dengan bagian lain dunia.
<p>Energi Terbarukan, Berkelanjutan, dan Alternatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan sumber daya alam yang Timor-Leste miliki - matahari, laut dan angin - sebagai cara untuk mengurangi biaya untuk bahan bakar, selain sebagai sumber energi yang ramah lingkungan.

BAB III: PENDANAAN

Bab ini mengulas sedikit tentang persoalan pendanaan kegiatan Negara Timor-Leste secara umum dan, khususnya, pendanaan Rencana Pemulihan Ekonomi (RPE) pada periode 2021-2023. Perlu diingat bahwa logika RPE adalah menjadi rencana untuk jangka waktu yang lebih lama (hingga, setidaknya, 2030) daripada mandat badan legislatif saat ini.

Sumber pendanaan potensial untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara Timor-Leste (tidak termasuk Anggaran Jaminan Sosial):

- (pajak dan biaya);
- Transfer dari Dana Minyak;
- Utang Negara (pinjaman)
- Transfer dari donor
- Pandapatan dari Badan-badan otonom.

A - PENDAPATAN DALAM NEGERI

Pendapatan dalam negeri (biaya da pajak) sekitar USD 220-230 juta / tahun. Nilai ini tidak stabil dan tergantung pada, khususnya:

- situasi perekonomian; dan
- tingkat biaya pajak - yang tergantung pada apa yang disebut “reformasi pajak”.

Di tahun-tahun mendatang (2021 hingga 2023) situasi ekonomi Timor-Leste akan sedemikian rupa dimana dapat diperkirakan penurunan tajam dalam pendapatan pajak karena kondisi perekonomian yang lemah. Apa dampak nyata dari situasi tersebut terhadap penerimaan pajak? Tidak mudah untuk diprediksi, tetapi hipotesis “konservatif” adalah bahwa pendapatan pajak itu tidak akan mungkin melebihi, rata-rata, sekitar USD 180 juta / tahun pada akhir masa legislatif ini.

Mengenai pajak dan biayanya, situasi kondisi saat ini tidak merekomendasikan dilakukannya perubahan penting. Setiap perubahan (reformasi pajak) hanya boleh dilakukan pada APBN tahun 2024 atau, bahkan, ditahun 2025 dengan mempertimbangkan waktu yang dapat diprediksi dari persetujuannya di Parlemen Nasional (mungkin selama sesi parlemen tahun 2024, dala, APBN tahun 2025).

Namun, dengan memanfaatkan sebagian pekerjaan yang telah dilakukan oleh Komisi Reformasi Pajak yang sudah tidak ada, perlu dilakukan studi yang penting untuk menyetujui Reformasi Pajak.

Persetujuan ini harus mengikuti beberapa prinsip, salah satu diantaranya yang dikatakan sekarang: pajak pendapatan setidaknya memiliki tiga tingkat, di mana yang pertama bebas dari pembayaran pajak dan dua lainnya harus menetapkan tarif pajak yang progresif:

Salah satu poin penting dari Reformasi Perpajakan yang akhirnya tidak disetujui adalah

penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pekerjaan untuk Reformasi yang akan dilaksanakan juga harus menyediakan pengenalan PPN dan harus diidentifikasi sekarang - dan disetujui - semua langkah (atau langkah-langkah utama) yang secara teknis diperlukan untuk pengenalannya, yaitu di bidang akuntansi bisnis dan organisasinya.

Penting juga untuk menetapkan perkiraan target beban pajak sebagai akibat dari Reformasi Pajak. Satu hipotesis yang mungkin adalah menetapkan tujuan ganda untuk tujuan saat ini tetapi mencapainya secara progresif. Misalnya, menaikkan 2 persen setiap tahun untuk mencapai sekitar 15% dari PDB.

Kebutuhan untuk meningkatkan bobot pendapatan domestik dalam pembiayaan APBN harus memperhitungkan kebutuhan untuk mengurangi penggunaan pendapatan dari minyak secara persentase dari total pendapatan, yang tidak selalu dalam jumlah mutlak.

B - TRANSFER DARI DANA MINYAK

Transfer dari Dana Minyak ke rekening Perbendaharaan terdiri dari dua “angsuran”: Pendapatan Berkelanjutan Perkiraan dan surplus dari itu.

Yang pertama berkisara antar 500-550 juta USD. Angsuran kedua memiliki nilai variabel dari tahun ke tahun. Rata-rata tahunan untuk periode 2017-2019 adalah 565 juta. Total transfer rata-rata (2017-2019) sekitar 1.100 juta.

Jumlah transfernya besar, tetapi harus dibandingkan dengan modal Dana dan akumulasi pendapatan setiap tahun—yang tergantung pada pendapatan yang diterima sebagai remunerasi untuk obligasi (perbendaharaan dan saham) yang dimilikinya.

TOTAL ASET BERSIH	17 600 576
MODAL	
Saldo pembukaan dibulan sebelumnya	17 028 934
Pergerakan Modal selama sebulan	-126 192
Penghasilan bersih bulan ini	697 834
TOTAL MODAL BERSIH	17 600 576

Sumber: Buletin Bulanan Dana Minyak BCTL, Mei 2020

Dalam situasi ekonomi yang “normal”, kita cenderung mengatakan bahwa transfer tersebut terlalu tinggi, sehingga perlu dikurangi.

Mengenai situasi ekonomi saat ini dan kebutuhan untuk menopangnya dan, pada saat yang sama, memilih transformasi ekonomi nasional, kita menyadari bahwa nilai transfer susah dikurangi—setidaknya sampai akhir krisis saat ini (2023?) —dan bahkan mungkin, pada akhirnya, perlu ditingkatkan (sampai sekitar 1200-1300 juta / tahun?). Batasan, baik secara politik dan ekonomi, harus diputuskan oleh pemerintah. Secara khusus, ini mungkin yang mendorong nilai modal Dana Minyak menjadi sekitar 12-15 juta USD (jumlah yang menjamin pendapatan yang diperlukan di masa depan).

Harus dipertimbangkan bahwa pendapatan dari Greater Sunrise tidak akan masuk ke kas Timor-Leste sebelum suatu periode yang, karena sulit diprediksi karena tergantung pada banyak faktor-faktor nasional (kebijakan pemerintah untuk sektor tersebut, tampaknya sedang dalam proses perubahan) dan internasional (pasar minyak dan gas internasional), sulit akan berkurang dalam 6 sampai 7 tahun.

C - UTANG NEGARA (PINJAMAN)

Saat ini Timor-Leste memiliki utang yang sangat relatif rendah berkaitan dengan pinjaman lunak dari mitra pembangunan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Pada 2018, nilai pinjaman sekitar 60 juta USD.

Bagi kita, masih banyak ruang untuk meningkatkan volume pinjaman lunak ini. Pinjaman-pinjaman ini sangat penting baik dari segi keuangan maupun teknis karena biasanya disertai dengan pengawasan teknis terhadap pekerjaan yang dilakukan—yang sangat penting dalam konteks Timor-Leste.

Negara dapat menggunakan pinjaman komersial (untuk dihindari) dan penerbitan hutang negara (Obligasi dari Perbendaharaan Timor-Leste) yang ditujukan ke masyarakat umum dengan menggunakan sistem perbankan sebagai perantara—dan sebagai investor yang memiliki hak istimewa, karena besarnya likuiditas yang mereka miliki, yang memaksa bank untuk menempatkan sebagian besar kelebihan sumber daya mereka di bank asing, biasanya di kantor pusat mereka.

Peningkatan hutang negara terus dihindari hingga saat ini karena negara lebih suka menggunakan pembiayaan dari Dana Minyak. Pilihan untuk menggunakan dana ini atau hutang publik tergantung pada berapa jumlah yang “dibayar” untuk satu atau yang lain. Jika bunga yang harus dibayar untuk hutang publik lebih kecil dari hilangnya pendapatan dari penggunaan uang dari dana Minyak, penggunaan hutang negara merupakan pilihan yang lebih baik. Dalam praktiknya dan karena hasil dari Dana Minyak telah mencapai sekitar 4,3% per tahun sejak awal Dana Minyak (lihat laporan BCTL tentang FP bulan April/20), kemungkinan untuk beralih ke utang publik harus dipertimbangkan jika memiliki suku bunga sekitar 2-3% — sesuatu yang sangat mungkin jika melihat tingkat bunga saat ini di pasar internasional.

United States Interest Rate		
Last Release	Actual	Forecast
Jun 2020	0.25 %	0.25 %
Previous	Frequency	Units In
0.25 %	Daily	%
https://www.fxempire.com/macro/united-states/interest-rate		

International Equities	6 716 732	38,18%	10,60%	-12,70	-13,33	-4,91	4,80	4,98	8,18
Benchmark			10,92%	-11,89	-12,43	-4,00	4,99	4,92	7,81
Excess			-0,32	-0,81	-0,90	-0,91	-0,19	0,06	0,37
PERFORMANCE SUMMARY									
	Market Value	Weight	Return (%)						
			Monthly	QTR	FYTD	1 Year	3 Years	5 Years	Since Inception
Total Portfolio	17 600 578	100%	4,11	-1,32	-0,78	4,88	5,05	4,18	4,29
Benchmark			4,21	-1,60	-0,98	4,81	4,89	4,03	4,23
Excess			-0,10	0,28	0,20	0,07	0,15	0,13	0,08
International Fixed Interest	10 202 397	57,97%	0,51	3,07	4,48	8,18	3,85	2,73	2,93
Benchmark			0,60	3,31	4,72	8,18	3,97	2,77	2,94
Excess			-0,09	-0,24	-0,24	-0,48	-0,12	-0,04	-0,02
BCTL Cash Management (TLCM)	977 674	5,55%	0,00	0,17	0,30	1,70	n.a.	n.a.	1,57

Sumber: Buletin Bulanan Dana Minyak BCTL, Mei 2020

D - TRANSFER DARI DONOR

Pada periode 2017-2019, mitra pembangunan menghabiskan dana rata-rata USD 179 juta/tahun di Timor-Leste.

Kami percaya bahwa tekanan krisis internasional akan terasa dampaknya dalam jumlah-jumlah ini—karena Timor-Leste akan masuk dalam “persaingan” dengan negara-negara lain yang berada dalam kondisi yang lebih buruk—dan kita tidak akan terkejut jika para donor akan mengurangi donasi ke negara kita menjadi sekitar 150 juta.

Pada tahun lalu, Pemerintah melakukan upaya untuk meyakinkan para donor agar menyalurkan sumbangan mereka melalui APBN. Kita tidak percaya bahwa kebijakan seperti itu akan berhasil — lebih buruk lagi, kita ragu bahwa menjadi kepentingan negara kita untuk memaksakan kebijakan ini, karena beberapa negara, seperti Amerika Serikat, telah mengumumkan bahwa mereka secara hukum tidak bisa melakukannya.

Tapi negara dapat (dan harus) meningkatkan kerjasama dengan para donor untuk mengurangi porsi donasi yang karena dibayarkan bukan kepada negara, tetapi disalurkan melalui berbagai mekanisme, di negara asal melalui, misalnya melalui skema, “bantuan yang berikatan” [“ajuda ligada”].

E - PENDAPATAN DARI BADAN-BADAN OTONOM

Nilai pendapatan ini relatif rendah dalam konteks Anggaran Negara, oleh karena itu tidak relevan untuk disebutkan di sini. Namun demikian, dana tersebut (dalam beberapa kasus) bisa relevan untuk setiap badan publik yang dipertimbangkan secara individual.

RINGKASAN

Dari apa yang dikatakan diatas, dapat disimpulkan bahwa di tahun-tahun yang akan datang (2021-2023) APBN akan mencapai, secara rata-rata, nilai-nilai berikut:

Pendapatan dalam negeri:	180 juta
Transferensi dai FP:	1,200 miliar
Utang Negara:	120 juta (60 dari pinjaman lunak)
Tranfer dari donor:	200 juta

TOTAL: USD 1700 juta setiap 1 tahun pselama 3 tahun ke depan (2021-2023)

Tentu saja ada **dua kondisi** *sine qua non*:

- 1) proyek-proyek yang akan dibiayai harus berkualitas, yang secara efektif menghasilkan dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat nasional (terutama pada pasokan dan konsumsi nasional serta pada peningkatan modal fisik dan modal manusia); dan
- 2) “Penyimpangan” sumber daya ke skema korupsi harus minim. Pelaksanaan yang efektif dari undang-undang yang baru-baru ini diloloskan oleh Parlemen Nasional tentang korupsi dan persetujuan dan implementasi undang-undang baru tentang pengadaan negara.

KESIMPULAN

Jumlah rata-rata di atas adalah: jumlah rata-rata yang bisa memiliki distribusi tahunan yang berbeda mengingat pada awal tahun (2021) khususnya akan menjadi tahun pelaksanaan tetapi juga untuk persiapan proyek yang lebih kompleks. Dengan demikian, kita akan menganggap normal distribusi tahunan dalam jumlah 1.700 + 1.600 + 1.600 juta USD untuk tahun 2021 hingga 2023.

Jumlah-jumlah ini tampaknya penting tetapi jumlah-jumlah itulah yang kita anggap sebagai **nilai minimum yang diperlukan** untuk memberikan dorongan penting pada perekonomian nasional untuk pemulihannya.

Pada tahap ini, jumlah itu, terutama harus ditanggung oleh Negara dan pengeluarannya—saat ini, tetapi terutama pengeluaran-pengeluaran untuk bidang sosial dan investasi — karena sektor swasta, yang sudah rapuh sebelumnya, sekarang bertambah rapuh yang membuatnya tidak mungkin untuk memimpin proses pemulihan ekonomi. Kepemimpinan Negara yang disebutkan di atas harus dipahami sebagai sesuatu yang perlu bahkan setelah akhir masa legislatif saat ini, tetapi harus mempersiapkan sektor swasta untuk meningkatkan kepentingan relatifnya.

Perlu diperhatikan bahwa “aturan” untuk memberi sektor pemerintahan, peran yang menentukan pada tahap ini, adalah aturan di sebagian besar negara yang sekarang terkena dampak dari krisis saat ini.

Tiga catatan terakhir:

- Seperti telah disebutkan, jumlah anggaran yang dimaksud dianggap sebagai jumlah **minimum untuk memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat serta untuk memulihkannya kembali**. Oleh karena itu, dengan keterbatasan kapasitas penggunaan anggaran Negara, kita tidak boleh mengabaikan kebutuhan agar jumlah Anggaran Negara tahunan, yaitu yang selama dua tahun terakhir legislatif ini, untuk mencapai sekitar 2.000 juta USD yang digunakan secara efektif, oleh karena itu, pembiayaan yang dirujuk di atas harus direvisi— khususnya jumlah yang ditransfer dari Dana Minyak;
- Jumlah-jumlah ini mengasumsikan **tingkat pelaksanaan anggaran sangat dekat dengan 95-100%**, jauh di atas yang biasanya (kurang lebih sekitar 90% dalam beberapa tahun terakhir).

Jumlah yang signifikan dari dana yang diambil dari Dana Minyak harus dianggap normal dalam situasi saat ini, bahkan jika hal itu berimplikasi pada penurunan nilai modalnya. Bagaimanapun juga, untuk hal inilah Dana itu ada: mendanai anggaran di tahun-tahun “normal” tetapi juga berfungsi sebagai nilai cadangan untuk saat-saat krisis seperti sekarang ini.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN ANALISIS DAMPAK

Pada saat ini, melihat ketersediaan data dan keterbatasan waktu yang dibutuhkan untuk mempresentasikan Rencana Pemulihan Ekonomi (RPE), kami yakin bahwa tidak mungkin membuat indikator kualitas yang memungkinkan pengukuran yang diusulkan untuk dipantau, atau untuk mempelajari dampaknya.

Di sisi lain, akan lebih masuk akal jika indikator-indikator tersebut dibangun setelah RPE disetujui oleh Dewan Menteri, agar pelaksanaannya dapat dijadwalkan dan dipantau.

Tetapi ini adalah tugas yang sangat penting.

Dalam pengertian ini, kami mengusulkan agar pembentukan tim teknis disetujui — mungkin di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi (MCAE) — yang, meskipun bekerja dalam kemitraan dengan UPMA / Kabinet Perdana Menteri dan dengan badan pemerintah yang berkaitan (termasuk bidang ekonomi dan sosial), bertanggung jawab untuk membangun indikator untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPE. Microdata tersebut kemudian harus diserahkan kepada Direktorat Jenderal Statistik (jika disetujui, Lembaga Publik yang baru) untuk keperluan analisis / studi dampak, baik di tingkat makro maupun mikro, dengan mempertimbangkan tujuan utama: meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di bidang-bidang produktif; mendorong investasi; menciptakan pekerjaan yang layak dan produktif; meningkatkan ketahanan pangan dan gizi; meningkatkan pendapatan dan memperbaiki distribusinya; meningkatkan semua indikator di bidang sosial — pendidikan, kesehatan, perumahan, perlindungan sosial.

Selalu ada sejumlah faktor dan keterbatasan dalam proses pelaksanaan langkah-langkah yang diusulkan, yang, jika tidak diatasi, dapat membuat kualitas Rencana Pemulihan Ekonomi mengalami masalah. Dua faktor yang mungkin menimbulkan permasalahan dalam implementasi Rencana Pemulihan Ekonomi berkaitan dengan kebutuhan akan respon yang cepat dan efektif oleh Administrasi Negara dan badan-badan Negara dan koordinasi yang baik di antara mereka.

Prinsip-prinsip yang diusulkan untuk dapat memandu pelaksanaan langkah-langkah antara lain:

- **Kesederhanaan:** Kebutuhan untuk mendefinisikan proses sederhana, untuk melibatkan lebih sedikit pihak dan untuk menghindari pemborosan sumber daya yang langka di banyak bidang.

- **Kepemimpinan dan koordinasi yang terfokus:** Kebutuhan untuk memberikan koordinasi kepada badan Negara peran sebagai koordinator umum, yang tanggung jawabnya adalah memonitor tentang siapa melakukan *apa, kapan dan di mana*.

- **Tanggung-jawab dan hasil:** Kebutuhan untuk mendefinisikan dengan jelas tanggung jawab dan harapan, mengalokasikan sumber daya yang memadai dan mencapai hasil yang konkret dan terukur.

- **Pelatihan yang memadai:** Perlunya setiap tim yang bertanggung jawab untuk setiap langkah, untuk dilatih dan diinformasikan dengan baik.

KOORDINASI

Komisi untuk Persiapan Rencana Pemulihan Ekonomi menerima kontribusi yang berharga dari individu dengan reputasi dan pengakuan akademis, serta dukungan teknis dan administratif yang diberikan oleh *Unit Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi* (UPMA, Unidade de Planeamento, Monitorização e Avaliação) Kantor Perdana Menteri Pemerintah Konstitusi VIII. Banyak konsultasi telah dilakukan selama bulan Juni dan Juli tahun ini. Daftar berikut ini sesuai urutan abjad.

KONTRIBUSI TEKNIS DARI:

Abraão de Vasconcelos - Gubernur Bank Sentral Timor-Leste

António Almeida Serra - CEsa Portugal

Augusto Lança - Institut Politeknik Beja, Portugal

Brett Inder - Universitas Monash Australia

Jim Wright - Direktur Misi / USAID

Teresa Coelho - CEsa Portugal

Tony Jape - Direktur dari Hotel Owners of Timor Lorosa'e Association (HOTL)

Tye Sundlee - Penanggung Jawab Urusan Ekonomi, Politik dan Konsuler dari Kedutaan Besar Amerika Serikat

KONSULTASI DILAKUKAN DENGAN:

Parlaman Nasional

Komisi C Keuangan Negara

Komisi D Ekonomi dan Pembangunan

Tingkat Kementrian:

Ângelo dos Santos Veloso - Direktur Nasional Hubungan Perburuhan, SEFOPE

Aniceto Leto Soro - Direktur Eksekutif Sekretariat Strategi Ketenagakerjaan Nasional, SEFOPE

Armanda Berta dos Santos - Wakil Perdana Menteri dan Menteri Solidaritas dan Inklusi Sosial

Armindo Maia - Menteri Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Demétrio do Amaral de Carvalho - Sekretaris Negara Lingkungan Hidup

Domingos Lopes Antunes - Wakil Menteri Perdagangan dan Industri

Elídio de Araújo - Sekretaris Negara Perikanan

Elizário Ferreira - Sekretaris Negara untuk Koperasi



Fernando Hanjam - Menteri Keuangan
Gaspar de Araújo - Direktur Jenderal Kementerian Transportasi dan Komunikasi
Gaspar Pinto de Carvalho Freitas do Amaral - Penasihat Menteri Pariwisata dan Perdagangan
Igino Ferreira - Direktur Nasional Tenaga Kerja Dalam Negeri, SEFOPE
Inácia da Conceição Teixeira - Wakil Menteri Pariwisata Komunitas dan Kebudayaan
Joaquim Amaral - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
José Asa - Direktur Jenderal Administrasi dan Keuangan, SEFOPE
José Lucas do Carmo da Silva - Menteri Pariwisata, Perdagangan dan Industri
José Maria dos Reis - Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perencanaan
Leila M.L. Cárceres dos Santos - Direktur Eksekutif FDCH
Lino de Jesus Torrezão - Wakil Menteri Administrasi Negara
Longuinhos dos Santos - Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu dan Kebudayaan
Manuel Cárceres da Costa - Menteri Kehakiman
Maria José da Fonseca - Sekretaris Negara untuk Kesetaraan dan Inklusi
Mateus Wilfredos dos Santos Tallo - Direktur Nasional Pelatihan Kejuruan, SEFOPE
Miguel Pereira de Carvalho - Menteri Administrasi Negara
Odete Maria Freitas Belo - Menteri Kesehatan
Paulo Alves - Direktur Jenderal Pelatihan Kejuruan dan Ketenagakerjaan, SEFOPE
Pedro dos Reis - Menteri Pertanian dan Perikanan
Rui Hanjam - Penasihat Kementerian Pendidikan Tinggi, Ilmu dan Kebudayaan
Salvador Soares dos Reis Pires - Menteri Pekerjaan Umum
Sonio da Silva - Ketua Eksekutif Bagian Teknis, Dana Pendamping, SEFOPE
Teófilo Caldas - Sekretaris Negara Seni dan Budaya
Victor da Conceição Soares - Menteri Perminyakan dan Mineral

Badan-badan Otonom:

Faustino Cardoso Gomes - Presiden Komisi Kepegawaian
Florêncio Sanches - Direktur Eksekutif SERVE

Sektor Swasta, Bank-Bank Komersil:

Abel Guterres – Mantan Duta Besar dan pengusaha
António Vitor - Presiden Dewan Direksi BNCTL
Brígido de Sousa - Direktur Eksekutif BNCTL

Gamlah Manjuka - Direktur Komersial Heineken
Jan Winston Tambunan - Direktur PT Bank Mandiri
Jeremiah Chan - Direktur Eksekutif Pelican Paradise dan New International Timor Airlines, Lda
Jerry de Sousa - Pendiri dan Direktur Eksekutif Timor Air
Kathleen Gonçalves – Perhimpunan Pengusaha Cina Timor-Leste
Óscar Lima - Presidente dan semua Wakil-Presiden Kamar Dagang dan Industri Timor-Leste
Paulo Lopes – Direktur Jendral BNU
Ronald Roho - Manajer Perdagangan BRI
Rui Castro - Diretur MAECOM
Samitha Aluwihare - CEO Trading Timor-Leste
Tammy Kassion - Direktur ISAT
Valentino Varela - Pengusaha
Valter Ribeiro - Penanggung Jawab Bidang Komersial BNU

Organisasi-organisasi Internasional:

Ashley James Rogers - Koordinator Darurat WFP
Cândido da Conceição - Spesialis Manajemen Proyek, USAID
Dageng LIU - Perwakilan & Direktur Negara WFP
Elsty Morato - Pejabat Pembangunan Sosial Bank Pembangunan Asia
José Pereira - Pejabat Proyek Senior Bank Pembangunan Asia
Konstantin Borisov - IDSP, UNDP
Macmillan Anyanwu - Perwakilan Tetap Penduduk Bank Dunia dan tim
Munkhtuya Altangerel - Perwakilan Tetap UNDP
Peter Simone - Pariwisata untuk Semua, USAID
Rajesh Pandav - Perwakilan Tetap Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
Roy Trivedy - Koordinator Tetap PBB (UNRC)
Soneath Hor - Perwakilan Tetap Korporasi Keuangan Internasional dan tim
Sunita Caminha - Kantor Pusat UN Woman
Valérie Taton - perwakilan UNICEF
Wonesai Workington Sithole - Kepala Misi, IOM



Korps Diplomatik:

Aldemo Gracia - Duta Besar Brasil
Andrew Jacobs - Duta Besar Uni Eropa
Hirashima Shusaku - Penasihat Kedutaan Besar Jepang
José Pedro Machado Vieira - Duta Besar Portugal
Kathleen Fitzpatrick - Duta Besar Amerika Serikat
Masami Kinefuchi - Duta Besar Jepang
Misato Taki - Sekretaris Kedua Kedutaan Besar Jepang
Nick Compston - Direktur Program Kedutaan Australia
Peters Roberts - Duta Besar Australia

Kantor Kepresidenan Republik:

Filomena Almeida - Kepala Staf Kepresidenan Republik
Jorge Graça Nené - Penasihat Pribadi Presiden Republik

Organisasi-organisasi Non-Pemerintah:

Adilsonio da Costa Junior - Peneliti La'o Hamutuk
Anacleto Ferreira - Sekretaris Jenderal Palang Merah Timor-Leste
Daniel Santos do Carmo - Direktur Forum Organisasi Non-Pemerintah (FONGTIL)
Marta da Silva - Peneliti La'o Hamutuk
Pauline Tweedie - Perwakilan Negara The Asia Foundation
Pe. Juvito do Rego de Jesus Araújo - Vikaris Kamar Gerejawi Keuskupan Agung Dili
Vidiana Xareal - Palang Merah Timor-Leste

Institusi Akademik:

Adolmando Amaral - Rektor UNPAZ
Arlindo D. F. - Dosen UNITAL
Augusto Soares - Rektor IOB
Francisco M. Martins - Rektor UNTL
Hélio Xavier - Dosen UNTL
José Belo - Rektor UNDIL
Justino da Silva - Wakil Rektor DIT

Mantan Perdana Menteri:

Marí Bim Amude Alkatiri - Sekretaris Umum FRETILIN

Dukungan teknis dan Administrasi:

Alzira dos Reis - GfD/UPMA

António Soares - GfD/UPMA

Brígida Brites Soares - Koordinator UPMA

Dionísio Soares - UPMA

Firuz Shukurov - UNDP

Guteriano Neves- GfD/ Kabinet Perdana-Mentri

Ivan Alves - UPMA

João Gomes - GfD/UPMA

Joaquim Alves - UPMA

Desain grafis:

Nuno Ferreira e Costa

KOMISI UNTUK PERSIAPAN RENCANA PEMULIHAN EKONOMI:

Berta Montalvão - Anggota

Carlos da Silva Lopes Saky - Anggota

Manuel Vong - Anggota

Rui Maria de Araújo - Anggota

Rui Augusto Gomes - Presiden

[Perhatian: Dokumen ini adalah terjemahan dari naskah asli dalam bahasa Portugis. Jika ada perbedaan atau keraguan, mohon mengacu pada naskah aslinya.]





**PEMERINTAH
KONSTITUSIONAL VIII**